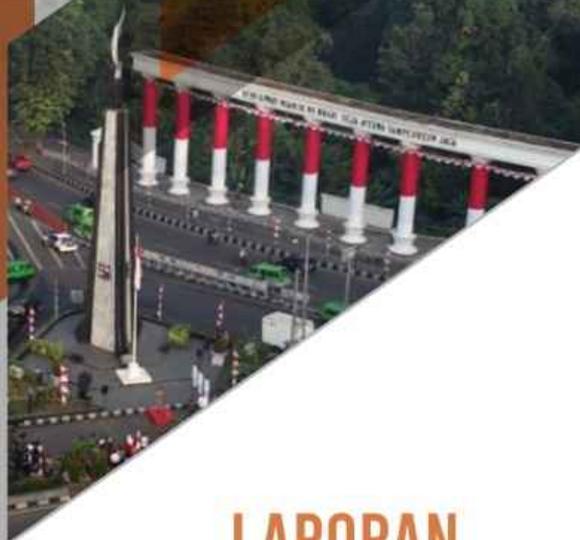




KOTA BOGOR
PEMERINTAH
KOTA BOGOR
TAHUN 2021



LPPD KOTA BOGOR TAHUN 2020



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

**KOTA BOGOR
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala atas selesainya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2020. Proses penyusunan telah melalui tahapan penyusunan yang berlangsung lancar, sehingga kami dapat menyampaikan LPPD Kota Bogor Tahun 2020 sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun, menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh substansi LPPD dan EKPPD Kota Bogor Tahun 2020 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Buku laporan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing adalah Bab Pendahuluan, Bab Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan terakhir Bab Penutup.

Pada keseluruhan bab tersebut diuraikan tentang kebijakan pembangunan Kota Bogor tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2020, pelaksanaan dan hasil dari upaya menangani 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum serta penanganan kegiatan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam laporan ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan pada upaya kami mengatasi begitu banyak permasalahan yang muncul di dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Namun demikian isi laporan ini



hendaknya dapat ditelaah dan dikaji secara mendalam serta dikritisi secara proporsional.

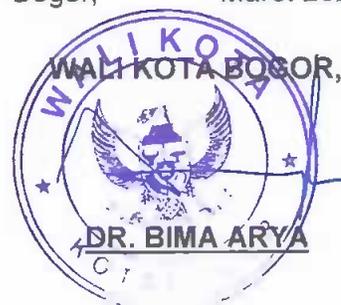
Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai azas otonomi daerah, serta untuk terus mendorong terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat warga Kota Bogor yang lebih baik.

Berbagai sukses dan capaian-capaian yang telah diraih sepanjang Tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang terbangun antara Pemerintah Kota Bogor dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, kepada semua pihak yang telah mengulurkan kerjasama kami ucapkan terimakasih dan kami sampaikan penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.

Akhirnya, kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kota Bogor Tahun 2020 kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu membimbing dan melindungi kami semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Wassalam

Bogor, Maret 2021



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-2
A. Undang Undang Pembentukan Daerah.....	I-2
B. Data Geografis Wilayah.....	I-5
C. Jumlah Penduduk.....	I-6
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.....	I-7
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	I-10
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...	I-17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-28
A. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	I-28
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-33
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I-33
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I-34
E. Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah..	I-71
1.1.3 Penerapan Standar Minimal.....	I-95
A. Latar Belakang.....	I-95
B. Dasar Hukum.....	I-97
C. Kebijakan Umum.....	I-98
D. Arah Kebijakan.....	I-99
E. Fokus Layanan.....	I-99

BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH.....	II-133
	2.1 Indikator Kinerja Makro.....	II-133
	A. Indeks Pembangunan Manusia.....	II-133
	B. Angka Kemiskinan.....	II-134
	C. Angka Pengangguran.....	II-136
	D. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-136
	E. Pendapatan Per-Kapita.....	II-141
	F. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini).....	II-142
	G. PDRB Per-Kapita (ADHB).....	II-143
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
	Pemerintahan.....	II-144
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-144
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-186
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	
	Pemerintahan.....	II-196
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	II-197
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN.....	III-285
	A. Tugas Pembantuan yang Diterima.....	III-285
	B. Tugas Pembantuan yang Diberikan.....	III-285
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
	PELAYANAN MINIMAL.....	III-287
	4.1 Bidang Urusan Pendidikan.....	III-287
	4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	III-290
	4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	
	Ruang.....	III-299
	4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	Pemukiman.....	III-303
	4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,	
	dan Perlindungan Masyarakat.....	III-306



4.6 Bidang Urusan Sosial.....	III-313
4.7 Program dan Kegiatan.....	III-325
BAB V PENUTUP.....	V-339



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor I-7
1.2	Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor I-8
1.3	Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2020 I-10
1.4	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2021 I-34
1.5	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 I-67
1.6	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga I-79
1.7	Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor Tahun 2015-2018 I-107
1.8	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Per Kecamatan Tahun 2017 I-101
1.9	Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017 I-102
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2015 – 2018 I-102
1.11	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Bogor Tahun 2015 - 2018 I-103
1.12	Angka Putus Sekolah di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018 I-104
1.13	Perkembangan Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018 I-105
1.14	Perkembangan Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah I-106
1.15	Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV I-109
1.16	Jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling di Kota Bogor Tahun 2017 I-115
1.17	Rasio Dokter Persatuan Penduduk I-118



1.18	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-122
1.19	Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2017	I-123
1.20	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018	I-124
1.21	Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2015-2018	I-124
1.22	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-125
1.23	Luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-126
1.24	Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-127
1.25	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-128
1.26	Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018	I-129
1.27	Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-129
1.28	Penyelesaian Penegakan PERDA di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-130
1.29	Penanganan Bencana di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-131
1.30	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Bogor Tahun 2015-2018	I-132
2.1	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2017 –2020	II-133
2.2	Pencapaian Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan Tahun 2016 s/d 2020	II-202
2.3	Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2017 s/d 2020	II-202
2.4	Rumah Tangga yang Dilayani Air minum yang Aman per Kecamatan	III-210
2.5	Total Luas Kawasan Kumuh Per Kecamatan Tahun 2020	II-213
2.6	Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Per Kecamatan Tahun 2020	II-213
2.7	Data Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar Tahun	



	2020	II-217
2.8	Indeks Kualitas Air	II-217
2.9	Hasil Perhitungan Passive Sampler Tahun 2020	II-221
2.10	Survey Internal Terhadap Integritas Organisasi Tahun 2019	II-243
2.11	Tingkat Kematangan Smart City	II-247
2.12	Hasil Capaian Per Bidang Level Kematangan Smart City	II-247
2.13	Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Indeks Ketahanan Keluarga dan Kecamatan	II-259
2.14	Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya	II-269
2.15	Pelayanan Angkutan Umum	II-271
2.16	Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020	II-276
2.17	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020	II-281
4.1	Data PMKS/PPKS Sasaran Garapan SPM Sosial Tahun 2019 – 2024	IV-314
4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020	IV-316
4.3	Realisasi SPM Tahun 2020	IV-316
4.4	Evaluasi Penerapan SPM sesuai PP 2 Tahun 2018	IV-322
4.5	Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD Kota Bogor	IV-323
4.6	Realisasi Pencapaian SPM Sumber Dana APBD Kota Bogor Tahun 2020	IV-338

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan laporan berkelanjutan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan, mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggitung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai berkembang. Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnovasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (*Botanical Garden*), beliau juga memperkerjakan seorang *planner* yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan *Buitenzoorg*.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada Tahun 1903, terbit undang-undang desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk *Staadsgemeente* diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No.204);
2. Gemeente Meester Cornelis (S. 1905 No.206);
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No.208);
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No.121);
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No.122);
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No.310)

(*Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748*)



Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah *Bestuursher Voorings Ordonantie* atau undang-undang perubahan Tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (*Staatsblad* 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1925 terbentuklah *Regentschaps Ordonantie* (*Ordonantie* Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi kabupaten (*Staatsblad* 1925 No. 79). Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (*Staatsblad* 1924 No. 378 *bij Propince West Java*) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 kabupaten (*Regentscape*) dan kotapraja (*Stads Gemeente*). *Buitenzoorg* (Bogor) menjadi salah satu *Stads Gemeente* di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (*Staatsblad* 1905 No. 208 jo. *Staatsblad* 1926 No. 368), dengan prinsip desentralisasi *modern*.

Pada masa setelah kemerdekaan yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI, Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. Dasar pertimbangan pengesahan undang-undang tersebut adalah untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Kota Bogor.

Selain memperhatikan undang-undang tentang pembentukan Kota Bogor, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bogor Tahun 2020 ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020;
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020.



B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Bogor berada pada posisi diantara 106 derajat 43'30"BT-106 derajat 51'00"BT dan 30'30" LS-6 derajat 41'00" LS, atau kurang lebih 60 Km ke arah Selatan ibukota Jakarta. Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dengan batas-batas:

- Sebelah Utara:
Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur :
Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Sebelah Barat:
Kecamatan Dramaga, Kecamatan Kemang dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Sebelah Selatan:
Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 m sampai dengan 350 m di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 Ha merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2%, seluas 891,27 Ha merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2-15%, seluas 109,89 Ha merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15-125%, seluas 764,96 Ha merupakan lahan curam dengan kemiringan 25-40%, dan lahan sangat curam seluas 119,94 Ha dengan kemiringan lebih dari 40%.

Berdasarkan hasil foto udara citra landsat, diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,9⁰C, dengan suhu terendah 18,8⁰C dan suhu tertinggi 36,1⁰ C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri koli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Jumlah Penduduk Tahun 2018 mencapai jumlah 1.029.084 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 234.156 atau 22,75% sedangkan untuk jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 102.158 atau 9,93% dari Total Jumlah Penduduk.



Tabel 1.1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan/Subdistricts	Luas/Area		Penduduk (Orang)/Population (Person)	
	Km2	%	Jumlah	%
Bogor Selatan	30,81	26,00	200.144	19,20
Bogor Timur	10,15	8,57	102.879	9,87
Bogor Utara	17,72	14,95	187.429	17,98
Bogor Tengah	8,13	6,89	105.388	10,11
Bogor Barat	32,85	27,72	236.777	22,72
Tanah Sareal	18,84	15,90	209.284	20,08
			1.041.901	

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan baik dengan melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan, baik urusan yang diurus langsung dalam tataran otonomi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta hasil partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, telah mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor. Hal ini tercermin antara lain dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2019 mencapai 76,23, meningkat 0,57 basis poin dari IPM yang dicapai pada tahun 2018 yang berada pada titik 75,66 atau peringkat 5 pencapaian IPM Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Barat.

D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Bogor mempunyai luas wilayah mencapai 118.50 km² atau hanya 0.27 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

Tabel 1.2
Daftar Kelurahan Se-Kota Bogor

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Bogor Selatan	Kelurahan Lawanggantung Kelurahan Batutulis Kelurahan Bondongan Kelurahan Empang



- Kelurahan Cikaret
- Kelurahan Pamoyanan
- Kelurahan Ranggamekar
- Kelurahan Mulyaharja
- Kelurahan Kertamaya
- Kelurahan Harjasari
- Kelurahan Muarasari
- Kelurahan Genteng
- Kelurahan Pakuan
- Kelurahan Cipaku
- Kelurahan Bojongkerta
- Kelurahan Rancamaya
- 2. Kecamatan Bogor Barat
 - Kelurahan Menteng
 - Kelurahan Semplak
 - Kelurahan Pasir Kuda
 - Kelurahan Gunung Batu
 - Kelurahan Sindang Barang
 - Kelurahan Bubulak
 - Kelurahan Marga Jaya
 - Kelurahan Balumbang Jaya
 - Kelurahan Situ Gede
 - Kelurahan Curug Mekar
 - Kelurahan Curug
 - Kelurahan Pasir jaya
 - Kelurahan Pasir Mulya
 - Kelurahan Loji
 - Kelurahan Cilendek Barat
 - Kelurahan Cilendek Timur
- 3. Kecamatan Tanah Sareal
 - Kelurahan Tanah Sareal
 - Kelurahan Kebon Pedes
 - Kelurahan Kedung Badak
 - Kelurahan Sukaesmi



-
- Kelurahan Kedung Waringin
 - Kelurahan Kedung Jaya
 - Kelurahan Sukadamai
 - Kelurahan Mekarwangi
 - Kelurahan Kencana
 - Kelurahan Kayumanis
 - Kelurahan Cibadak
 - 4. Kecamatan Bogor Tengah
 - Kelurahan Pabaton
 - Kelurahan Paledang
 - Kelurahan Babakan
 - Kelurahan Sempur
 - Kelurahan Tegallega
 - Kelurahan Babakan Pasar
 - Kelurahan Gudang
 - Kelurahan Panaragan
 - Kelurahan Kebon Kalapa
 - Kelurahan Cibogor
 - Kelurahan Ciwaringin
 - 5. Kecamatan Bogor Utara
 - Kelurahan Tegal Gundil
 - Kelurahan Bantarjati
 - Kelurahan Cibuluh
 - Kelurahan Kedung Halang
 - Kelurahan Ciparigi
 - Kelurahan Ciluar
 - Kelurahan Tanah Baru
 - Kelurahan Cimahpar
 - 6. Kecamatan Bogor Timur
 - Kelurahan Sukasari
 - Kelurahan Baranangsiang
 - Kelurahan Tajur
 - Kelurahan Katulampa
 - Kelurahan Sindangsari
 - Kelurahan Sindangrasa

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berikut kami sampaikan data yang dimaksud.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai Kota Bogor Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	a. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia b. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik c. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan d. Asisten Administrasi Umum Setda e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	187
2	Sekretariat DPRD	a. Kepala Bagian Umum b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Kehumasan c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan d. Bagian Perencanaan dan Keuangan	56
3	Inspektorat Daerah	g. Sekretaris Inspektorat Daerah h. Inspektur Pembantu I i. Inspektur Pembantu II j. Inspektur Pembantu III k. Inspektur Pembantu Khusus	50
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	l. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah m. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah n. Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia o. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	46



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
5	Dinas Pendidikan	p. Bidang Penelitian dan Pengembangan	2966
		a. Sekretaris Dinas Pendidikan	
		b. Bidang Sekolah Dasar	
		c. Bidang Sekolah Menengah Pertama	
		d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
6	Dinas Kesehatan	e. Bidang Sarana dan Prasarana	663
		a. Sekretaris Dinas Kesehatan	
		b. Bidang Kesehatan Masyarakat	
		c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		d. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
		e. Bidang Pelayanan Kesehatan	
7	Dinas Sosial	f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	40
		a. Sekretaris Dinas Sosial	
		b. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin	
		c. Bidang Rehabilitasi Sosial	
		d. Bidang Pemberdayaan Sosial	
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	e. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	82
		a. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
		c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
		d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan	
		e. Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan	
		f. Bidang Perikanan	
g. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu			
9	Dinas Lingkungan Hidup	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	319
		b. Bidang Tata Lingkungan	
		c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	d. Bidang Persampahan	47
		e. Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	
		a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
		b. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
		c. Bidang Teknologi Informasi	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	d. Bidang Layanan e Government	47
		e. Kepala Bidang Statistik Sektor	
		a. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		b. Bidang Promosi Penanaman Modal dan Sistem Informasi	
		c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal	
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	d. Bidang Izin Operasional	48
		e. Bidang Izin Pemanfaatan Ruang	
		a. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	
		b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	
		c. Bidang Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda	
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	d. Bidang Pembudayaan Olahraga	33
		e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		a. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		b. Bidang Kebudayaan	
		c. Bidang Kepariwisata	
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	d. Bidang Ekonomi Kreatif	57
		e. Bidang Kesenian	
		a. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		b. Bidang Perindustrian	
		c. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan	
		d. Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan	
e. Bidang Tertib Niaga			
		f. UPTD Metrologi Legal	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
15	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja b. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah d. Bidang Pengendalian dan Operasional e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 	282
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Bidang Formasi, Data dan Kepangkatan c. Bidang Mutasi, Disiplin dan Kesejahteraan d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 	53
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah b. Bidang Anggaran c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi d. Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah 	44
18	Badan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah b. Bidang Pendataan dan Pelayanan c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data d. Bidang Penagihan dan Pengendalian 	84
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan d. Kepala Bidang Kewas 	28



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
20	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang	a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan c. Bidang Sumber Daya Air d. Bidang Infrastruktur Pemukiman e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan f. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Perencanaan	116
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	a. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan b. Bidang Pengelolaan Kearsipan c. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan d. Bidang Perpustakaan	37
22	Dinas Tenaga Kerja	a. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja b. Bidang Pelatihan, Pemagangan dan Produktifitas c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja d. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan e. UPTD Balai Latihan Kerja	33
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil d. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	54
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan c. Bidang Keluarga Berencana d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	26
25	Dinas Perhubungan	a. Sekretaris Dinas Perhubungan b. Bidang Lalu Lintas	245



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		c. Bidang Angkutan	
		d. Bidang Sarana dan Prasarana	
		e. UPTD Terminal dan Angkutan	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36
		b. Bidang Koperasi	
		c. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		d. Bidang Pedagang Kaki Lima	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	33
		b. Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		c. Bidang Pemenuhan Hak Anak	
		d. Bidang Data, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
28	Dinas Perumahan dan Permukiman	a. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman	112
		b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		c. Bidang Pertamanan dan Dekorasi	
29	RSUD	a. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	60
		b. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis	
		Wakil Direktur Keuangan dan Umum	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Sekretariat	20
		b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		c. Seksi Kedaruratan dan Logistik	
		d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
31	Kecamatan Bogor Tengah	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Tengah	100
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Tengah	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Tengah	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Tengah	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Tengah	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		Masyarakat Bogor Tengah	
32	Kecamatan Bogor Selatan	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Selatan	139
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Selatan	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Selatan	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Selatan	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Selatan	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Selatan	
33	Kecamatan Bogor Barat	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Barat	146
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Barat	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Barat	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Barat	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Barat	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Barat	
34	Kecamatan Bogor Utara	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Utara	87
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Utara	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Utara	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Utara	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Utara	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Utara	
35	Kecamatan Bogor Timur	a. Sekretaris Kecamatan Bogor Timur	62
		b. Seksi Tata Pemerintahan Bogor Timur	
		c. Seksi Kemasyarakatan Bogor Timur	
		d. Seksi Perekonomian Bogor Timur	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Bogor Timur	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Bogor Timur	
36	Kecamatan Tanah Sareal	a. Sekretaris Kecamatan Tanah Sareal	106
		b. Seksi Tata Pemerintahan Tanah Sareal	



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pegawai
		c. Seksi Kemasyarakatan Tanah Sareal	
		d. Seksi Perekonomian Tanah Sareal	
		e. Seksi Pengendalian Pembangunan Tanah Sareal	
		f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tanah Sareal	

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan LKPJ Tahun 2020 ini, data yang digunakan belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

Realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.428.380.179.192,12 atau 102,77% dari target pendapatan sebesar Rp2.362.959.267.805,00. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.428.380.179.192,12 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp872.447.290.103,12 atau mencapai 117,65% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp741.531.123.201,00. Pendapatan sebesar Rp872.447.290.103,12 tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp509.039.468.746,00 atau 115,69% dari target sebesar Rp440.000.000.000,00. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp509.039.468.746,00 terdiri dari :

Pajak Hotel	49.653.637.165,00
Pajak Restoran	97.248.318.272,00
Pajak Hiburan	10.956.304.897,00

Pajak Reklame	8.859.838.240,00
Pajak Penerangan Jalan	51.337.188.280,00
Pajak Parkir	7.595.718.579,00
Pajak Air Tanah	3.001.590.202,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	125.549.058.024,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.837.815.087,00
Jumlah	509.039.468.746,00

- Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp35.010.375.259,00 atau 95,42% dari target sebesar Rp36.691.027.400,00. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp35.010.375.259,00 terdiri dari:

- Retribusi Jasa Umum sebesar Rp20.663.618.719,00 terdiri dari:

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	5.022.335.300,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.474.921.500,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	480.608.750,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.478.164.000,00
Retribusi PKB - Mobil Penumpang – Minibus	340.862.800,00
Retribusi PKB - Mobil Bus – Microbus	20.352.200,00
Retribusi PKB - Mobil Bus – Bus	18.372.000,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	711.542.400,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light	312.990.200,00



Truck	
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban – Truck	15.398.400,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	58.312.000,00
Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	190.250.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	34.253.119,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	172.467.550,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	332.788.500,00

Jumlah 20.663.618.719,00

- Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.161.537.656,00 terdiri dari :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.917.019.656,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	101.000.000,00
Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	15.636.000,00
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	130.175.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	42.400.000,00
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	102.889.500,00
Retribusi Pemeriksaan	506.467.500,00

Kesehatan Hewan Sesudah dipotong	
Retribusi Pelayanan Tempat	345.950.000,00
Rekreasi dan Olahraga	
Jumlah	3.161.537.656,00

- Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp11.185.218.884,00 terdiri dari :

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.445.661.384,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	260.087.500,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	479.470.000,00
Jumlah	11.185.218.884,00

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp31.927.293.792,00 atau 95,25% dari target sebesar Rp33.520.905.570,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp31.927.293.792,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yang terdiri dari:

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan	22.956.171.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten	4.394.288.802,00



Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.400.997.986,00
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Pasar Pakuan Jaya	175.836.004,00
Jumlah	31.927.293.792,00

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp296.470.152.306,12 atau 128,16% dari target sebesar Rp231.319.190.231,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp296.470.152.306,12 terdiri dari:

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	18.024.403,00
Penerimaan Jasa Giro	12.985.775.908,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	35.700.714,00
Pendapatan Denda Pajak	2.304.857.655,00
Pendapatan Denda Retribusi	47.679.107,00
Pendapatan dari Pengembalian	7.399.256.474,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	256.852.463,00
Pendapatan BLUD	217.721.338.520,12
Lain Lain PAD yang Sah Lainnya	8.856.852.543,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	40.454.298.600,00
Kontribusi Kebun Raya	383.960.000,00

Bogor	
Penerimaan Bunga atas	5.549.065.919,00
Penerusan Pinjaman	
Sewa Rusunawa	456.490.000,00
	<hr/>
Jumlah	296.470.152.306,12

- Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.415.498.666.396,00 atau 97,39% dari anggaran sebesar Rp1.453.476.644.604,00 yang terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Transfer untuk Pemerintah Kota Bogor adalah sebesar Rp1.086.295.148.560,00. Dengan realisasi Rp1.083.171.964.899,00 atau 99,71% dari target yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp86.344.563.026,00 atau 115,88% dari target sebesar Rp74.511.394.093,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari :

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.293.911.579,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	77.728.629.160,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.322.022.287,00
	<hr/>

Jumlah 86.344.563.026,00

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar



Rp38.670.158.675,00 atau 95,65% dari target sebesar Rp40.430.777.107,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh dari:

Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	63.513.996,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	788.276.289,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	5.198.363.984,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.779.508.956,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	27.216.795.079,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara – LRA	623.700.371,00

Jumlah 86.344.563.026,00

- Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp762.556.115.000,00 mencapai 99,16% dari target sebesar Rp769.048.963.000,00

- Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp195.601.128.198,00 atau 96,69% dari target sebesar Rp202.304.014.360,00 dengan rincian sebagai berikut:

DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	14.614.992.373,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	0,00
DAK Bidang Keluarga Berencana LRA	874.721.980,00
DAK Bidang Kesehatan – LRA	20.551.231.256,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LRA	13.836.300.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan – LRA	24.883.932,7
DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas – LRA	0,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB – LRA	903.584.000,00
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	
DAK Non Administrasi Kependudukan	116.543.523,00



LRA	3.048.792.874,00
DAK Non Fisik Administrasi Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00
Jumlah	195.601.128.198,00

- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan dana penyesuaian sebesar Rp28.928.586.000,00 atau sebesar 100% dari yang anggarkan sebesar Rp28.928.586.000,00

- Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp222.967.276.647,00 atau sebesar 87,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.593.262.838,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp222.967.276.647,00 terdiri dari:

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	85.421.443.230,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.269.330.320,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.941.448.144,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	118.193.400,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	49.216.861.553,00
Jumlah	222.967.276.647,00

- Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp



80.430.838.850,00 atau sebesar 97,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.659.647.206,00.

- Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 adalah sebesar Rp169.362.808.693,00 atau mencapai 86,02% dari target sebesar Rp196.880.086.000,00 Realisasi sebesar tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp140.434.222.693,00 atau 83,62% dari target Rp167.951.500.000,00 berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp46.360.332.693,00 dan Pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp94.073.890.000,00.

- Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2020 sebesar Rp28.928.586.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp28.928.586.000,00. Realisasi tersebut merupakan Dana Insentif Daerah yang terdiri dari Dana Insentif Daerah – Kelompok kategori Kesehatan Fiskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.928.586.000,00 dan Dana Insentif Daerah Tambahan – Penghargaan Lomba Inovasi Daerah sebesar Rp11.000.000.000,00.

- Realisasi belanja menurut jenis belanja

Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2020 adalah sebesar Rp2.354.242.105.574,20 atau 89,10% dari Anggaran Belanja tahun 2020 sebesar Rp2.642.163.029.058,19. Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Belanja sebesar Rp2.353.107.574.574,20 atau 89,10% dari target sebesar Rp2.641.028.498.058,19 dan Realisasi Transfer sebesar Rp1.134.531.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.134.531.000,00. Penghematan realisasi belanja dan transfer tahun 2020 terdapat pada semua pos belanja. Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 adalah sebesar

Rp1.950.673.113.615,00 atau 89,68% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.175.216.112.217,19. Realisasi sebesar Rp1.950.673.113.615,00 terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.010.111.841.189,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp 1.134.564.423.225,19. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.010.111.841.189,00 termasuk Belanja pegawai Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

Belanja Gaji dan Tunjangan	476.299.627.451,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	387.234.448.397,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.247.620.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21.940.471.029,00
Honorarium PNS	1.682.957.500,00
Honorarium Non PNS	6.150.374.618,00
Uang Lembur Pegawai BOS	1.141.104.000,00
Honorarium Pegawai BLUD	19.978.647.277,00
	78.436.590.917,00
Jumlah	1.010.111.841.189,00

- Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp796.728.528.842,00 atau 92,88% dari anggaran sebesar Rp857.841.087.805,00. Belanja Barang sebesar Rp796.728.528.842,00 terdiri dari:

Belanja Bahan Pakai Habis	52.674.696.293,00
Belanja Bahan/Material	27.107.965.851,00
Belanja Jasa Kantor	286.634.135.323,00
Belanja Premi Asuransi	71.514.766.672,00



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.315.106.224,00
Belanja Cetakan Penggandaan	9.330.383.568,00
Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	1.661.954.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.760.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.890.964.430,00
Belanja Makanan dan Minuman	20.837.248.470,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	858.391.980,00
Belanja Pakaian Kerja	2.393.180.550,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	690.872.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	55.984.454.891,00
Belanja Pemeliharaan	35.619.666.736,00
Belanja Jasa Konsultasi	11.848.589.861,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	3.339.859.529,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	185.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	3.978.593.200,00
Belanja Honorium Non Pegawai	7.479.604.480,00
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.152.635.000,00
Belanja Dana BOS	55.969.546.386,00

Belanja Barang dan jasa BLUD	115.580.403.398,00
Belanja Bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	80.410.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	500.340.000,00
Jumlah	796.728.528.842,00

- Bunga

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp5.427.749.091,00 atau 67,76% dari anggaran sebesar Rp8.010.000.000,00 adalah Belanja Bunga atas Dana Pinjaman dari International Bank For reconstruction and Development (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) sebesar Rp 5.119.005.404,00 dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank pada BLUD sebesar Rp308.743.687,00.

- Hibah

Realisasi Hibah sebesar Rp94.718.291.987,00 atau 72,69% dari anggaran sebesar Rp130.307.886.687,00.

- Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp43.686.702.506,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp44.492.714.500,00.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.



Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
 - b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 - c) Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;
 - d) Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e) Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
 - f) Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antar sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.
- 2) Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan

sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha

b) Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum

c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik

d) Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi

e) Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi

f) Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi



kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier

pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi

pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

- g) Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
 - i. belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - ii. besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
 - h) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi
Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
- 3) Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a) Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien
Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi;

- b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi;
- c) Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
- d) Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik. Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang beorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor



memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pematapan pemeriksaan kinerja.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi 2019-2024

“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga”

Misi 2019-2024

- 1) Mewujudkan Kota yang Sehat;
- 2) Mewujudkan Kota yang Cerdas;
- 3) Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

Program Unggulan Kota Bogor:

- 1) Pengembangan Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penguatan Spritualitas dan Nilai Budaya Untuk Keluarga Tangguh dan Masyarakat Madani;
- 3) Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Transparan dan Melayani.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka

pelaksanaan dan
penganggarannya diutamakan.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tabel 1.4
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bogor
Tahun 2020-2021

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
1.	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial Pendidikan Parenting
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Peningkatan Sarana dan Prasarana TK Apresiasi PAUD Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD
		WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Peningkatan Sarana dan Prasarana SD Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3 Peningkatan Manajemen Kurikulum SD Pengelolaan BOS Kota Penerimaan Siswa Didik Baru Online BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri Pengelolaan BOS APBN
			Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN
		PROGRAM MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN	Basiswa Mahasiswa Berprestasi Peningkatan Manajemen SD Peningkatan Kompetensi Siswa SD Peningkatan Manajemen SMP Peningkatan Manajemen SMP Peningkatan Manajemen PAUD Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM Optimalisasi pengelolaan aset Sarana Prasarana TK, SD dan SMP Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah Peningkatan Kompetensi PTK SD Peningkatan Prestasi PTK SD Peningkatan Kompetensi PTK SMP Peningkatan Prestasi PTK SMP Peningkatan Kompetensi PTK PAUD Peningkatan Kualifikasi PAUD Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlington) Pendidik PAUD
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			<p>Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingdung) Pendidik SD</p> <p>Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingdung) Pendidik SMP</p> <p>Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik SD</p> <p>Peningkatan Kompetensi PTK Kesetaraan</p> <p>Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlingdung) Pendidik Kesetaraan</p> <p>Apresiasi Kursus</p> <p>Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS</p> <p>Apresiasi Kesetaraan</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB</p> <p>Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web</p> <p>Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan Informal)</p> <p>Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar)</p> <p>Pengelolaan Rumah Tangga PD</p> <p>Pengadaan Inventaris Kantor</p> <p>Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor</p> <p>Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor</p> <p>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD</p> <p>Workshop Perencanaan</p> <p>Evaluasi Permohonan Hibah</p> <p>Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)</p> <p>Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>Penyediaan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)</p> <p>Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah</p> <p>Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</p> <p>Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas</p> <p>Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas (Banprov)</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas</p> <p>Akreditasi Fasilitas Kesehatan</p> <p>Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum)(DAK NON FISIK)</p> <p>Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta</p> <p>Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan</p>
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumput
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi
			Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja
			Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
			Pengembangan Kesehatan Lingkungan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyediaan fasilitas kesehatan perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) Pengadaan Obat-obatan Pengendalian Obat dan Makanan Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum) Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Pelaksanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar - Sub Pelayanan Dasar (Biaya Umum) (DAK FISIK) Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan Pengadaan Obat dan BHP Medis Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kota Bogor Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pengadaan Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK Pengadaan Prasarana dan Alat Kesehatan (Banprov) Revitalisasi Sarana dan Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan (Bantuan Keuangan Provinsi) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pengadaan sarana prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit-DAK Penyusunan FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1 Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 2 Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 3 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar,
		PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	
		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Drainase dan Jembatan Wilayah 1 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 2 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Penyusunan Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah II Perencanaan Teknis SDA Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1 Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2 Studi Kelayakan Pembangunan Kolam retensi Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 Naturalisasi DAS Ciliwung Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegal Gundil Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Dana Pendamping Kegiatan Air Minum Pengadaan Tangki Septik Individu Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Domestik Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik Dana Pendamping Kegiatan Air Limbah Domestik Persetujuan Substansi dan Pengesahan Perda RDTR dan PZ Kota Bogor Penyelenggaraan Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Penyelenggaraan Studio Tata Ruang dan Penyajian Info Grafis Tata Ruang Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1 Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar
		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI IRIGASI, SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		PROGRAM PEMBANGUNAN /PENINGKATAN JALAN, JEMBATAN, DRAINASE DAN PEDESTRIAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			dan Drainase wilayah 2 Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3 Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1 Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2 Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3 Reinventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2 FS Rencana Pembangunan Frontage R2 Update Desain Frontage R-2 terhadap Rencana LRT Amdal Frontage R-2 Penyelenggaraan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung
		PROGRAM PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Bogor Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Peningkatan Penataan, Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Penyusunan Peraturan Bidang Jasa Konstruksi
		PROGRAM PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi Bimbingan Teknis, Uji Kompetensi dan Sertifikasi Ahli Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan Sistem Informasi Ledger Jalan (Aset dan database)
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Pembangunan SIM Perencanaan Pembangunan SIM Pengawasan SIM aplikasi Integrasi SIM Infrastruktur Pembangunan Data Centre Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Tanah sereal) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Bogor Utara) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Timur) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah)
		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat) Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah)
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman Pengelolaan Rumah Tangga PD
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
		KEUANGAN	
		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Penunjang Kota Tanpa Kumuh Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata Pendukung RTLH Pendukung RLH Pembangunan Kampung Tematik Penanganan Kumuh Fasilitasi Lomba di Wilayah Perencanaan Teknis Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh Pembelian Lahan Untuk PSU Pengelolaan Rusunawa Pemasangan PJU Jalan Potokol dan Penghubung di Kota Bogor Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH
		PROGRAM PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN	Pemasangan Lampu Dekorasi Kota Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota Pembayaran Rekening PJU Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast
		PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Pembangunan Dekorasi Kota Pemeliharaan Dekorasi Kota Penataan Infrastruktur TPU Peningkatan Pelayanan Pemakaman Pengelolaan PSU Perumahan dan Perkotaan
		PROGRAM PENATAAN PRASARANA SARANA UMUM PERUMAHAN	Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
		PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Perbaikan Rumah dan PSU di lokasi bencana Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Pohon
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Perencanaan Teknis PJU Pintar
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja Penyediaan Anggota Bantuan Pemadam Kebakaran Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pembangunan Pos Damkar Pembangunan Gedung Sat.Pol.PP Pembangunan Control Room
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring Pembongkaran Bangunan Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS Penyidikan Trantibum BURAS (Buru Miras) Kawasan Tertib Kota Pembinaan Masyarakat Sadar Trantibum Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen Pengamanan dan Pengawalan VVIP/VIP Linmas Siaga Trantibum Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya serta Pelaksanaan HUT Satpol PP dan HUT Linmas SATPOL PP Ramah Anak Kampung Tertib Trantibum Sistem Pembinaan Anggota (SIPETA) Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran Pemasangan Hidrant Penyelamatan Kesiapan Petugas Penyelamatan Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar Pelaksanaan HUT Damkar BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran) Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan Inspeksi Proteksi Kebakaran Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana Hunian Sementara bagi Korban Bencana Pelayanan Penanggulangan Bencana Penyusunan Dokumen Kaji Kebutuhan Pasca Bencana Pendataan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi Aparatur Simulasi Kebencanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris
		PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	
		PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
		PROGRAM PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	
		PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	
7	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		PROGRAM PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN	
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Kantor
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi masyarakat
			Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
			Peningkatan pemahaman Bela Negara bagi masyarakat
		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
			Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
			Penguatan Kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (PKSD)
			Penguatan Kelembagaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat
			Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)
			Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA	Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar
			Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Pembinaan KUBE
			Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu)
			Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana
9	DINAS SOSIAL		Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai
		PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial
		PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar
			Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas
		PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	Pelayanan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking
			Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking
			Pemeliharaan TMP Dreded
			Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial
			Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor
			Peningkatan Kapasitas LK3
			Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelatihan Produktivitas
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Organisasi Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) Informasi pasar kerja Perluasan Kerja
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership) Uji Kompetensi Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Pelatihan Melalui Pemagangan Penempatan Transmigrasi
		PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penanganan daerah rawan pangan Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			(Demapan) Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Kota Bogor Optimalisasi Pengembangan Pangan Lokal di Kota Bogor Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Kawasan Mandiri Pangan Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Peningkatan Pelayanan Perbengkelan Pengadaan Gedung dan Bangunan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pelayanan Persampahan Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS Pelombaan Kebersihan Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah Peningkatan PAD Retribusi Persampahan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pengelolaan Sampah di TPA Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga Pengadaan Alat Berat Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga Pembangunan Sarana dan Prasarana SPA Pembayaran Retribusi dan Tipping fee TPS Nambo Perencanaan Teknis Penyiapan Pengelolaan Sampah ke TPA Nambo Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah dengan 3R Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3 Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I Pengawasan dan Penegakan Hukum
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Lingkungan Wilayah II Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Udara Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3 Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
		PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil Revitalisasi Ruang Pelayanan dan Pembangunan Aula Kantor
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelayanan dasar Administrasi kependudukan Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan Pelayanan Publik Akte Kelahiran Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian Pemutakhiran Data Penduduk Penyusunan Profil Penduduk Pengembangan Kerjasama Data dan Informasi Administrasi Kependudukan Indeks kepuasan masyarakat Inovasi Pelayanan Adminduk
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk)
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIAK, SITANDUK dan Blue Room Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan
			TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)
			Bulan bhakti gotong royong masyarakat
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
			Pembinaan PKK
			Evaluasi Perkembangan Kelurahan
			Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu
			Penyelenggaraan Kelembagaan Posyandu se-Kota Bogor
			Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Pemberdayaan UP2K PKK
			Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
			Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan TTG
			Pemberdayaan Ekonomi Syariah
		PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
			Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Sekolah Ibu
			Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perempuan
		PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Advokasi dan Fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG)
		PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak dan TPPO
		PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
			Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor
			Penyusunan Profil Anak Kota Bogor
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemutakhiran data profil Kelurahan
			Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)
			Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
			DED Gedung DPPKB
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Kesehatan Reproduksi Remaja
			Peningkatan Pengetahuan Remaja Terhadap Kesehatan Reproduksi
			Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
			Pelayanan KB
		KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan KB
			Penggerakan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB
			Penguatan dan Pengembangan Kampung KB
			Grand Design KKBPK
			Pendataan Keluarga
			Kemitraan KKBPK
		PEMBANGUNAN KELUARGA	Peningkatan Promosi Kesehatan 1000

15

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

PEMBANGUNAN KELUARGA



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
16	DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	HPK Bintek Tribina Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS Pengelolaan Rumah Tangga PD Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset PD Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Pembangunan Pos GATUR Pemeliharaan Pos GATUR Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking) Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang Operasional Pelayanan Angkutan Sekolah Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah di Kota Bogor Operasional Pelayanan Angkutan Wisata Evaluasi Kinerja Angkutan Wisata di Kota Bogor Evaluasi Jaringan Lintas dan Lokasi Bongkar Muat di Kota Bogor Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Barang Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Dukungan Operasional WASDAL GATUR Lalu Lintas Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Operasional Penyelenggaraan Terminal Operasional Forum LLAJ Uji Petik Pengawasan Pengendalian Angkutan Online Roda 2 (Dua) Pembangunan Pospam Terpadu Pemeliharaan Shelter Penyusunan Feasibility Studi Ruang publik Terpadu Ramah Anak (Taman Lalu Lintas) Pembangunan Shelter dan fasilitas lalu lintas Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalin Kawasan Rawan Kemacetan Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPUBKB Pembangunan Gedung UPUBKB dan Pengadaan Peralatan Uji Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan
		PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Integrasi moda Penyusunan Feasibility Study Lokasi Simpul/Stasiun/Terminal Terpadu dan Fasilitas Park and Ride Pengembangan LRT Jakarta-Cibubur-Bogor Studi Kelayakan dan Kebutuhan Pembangunan Shelter Angkutan Umum di Kota Bogor Revitalisasi Terminal Bubulak Pengadaan Angkutan Bus Sekolah Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Pengadaan dan Pegecatan Marka Jalan Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Median Jalan dan Pulau Lalu lintas Pemeliharaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) "Parking Meter" Pemeliharaan Gate Parkir Peningkatan dan Pemasangan APILL Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Pengadaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) "Parking Meter" Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Jalan mendukung RASS Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Pengumpan (Feeder) Pembinaan Badan Hukum Operator Angkutan Umum di Kota Bogor Subsidi Angkutan Umum Sosialisasi Jaringan Pelayanan (rerouting) Angkutan Umum Pemilihan Abiyasa Teladan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum Kajian Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan Perkotaan Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek Uji Petik Pengawasan & Pengendalian (WASDAL) Administrasi Kendaraan Angkutan Umum Rasionalisasi Supply Demand / Reduksi Angkutan Pengumpan (FEEDER) Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan Evaluasi Kinerja Badan Hukum Angkutan Umum Kajian Ability & Willingness to Pay Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Sepeda dan Tempat Parkir Sepeda Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeda Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Audit/Verifikasi Operasional Angkutan Umum Massal Restrukturisasi Koridor Angkutan Umum Massal
		PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	
		PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	
		PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
17		<p>PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</p> <p>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</p> <p>KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</p> <p>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <p>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <p>PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</p>	<p>Pengawasan Operasional Angkutan Umum Massal</p> <p>Pemeliharaan Sarana & Prasarana BITS (Bogor Intelligent Transport System)</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System)</p> <p>Kerjasama Media Massa (Surat kabar, Radio, Televisi)</p> <p>Pengadaan Media (sarana) Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan Transportasi</p> <p>Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>Pengembangan Data Base Angkutan Barang Secara Online</p> <p>Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Sosialisasi Sadar Tertib Berlalu lintas (Dartiblantasi) di Jalan</p> <p>penyelenggaraan Safety Riding Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan</p> <p>Sosialisasi DARTIBLANTAS tentang Kegunaan Perlengkapan Jalan dan Cara berlalu lintas kepada TK/PAUD</p> <p>Pengembangan Sarana E-KIR</p> <p>Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek (Barang, Becak, Delman, dan Online)</p> <p>Bimbingan teknis pengemudi angkutan umum</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM PKB dan PPNS</p> <p>Bimbingan Teknis Petugas Operasional (WASDALGATUR) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>Pemilihan Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas</p> <p>Pengelolaan Rumah Tangga PD</p> <p>Pengadaan Inventaris Kantor</p> <p>Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor</p> <p>Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD</p> <p>Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor</p> <p>Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota</p> <p>Pemeliharaan Wifi Ruang Publik</p> <p>Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room (Command Center), Server Data dan Aplikasi</p> <p>Digitalisasi Profil dan Pengembangan/Promosi Ekosistem EGovernment dan Smart City</p> <p>Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia</p> <p>Pembangunan Wifi ruang public</p> <p>Pendataan, Verifikasi, Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE</p> <p>Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan</p>



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Sistem Elektronik Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server Pengelolaan Data Recovery Center (DRC) Pemeliharaan CCTV Kota Bogor Pengadaan CCTV Kota Bogor Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) Banprov 2020 Pengelolaan Bandwith Pengembangan datawarehouse dan Sistem Informasi Kota (SIMATA) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Implementasi Aplikasi Teknologi Informatika Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah Satu Data Statistik Sektoral Penyajian Statistik Sektoral Pengelolaan Statistik Sektoral Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pelatihan Start UP dan Network Digitalisasi Pendampingan Manajemen dan Jaringan Usaha Koperasi Temu Bisnis Koperasi dan Konsorsium Koperasi Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Konvensional dan Syariah Coaching Clinic Koperasi Fasilitasi Badan Hukum Koperasi Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Rapat Kerja Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Pengembangan dan Pemeliharaan SIM OPD SOLUSI (Sistem Operasional dan Layanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi) Kelas Inspirasi Kompetisi Rencana Usaha
		PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	
		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	
		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	
		PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan			
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Pelatihan Peningkatan Kompetensi UMKM			
			Peningkatan Kualitas dan Nilai Jual Produk UMKM			
			Promosi Produk UMKM			
			Teknologi Terapan Untuk UMKM			
			Expo Permodalan UMKM			
			Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM			
			Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL			
			Penyusunan Feasibility Study (FS) PKL Zona			
			Sosialisasi Regulasi PKL non Zona			
			Pelatihan Peningkatan Kompetensi PKL			
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemeliharaan Zona PKL			
			Penataan dan Relokasi PKL			
			Penyusunan Feasibility Study (FS)			
			Pengelolaan Rumah Tangga PD			
			Pengadaan Inventaris Kantor			
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			
			Promosi Investasi			
			Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor			
			Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)			
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL	Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal			
			Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal			
			Mall Pelayanan Publik			
			Perizinan Dalam Angka			
			Resertifikasi/Surveillance ISO 9001			
			Resertifikasi/Surveillance ISO 27001			
			Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal			
			Pengelolaan Rumah Tangga PD			
			Pengadaan Inventaris Kantor			
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			
			Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat, Layanan Khusus dan Olahraga Tradisional			
			Pengukuran Angka Partisipasi dan Angka Kebugaran Masyarakat Olahraga			
			Peningkatan SDM Keolahragaan			
			Kepeloporan Pemuda			
			Diklat dan Seleksi Paskibra			
			Kreativitas Kepemudaan			
			Jambore Kepemudaan			
			Peningkatan wawasan Kepemudaan			
			Peningkatan Peran serta Pemuda Pramuka			
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga			
			Peningkatan sarana Kreativitas Pemuda			
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga			
			Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya			
			Penyusunan Kajian Sarana Prasarana			
			20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
						Peningkatan sarana Kreativitas Pemuda
						Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
						Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya
						Penyusunan Kajian Sarana Prasarana



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PENINGKATAN OLAHRAGA PRESTASI	Kawasan Olahraga di Kota Bogor Event Olahraga Pelajar dan Santri Seleksi Atlit Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan Menengah POR PEMDA
		PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Pemberian Penghargaan Insan Olahraga Yang Berprestasi Pemeliharaan Website Pembangunan Aplikasi Ekonomi kreatif Pelatihan/ Workshop/ Rakor Ekonomi Kreatif
		PENINGKATAN KREATIFITAS DAN DAYA SAING EKONOMI KREATIF	Penyusunan database ekonomi kreatif Gebyar Ekonomi Kreatif Pengadaan sarana gedung creative center Pameran Ekonomi Kreatif Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pelestarian Seni Tradisi Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda Bantuan Peralatan Kesenian Pagelaran, Workshop Pengembangan SDM dan Kelembagaan Seni Festival/ Lomba Seni
		PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Helaran seni budaya dan Mobil hias dalam rangka HJB Pelestarian Nilai Sejarah Budaya dan Tradisional Penyusunan Buku 300 karakter wayang Revitalisasi Museum Penataan Situs Cagar Budaya Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesenian
		PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Kemitraan Kompepar Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata Promosi Pariwisata Bahan Promosi Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah Event Pariwisata Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan Anugerah bagi pelaku usaha kepariwisataan
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
		PENINGKATAN SADAR TERTIB ARSIP	Pengelolaan dan Workshop Aplikasi



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Kearsipan Pemeliharaan Arsip Dinamis, Arsip Vital, Arsip Terjaga, dan Alih Media Penyusunan/penyempurnaan NSPK Kearsipan Edukasi Sadar Tertib Arsip kepada Eselon III, dan IV Pembinaan dan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal Penataan Arsip Tidak Teratur pada PD/Unit Kerja yang belum dientry ke dalam aplikasi kearsipan Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis Preservasi, Akses Arsip Statis dan Layanan Pengguna Arsip Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling Workshop Aplikasi Perpustakaan Wisata Pustaka Loka Edukasi, Promosi, Layanan Pemustaka dan Sirkulasi Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan Pembinaan dan Kerjasama dengan Mitra Perpustakaan, Bedah Buku, Story Telling, dan Lomba Perpustakaan Penyediaan Bahan Pustaka Revitalisasi gedung Eks DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kota Bogor Pelestarian Bahan Perpustakaan Pembinaan Pelayanan Publik
		PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH	
		PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	
		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN ZONOSIS DAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI SESUAI DENGAN KRITERIA AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL	
23	DINAS PERTANIAN		Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH) Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan Penyuluhan Pertanian Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan Produksi Peternakan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Renovasi UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu Kota Bogor Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Pengembangan Produk Hasil Perikanan
		PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	
		PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	
		PENINGKATAN KONSUMSI PRODUK PERIKANAN	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
		PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) Peningkatan daya saing produk IKM Pemberdayaan Rumah Kemasan Kiat Membuka Usaha Baru (WUB) Penerapan Sertifikasi Industri Peningkatan Produktivitas IKM
		PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Penerapan dan pengembangan teknologi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan Tertib Niaga di Bidang Perdagangan Pengendalian /Pengawasan BDKT pada IKM
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Kajian potensi data pengguna UTTP layanan kesehatan Pembangunan / Revitalisasi Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) dan Perengkapannya Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN) Penyusunan data base jasa bidang perdagangan Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya Operasi Pasar Murah KEPOKMAS Kajian Pembuatan Raperda Pasar Rakyat Pembuatan Aplikasi E-Pasar Coacing Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM
		PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Master Plan/DED Pasar Rakyat Kajian Penentuan Harga Operasi Pasar Murah (OPM) Pengembangan Pelaku Usaha TPMSE/ECommerce di Kota Bogor Pengelolaan Gudang dan Distribusi Promosi Produk Kota Bogor ke Pasar Dalam Negeri Peningkatan Kemitraan Perdagangan antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pelaku Usaha Besar dan Menengah Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Promosi Produk Berorientasi Ekspor Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM di Bidang Ekspor Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Peningkatan Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Lainnya
25	SEKRETARIAT DAERAH	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Pembinaan Lembaga Keagamaan Kegerejawian Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW, dan RT), dan juga unsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan) Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Bidang Keagamaan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan Penyelenggaraan Verifikasi dan Distribusi Proposal Hbah/Bansos Penyebarluasan Informasi Publik Pengelolaan Media Publikasi Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan Pengelolaan Data Kehumasan Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi Pengendalian dan Evaluasi Sarana Pembiayaan Pengembangan Usaha Daerah Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Pelayanan Kerumahtanggaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH DED Pembangunan Gedung Balaikota Bogor dan sekitarnya Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Daerah (lanjutan) Review DED Pembangunan Lift Sekretariat Daerah Evaluasi Permohonan Hibah Penyusunan LPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Penyusunan serta Penyampaian LKPJ Walikota Tahunan Peningkatan Kinerja BUMD Kota Bogor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah Pelayanan Administrasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Keikutsertaan dalam APEKSI Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor
		KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	
		PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
		PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat
			Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
			Penyusunan serta Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
		PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penyusunan Produk Hukum Daerah Evaluasi Produk Hukum Daerah
		PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HAM	Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi
		KERJASAMA PEMBANGUNAN	Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum
			Penyuluhan Hukum dan RANHAM
			Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri
		PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Pembinaan Administrasi Pembangunan
			Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
			Penyusunan Standar Biaya
		PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan
		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
			Pembinaan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI	Penguatan Kelembagaan
			Penyusunan Standarisasi Kerja
			Pembinaan Pelayanan Publik
		FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)
		PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA	Penguatan Kelembagaan UKPBJ Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa
			Penyelenggaraan Eprocurement
			Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan
		PERTANAHAN	Penataan Batas Wilayah dan Toponimi
			Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan
		KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Implementasi Jaringan Informasi dan Aspirasi DPRD
			Pendukung Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD
		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Pendukung Pelaksanaan Rapat/ Sidang



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Paripurna Fasilitasi Reses Sosialisasi Peraturan Daerah Pendukung Kunjungan Kerja DPRD Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Fasilitasi pembahasan Raperda dan rapat-rapat Bapemperda Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Keikutsertaan dalam APEKSI Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegal Gundil Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantarjati Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibuluh Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Halang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciluar Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Baru Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahpar Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
27	KECAMATAN BOGOR UTARA	PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
28	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi
			Pengelolaan Rumah Tangga PD
			Pengadaan Inventaris Kantor
			Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
			Perencanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan
			Persiapan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan
			Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan
			Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja
PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			di Kelurahan Batutulis
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bondongan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikaret
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipaku
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Empang
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Genteng
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harjasari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kertamaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawanggantung
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muarasari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyaharja
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranggamekar
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
29	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN	Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016 Kecamatan Bogor Timur Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
		PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baranangsiang
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangrasa
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindangsari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukasari
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji
30	KECAMATAN BOGOR BARAT	PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Marga Jaya
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loji
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Marga Jaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menteng
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semplak
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang barang
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situgede
31	KECAMATAN BOGOR	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Pengelolaan Rumah Tangga PD



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
	TENGAH	PERKANTORAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Lega Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paledang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragan
		PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempur
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegallega
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
			Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
			Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya
		PENINGKATAN PELAYANAN PATEN	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat
32	KECAMATAN TANAH SAREAL		



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			di Kelurahan Sukaesmi
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
33	INSPEKTORAT	PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI	Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor
		PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penerapan SPIP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB
		PERENCANAAN TATA RUANG	Peningkatan Kapabilitas APIP Pengawasan internal secara berkala Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT
		KERJASAMA PEMBANGUNAN	Perencanaan Tata Ruang Pengembangan Informasi Geospasial Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
		PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengelolaan Rumah Tangga PD Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
		PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur Perencanaan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman
		PENELITIAN PENGEMBANGAN	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	Kajian Lingkup Bidang Ekonomi Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya Kajian Lingkup Bidang Pembangunan
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Pengelolaan Rumah Tangga PD



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
	DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Penelitian RKA dan DPA OPD Penelitian RKAP dan DPPA OPD Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD Pengadministrasian Belanja Langsung Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP Pembinaan perencanaan anggaran perangkat daerah Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemetaan BMD Pengadministrasian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan BMD Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD Pembangunan Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor Pembangunan Gedung Kantor BPKAD Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
36	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pembangunan Gedung Pelayanan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah Rekonsiliasi Pajak Daerah
		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemeliharaan Basis Data PBB Penyusunan Zona Nilai Tanah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak



No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
			Daerah
			Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
			Analisa dan Evaluasi
			Penataan Panggung Reklame
			Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
			Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah
			Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem
			Penyebaran SPPT PBB P2
			Penindakan Pajak Daerah
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pengelolaan Rumah Tangga PD
			Pengadaan Inventaris Kantor
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
			Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian
		PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Diklat Teknis dan Fungsional
			Pengembangan Kompetensi ASN
			Diklat Dasar dan Kepemimpinan ASN
			Penyebarluasan dan Publikasi
			Pengelolaan Data dan Informasi
			Pengembangan Karir Jabatan
			Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
			Kepangkatan dan Pensiun
			Penatausahaan dan Pelayanan
			Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Peringatan HUT KORPRI
			Penataan Arsip Kepegawaian
			Pengelolaan Kepegawaian Umum
			Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN
			Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin ASN
			Evaluasi di Bidang Manajemen Kepegawaian
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		



Tabel 1.5
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	<i>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) program</i>	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Lingkungan sehat perumahan Program Peningkatan utilitas perkotaan Program Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan Pengelolaan Areal Pemakaman Program pemulihan pasca bencana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Program Peningkatan Pengelolaan <u>Sampah Berbasis 3R</u> Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Program Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat		
Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman		
Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Program kemitraan lingkungan hidup Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan
Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan		Program pengelolaan ruang terbuka hijau Pengelolaan Areal Pemakaman Program peningkatan pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program manajemen layanan pendidikan
Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program pendidikan non formal Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pendidikan politik masyarakat Program pengembangan wawasan kebangsaan Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Peningkatan Olah Raga Prestasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Meningkatnya kualitas generasi muda		
Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat		



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Menurunnya tingkat Kemiskinan		Kelurahan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Perluasan Kesempatan Kerja
Menurunnya tingkat pengangguran		Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga		Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Program Pembangunan Keluarga
Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi		Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	2. Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi local yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program	Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Program Peningkatan pelayanan angkutan umum
Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan daya saing penanaman modal Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal Program Peningkatan Produksi Perikanan Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan data dan Informasi
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		Program Peningkatan kualitas pelayanan public
		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		Program perencanaan pembangunan daerah
		Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		Program Kerjasama Pembangunan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
		Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Program Penerapan Reformasi Birokrasi
		Program Pengendalian pembangunan
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
		Program Penataan Perundang-undangan
		Program Kerjasama informasi dengan media massa
		Program Penegakan Hukum dan



Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Judul Program
		Penerapan HAM
		Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
		Program Pengembangan Data dan Informasi
		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah
		Program Peningkatan Pelayanan PATEN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)

E. Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Perencanaan Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan tolok ukur penilaian kinerja suatu pemerintahan, baik rencana strategis untuk lima tahunan maupun rencana kerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang akan diimplementasikan secara bertahap selama lima tahun sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan.

Makna **Kota Bogor** meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Makna **Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya;
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Visi 2019-2024:

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”.

Misi:

- 1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat;**
- 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas;**
- 3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera;**

Visi dan Misi tersebut di atas merupakan dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota Bogor sampai dengan tahun 2024. Sesuai RPJMD 2019-2024 terdapat 11 tujuan, 18 sasaran, serta 31 indikator sasaran.

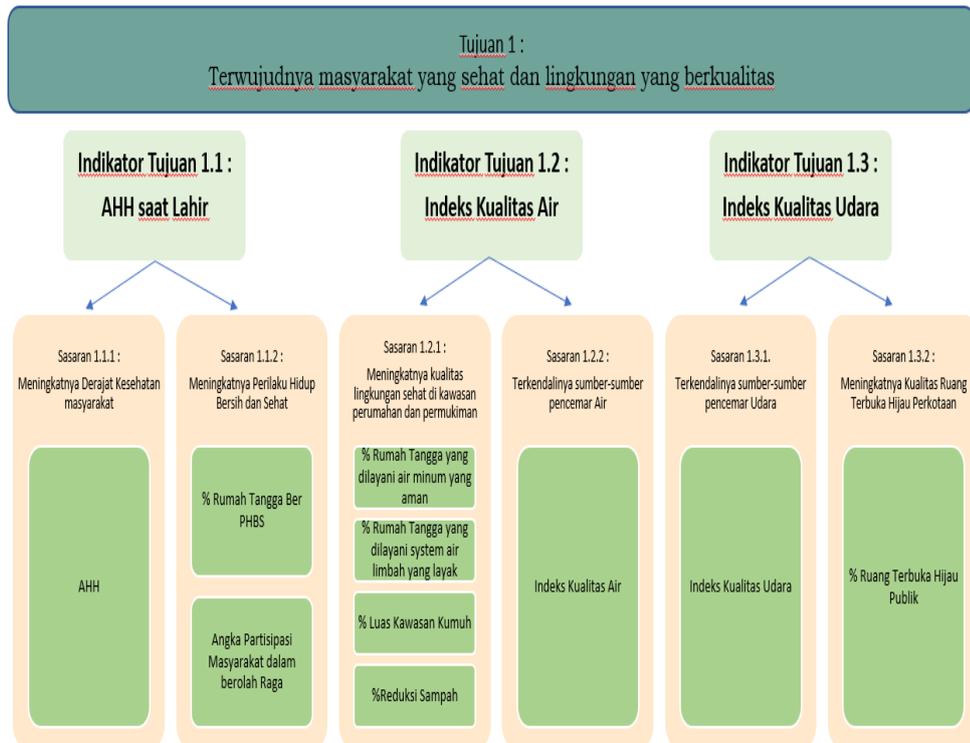
Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT



Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

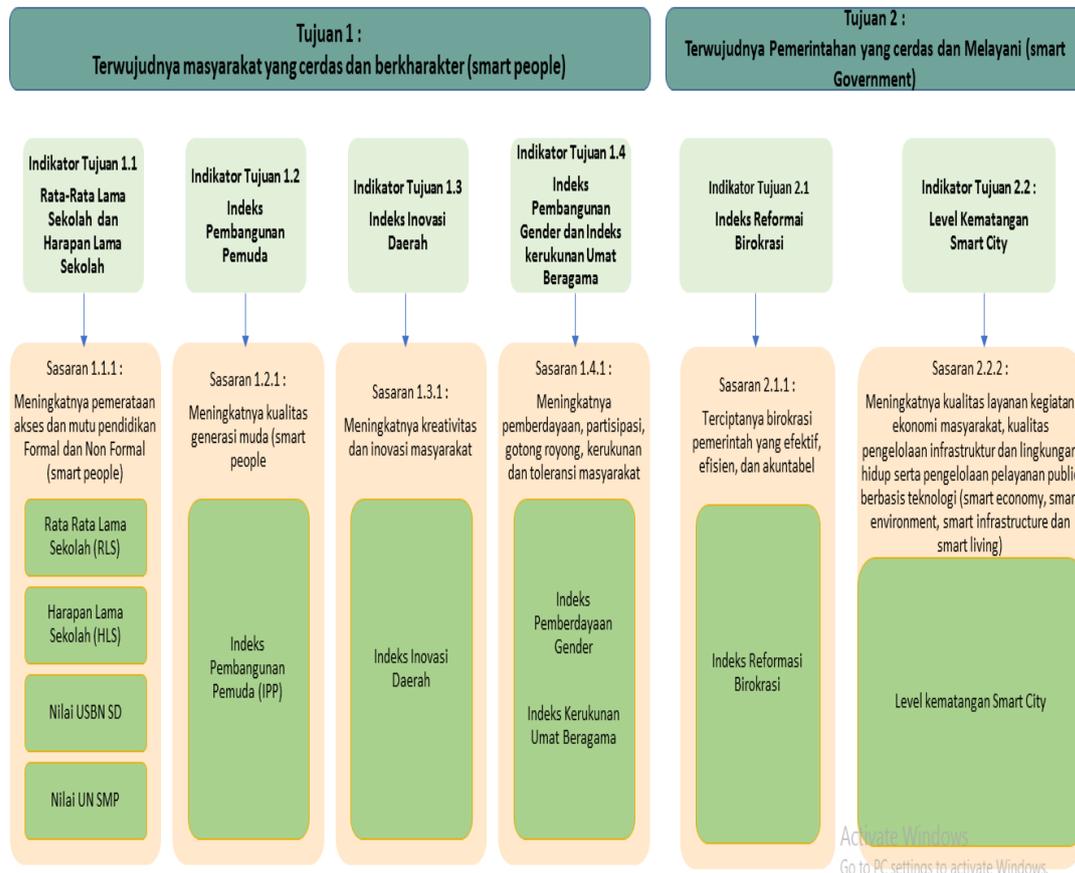
B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.
5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.
6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas



Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan

Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.

2. Meningkatnya kualitas generasi muda;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.

4. Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan umat beragama.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

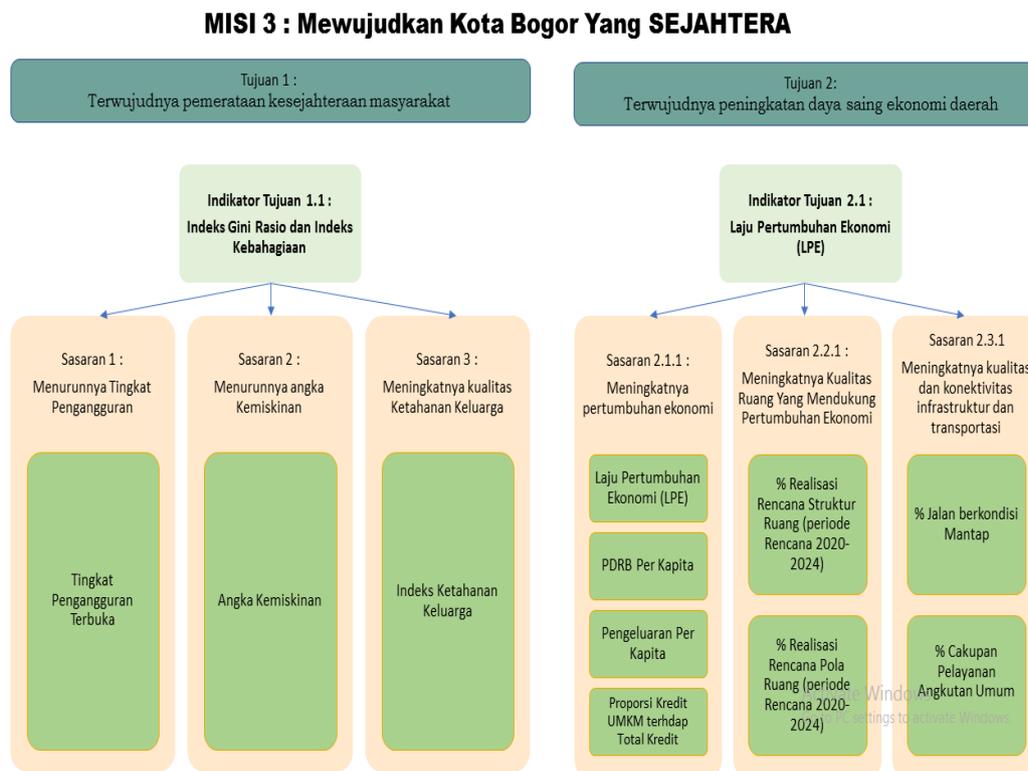
1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan *Smart City*.

Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024



Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.
2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.
3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.



Tabel 1.6
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT	Tujuan 1.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.40	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
				Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
				Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	86	86	86,5	86,5	87	87
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.40	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	67	68	69	70	71	72	72
Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Point			0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53		
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91.98	85	93.15	94.86	96.58	98.29	100	100



No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	%	67.21	63	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03	73.03
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota	%	2,62	1.43	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77	1,77
				Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.3	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.2
		Sasaran 1.1.4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.65	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
		Sasaran 1.1.5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.87	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5.89	5.90	5.91	5.92	5.94	5.95	5.96	5.96
2	Mewujudkan masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People),	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.40	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.50	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
				Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
				Indeks Pemberdayaan	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5



No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Gender									
				Indeks Kerukunan umat beragama	Indeks	NA	70	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
		Sasaran 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.40	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.50	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.13	76,02	76,04	76,06	76,08	76,10	76,10
				Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.29	67,77	67,79	67,81	67,83	67,85	67,85
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi)	Point	600	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	NA	70	70.5	71	71.5	72	72.5	72.5
		Tujuan2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A



No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			dan melayani (Smart government),										
				Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart
		Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	B	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Smart
3	Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA	Tujuan3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.40	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36
				Indeks Kebahagiaan	Angka	NA	NA	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	74-75



No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	9.0	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	7.6
		Sasaran 3.1.2	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.85	5.8	5.78	5.53	5.28	5	5
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Point	NA	NA	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	76-77
		Tujuan3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
		Sasaran3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.14	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
				PDRB Per Kapita	Dalam Juta Rp.	37.99	39	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84	49.84
				Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	10.940	11.000	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504	11.504
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19.68	20	21	22	23	24	25	25
		Sasaran3.2.2	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	10	20	40	60	80	100	100
				Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	10	20	40	60	80	100	100



No	Misi	No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target						Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran3.2.3	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	89	89	89,25	89,5	89,75	90	90
				Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	47.5	50	60	70	80	90	90



Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja tingkat Kota Bogor tahun 2020 telah ditandatangani oleh Wali Kota Bogor pada awal tahun setelah DPA ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, namun adanya penyesuaian target sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 dan mempertimbangkan hasil dari *refocusing* dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan pandemi covid-19, maka disusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja Perangkat Daerah. Kinerja pada level Kota berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2020 (RKPD Tahun 2020)	Perubahan Target Tahun 2020 (RKPD Perubahan Tahun 2020)
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73,69	73,69
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	68	68
		2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	0,45	0,45
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1	% Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman	86,34	93,15
		2	% Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	63,85	67,47
		3	% Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	1,37	2,44
		4	% Reduksi Sampah	6,4	6,4
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	1	Indeks kualitas air	49,67	49,67
5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1	Indeks Kualitas Udara	85,9	85,9
6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	% Luas ruang terbuka hijau publik	5,91	5,91

Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2020 (RKPD Tahun 2020)	Perubahan Target Tahun 2020 (RKPD Perubahan Tahun 2020)
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal	1	Rata-rata lama sekolah	10,63	10,63
		2	Harapan lama sekolah	13,6	13,6
		3	Nilai rata-rata USBN SD	68,14	-
		4	Nilai rata-rata UN	58,3	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2020 (RKPD Tahun 2020)	Perubahan Target Tahun 2020 (RKPD Perubahan Tahun 2020)
			SMP		
2	Meningkatnya kualitas generasi muda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,31	-
3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	600-610	600-610
4	Meningkatnya pemberdayaan,	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,5	69,5
	partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-
5	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BB	BB
6	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart city)	1	Level kematangan smart city	Initiative	Initiative

Misi III : Menjadikan Bogor Kota yang Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Awal Tahun 2020 (RKPD Tahun 2020)	Perubahan Target Tahun 2020 (RKPD Perubahan Tahun 2020)
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	8,47	11,47
2	Menurunnya angka kemiskinan	1	Angka kemiskinan	5,8	7,22
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	73-74	73-74
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,66	3,5
		2	PDRB Per Kapita	40,36	40,36
		3	Pengeluaran per kapita	11.124	11.124
		4	Proporsi kredit UMKM	-	20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal Tahun 2020 (RKPD Tahun 2020)	Perubahan Target Tahun 2020 (RKPD Perubahan Tahun 2020)
			terhadap total kredit	
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	% realisasi rencana struktur ruang (periode rencana 2020-2024)	20
		2	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	20
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	% Jalan berkondisi baik	89
		2	% cakupan pelayanan angkutan umum	50

Program

Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 196.316.212.599,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 60.723.443.943,00
3. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 21.936.876.326,00
4. Pengembangan Data dan Informasi Rp. 1.368.874.100,00
5. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 204.660.000,00
6. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 142.992.088.468,00
7. Manajemen Layanan Pendidikan Rp. 1.033.928.600,00
8. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 6.127.765.000,00
9. Pendidikan NonFormal Rp. 489.257.000,00
10. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp. 14.435.823.900,00
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 134.201.464.218,00
12. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 176.834.133.870,19



Program	Anggaran
13. Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	Rp. 6.690.974.000,00
14. Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp. 79.856.877.306,00
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rp. 292.362.550,00
16. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 19.149.636.650,00
17. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rp. 10.584.744.610,00
18. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Rp. 9.982.000.000,00
19. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp. 91.500.000,00
20. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 28.612.712.000,00
21. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp. 17.073.059.420,00
22. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 4.058.546.200,00
23. Perencanaan Tata Ruang	Rp. 884.000.000,00
24. Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	Rp. 38.323.417.950,00
25. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 6.399.549.900,00
26. Pemulihan Pasca Bencana	Rp. 89.856.000,00
27. Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 45.320.976.000,00
28. Peningkatan Utilitas Perkotaan	Rp. 51.931.077.650,00



Program	Anggaran
29. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp. 2.534.803.350,00
30. Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	Rp. 3.516.965.000,00
31. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 690.722.750,00
32. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 983.195.500,00
33. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 11.331.000,00
34. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 741.818.000,00
35. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 697.909.000,00
36. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 196.366.400,00
37. Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Rp. 628.631.600,00
38. Pemberdayaan Lembaga Sosial	Rp. 6.891.913.400,00
39. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Rp. 151.968.800,00
40. Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 23.464.800,00
41. Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp. 74.934.800,00
42. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 109.613.800,00
43. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 55.085.000,00
44. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 61.756.000,00



Program	Anggaran
45. Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 690.872.700,00
46. Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 467.196.600,00
47. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 11.649.111.500,00
48. Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Rp. 18.647.538.500,00
49. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Rp. 643.190.000,00
50. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 554.942.000,00
51. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 46.988.000,00
52. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 77.020.000,00
53. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 123.940.000,00
54. Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 3.322.005.000,00
55. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 428.262.760,00
56. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Rp. 469.239.000,00
57. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 139.763.000,00
58. Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 125.177.000,00
59. Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp. 3.780.143.200,00
60. Pembangunan Keluarga	Rp. 277.099.800,00



Program	Anggaran
61. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Rp. 3.029.780.100,00
62. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rp. 2.197.520.000,00
63. Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 272.627.000,00
64. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	Rp. 29.044.800,00
65. Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Rp. 3.766.817.646,00
66. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 236.901.236,00
67. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 1.558.169.000,00
68. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Rp. 727.394.000,00
69. Peningkatan Kreatifitas dan Daya Saing Ekonomi Kreatif	Rp. 808.104.000,00
70. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 437.111.307,00
71. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp. 3.256.726.063,00
72. Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp. 2.676.774.550,00
73. Peningkatan Olahraga Prestasi	Rp. 386.416.000,00
74. Pengelola Keragaman Budaya	Rp. 2.040.844.000,00
75. Peningkatan Sadar Tertib Arsip	Rp. 53.870.000,00
76. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Rp. 23.650.000,00



Program	Anggaran
77. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 99.495.000,00
78. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Rp. 169.957.000,00
79. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 150.478.000,00
80. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 10.706.000,00
81. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rp. 562.022.000,00
82. Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Rp. 76.552.000,00
83. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	Rp. 161.950.578,00
84. Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 362.594.000,00
85. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 9.692.073.000,00
86. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Rp. 159.810.400,00
87. Peningkatan Produksi Pertanian	Rp. 1.995.472.300,00
88. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 1.054.022.700,00
89. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp. 430.400.000,00



Program	Anggaran
90. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 457.155.000,00
91. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 3.639.161.300,00
92. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp. 28.085.000,00
93. Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Rp. 648.219.200,00
94. Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	Rp. 15.326.000,00
95. Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 86.192.000,00
96. Penataan Perundang-undangan	Rp. 483.295.000,00
97. Penegakan Hukum dan Penerapan HAM	Rp. 463.465.000,00
98. Kerjasama Pembangunan	Rp. 299.238.282,00
99. Pengendalian Pembangunan	Rp. 632.539.992,00
100. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.944.813.405,00
101. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 7.881.875.000,00
102. Penerapan Reformasi Birokrasi	Rp. 312.127.200,00
103. Peningkatan Pelayanan PATEN	Rp. 70.878.190.000,00
104. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 469.418.000,00
105. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 829.221.000,00
106. Penelitian dan Pengembangan	Rp. 583.178.400,00



Program	Anggaran
107. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 235.926.300,00
108. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 46.144.000,00
109. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Rp. 1.000.000,00
110. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 2.370.000,00
111. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 2.979.422.350,00
112. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Rp. 3.623.119.000,00
113. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.201.712.800,00
114. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 1.953.750.000,00

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan keikhlasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang



prima, maka Pemerintah Kota Bogor menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan



efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bogor menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB DASAR

1) PENDIDIKAN

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi

serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari Tabel 2.30 dapat dilihat bahwa angka pendidikan anak usia dini di Kota Bogor terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2015 sebesar 31,10%. Persentasenya terus naik di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebesar 37,69% dan 41,42%. Sedangkan di tahun 2018 turun menjadi 38,51%.

Tabel 1.7
Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor
Tahun 2015-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	31,10	37,69	41,42	38,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor

➤ **ANGKA PARTISIPASI KASAR**

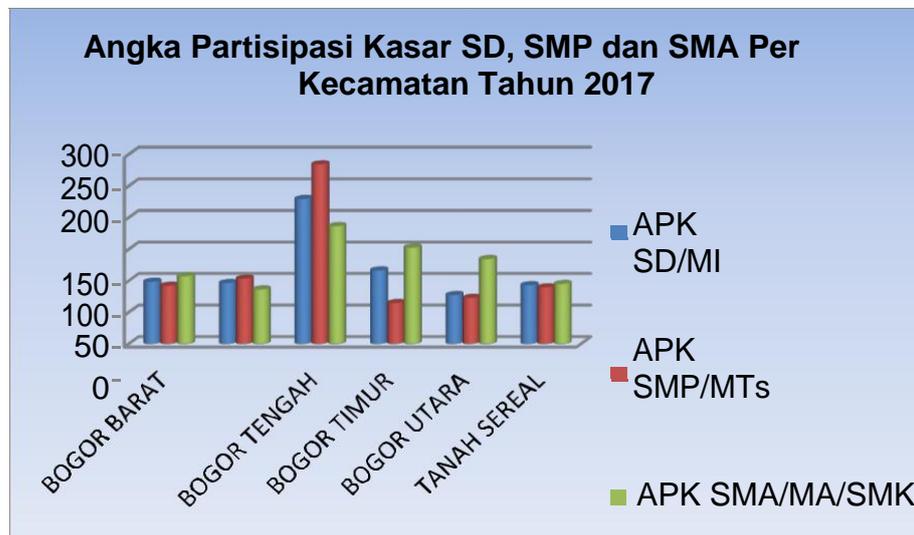
PK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2017 menurut Kecamatan :



Tabel 1.8
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Per
Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	APK SD/MI			APK SMP/MTS			APK SMA/MA/SMK		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Bogor Barat	99,42	97,39	98,39	100,25	84,28	92,19	112,91	101,24	107,02
2	Bogor Selatan	102,20	90,74	96,41	104,71	101,83	103,26	94,82	77,28	85,96
3	Bogor Tengah	240,76	218,07	229,30	292,71	275,82	284,18	173,70	198,60	186,28
4	Bogor Timur	123,03	109,56	116,23	64,87	64,63	64,74	145,97	158,57	152,33
5	Bogor Utara	80,03	74,38	77,18	70,34	75,22	72,80	145,00	123,62	134,20
6	Tanah Sareal	97,37	88,66	92,97	93,15	86,00	89,54	86,81	102,56	94,77
		88,63	81,67	105,53	107,11	100,87	103,95	118,34	114,97	116,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor (2017)



Tabel 1.9
Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017

No.	Uraian	2017
1	Angka Partisipasi Murni (APM)	107.76
	SD/MI/Kejar Paket A	
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	86.82
	SMP/MTs/Kejar Paket B	
3	Angka Partisipasi Murni (APM)	87.79
	SMA/SMK/MA/Paket C	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor Dalam Angka 2018

➤ **ANGKA PARTISPASI MURNI**

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 108.593% dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 102.885% dari target 94,14 . Angka yang di capai sudah melampaui target, Dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 88 %. Hal ini menunjukkan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan.

Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.10
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Kejar Paket A	103.98	98.30	95.44	108.05
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/KejarPaket B	99.41	74.30	74.75	94.14
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	103.99	78.6	61.21	88

Sumber : Bogor Dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor



□ **ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH**

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Bogor.

Tabel 1.11
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Bogor
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi SD/MI/Kejar Paket A	49,76	34,658	115,025	115,271
2	Angka Partisipasi SMP/MTs/Kejar Paket B	33,978	34,63,	33,604	30,929
3	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA/Paket C	31,126	31,973	31,574	31,261

Sumber ; Dinas Pendidikan Kota Bogor

Angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah dasar menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai APS sebesar 49.76, pada tahun 2016 nilai APS sebesar 34,658 dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 115,025 begitu juga dengan tahun 2018 naik lagi menjadi 115.271. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk pada usia sekolah dasar mampu diserap oleh infrastruktur pendidikan dasar.

Angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama menunjukkan pola yang fluktuatif . Pada tahun 2015 nilai

APS sebesar 33.978 pada tahun 2016 nilai APS sebesar 34.63 dan turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 33.604 kemudian mengalami turun lagi di tahun 2018 menjadi 31.261.

Angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA cenderung pola yang relatif datar yaitu pada tahun 2015 sebesar 31.126 , tahun 2016 ada kenaikan sedikit menjadi sebesar 31.973. Ada penurunan kembali tahun 2017 menjadi sebesar 31.574 dan kembali menurun menjadi 31.261 di tahun 2018.

□ ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bogor cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun tersebut Angka putus sekolah pada tingkat SD/MA berada pada angka rasio terkecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.12

Angka Putus Sekolah di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0.06	0.06	0.06
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0.13	0.08	0.08
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.01	0.085	0.11	0.11

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor



□ **ANGKA KELULUSAN DAN ANGKA MELANJUTKAN**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas diantara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kota Bogor per jenjang pendidikan dari tahun 2015 - 2018, baik SD/MI , SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA seluruhnya masih dalam angka yang memuaskan. Apabila dilihat lima tahun terakhir rata-rata angka kelulusan SD/MI ,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seluruhnya berada dalam kisaran 90,6%-100%.

Pasca kelulusan, diharapkan para peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan menggunakan rumus jumlah lulusan pada jenjang tertentu di bagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu di kali 100, maka diperoleh angka kelulusan seperti dalam tabel berikut ;

Tabel 1.13
Perkembangan Angka Kelulusan Dan Angka Melanjutkan
Kota Bogor Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka kelulusan SD/MI/Kejar Paket A	100	98,2	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs/Kejar Paket B	100	90,6	100	100
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C	100	91,4	100	100
4	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	164	115	110
5	Angka Melanjutkan SMP/Mtske SMA/MA	108	164	115	110

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor

□ **RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH**

Tabel 1.14
Perkembangan Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	28,85	34,64	34,86	33,14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor

Mengacu kepada tabel di atas bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan.

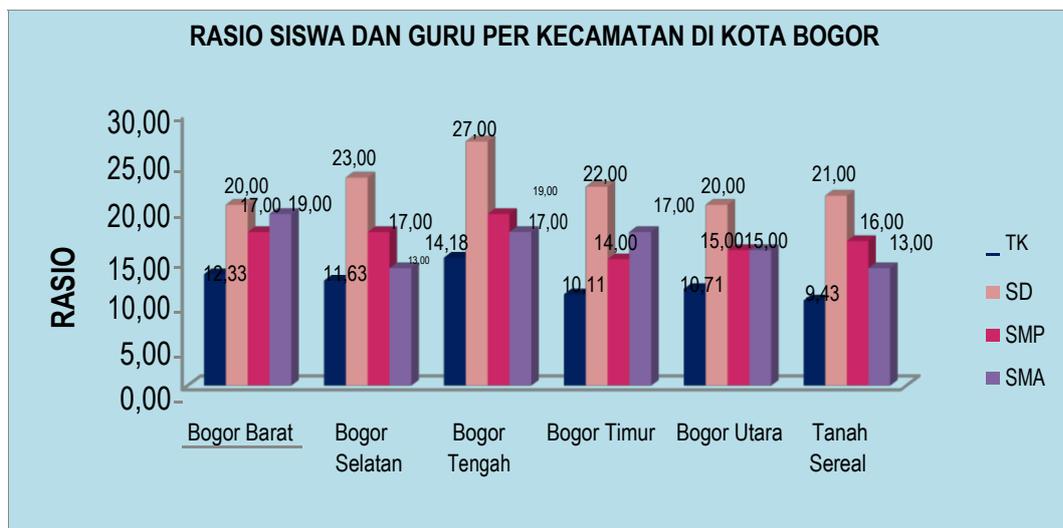
➤ **RASIO GURU TERHADAP MURID**

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu

orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini ;

Grafik

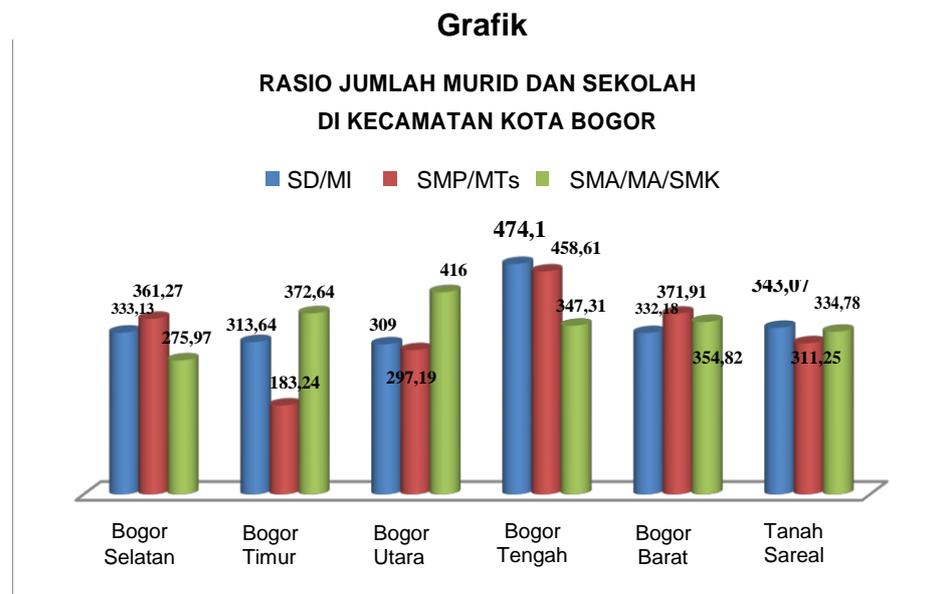


Seperti tersaji grafik di atas , kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI yaitu Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio 27,00; yang artinya satu guru mengajar 27 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kecamatan Tengah dengan rasio sebesar 19,00; Sedangkan untuk jenjang SLTA/Sederajat rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan rasio sebesar 19,00 angka ini mengartikan bahwa satu guru mengajar 19 siswa. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kota Bogor rasio guru dan murid berada pada kondisi ideal di atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

➤ **RASIO JUMLAH MURID DAN SEKOLAH**

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang

pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Kondisi daya tampung sekolah di Kota Bogor pada setiap Kecamatan pada tahun 2017 dapat tergambar dalam grafik di bawah ini ;



Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Dari grafik di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah tertinggi di Kota Bogor untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdapat di Kecamatan Bogor Tengah. Jenjang pendidikan SD/MI, 474,1; yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 474 siswa. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio sebesar 458,61 angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 458 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio jumlah murid dan sekolah terbesar di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 416 yang artinya satu sekolah SMA/MA menampung 416 siswa.

➤ **GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi

kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sudah mencapai 87.87. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 - 2018.

Tabel 1.15
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	88,5	85	87,87

2) KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah Angka Harapan Hidup Saat lahir.

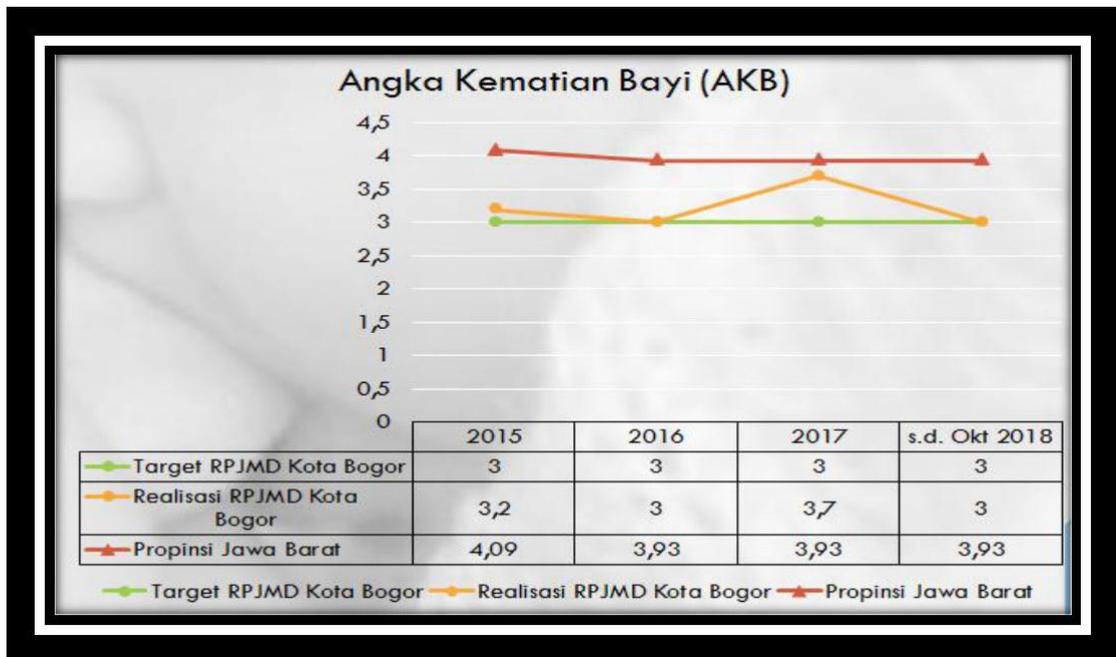
➤ ANGKA KEMATIAN BAYI

Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Pada Tahun 2018 , Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran di Kota Bogor mencapai 2.9. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.39. Upaya Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam rangka meningkatkan kualitas derajat

kesehatan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dalam menekan AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik



Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023

Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan angka kematian bayi mencapai 24 kasus per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2019. Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019, telah ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

➤ **ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP IBU**

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu menjadi salah satu tolok ukur yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang

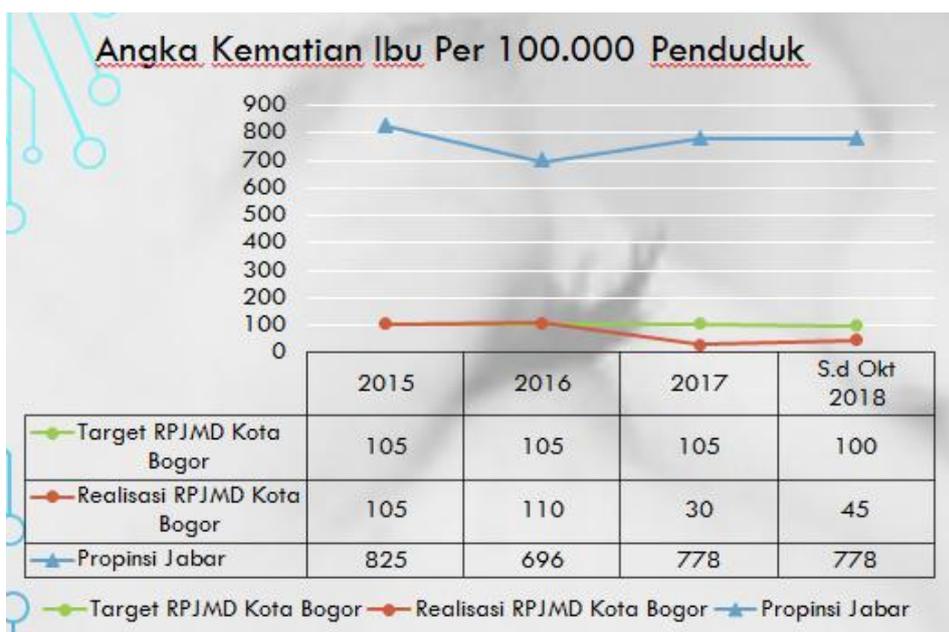


sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia, (SDKI), sampai dengan tahun 2012, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk data di Kota Bogor pada Tahun 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 100 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional. Berikut ini adalah gambaran performa AKI di Indonesia berdasarkan hasil sensus demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012).

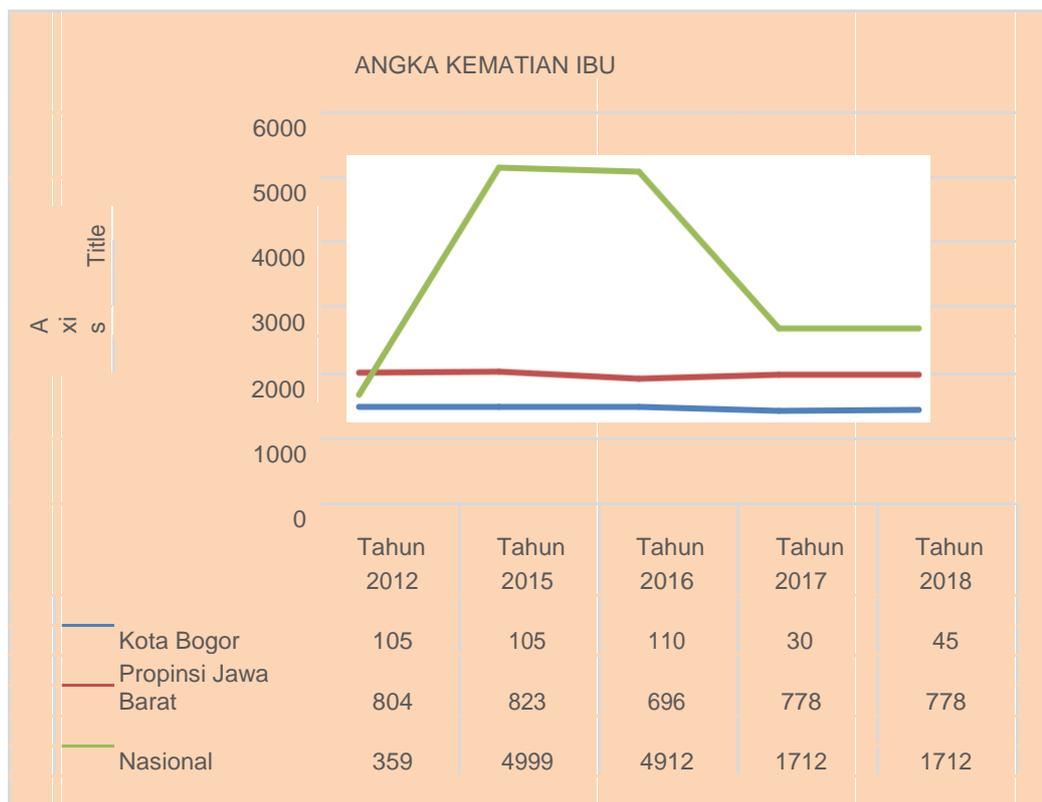
Grafik



Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023

Hasil Sensus Kependudukan tahun 2010 menunjukkan bahwa 90% kematian ibu terjadi saat atau segera setelah proses persalinan. Persentase tertinggi sejak satu dekade terakhir karena perdarahan. Walaupun aborsi hanya berkontribusi 1% terhadap kematian ibu, data sesungguhnya mungkin lebih tinggi, bisa mencapai 11% - 15%. Hal ini disebabkan banyaknya kasus aborsi tidak aman tercatat sebagai infeksi dan perdarahan akibat komplikasi persalinan.

Grafik
Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di
Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional



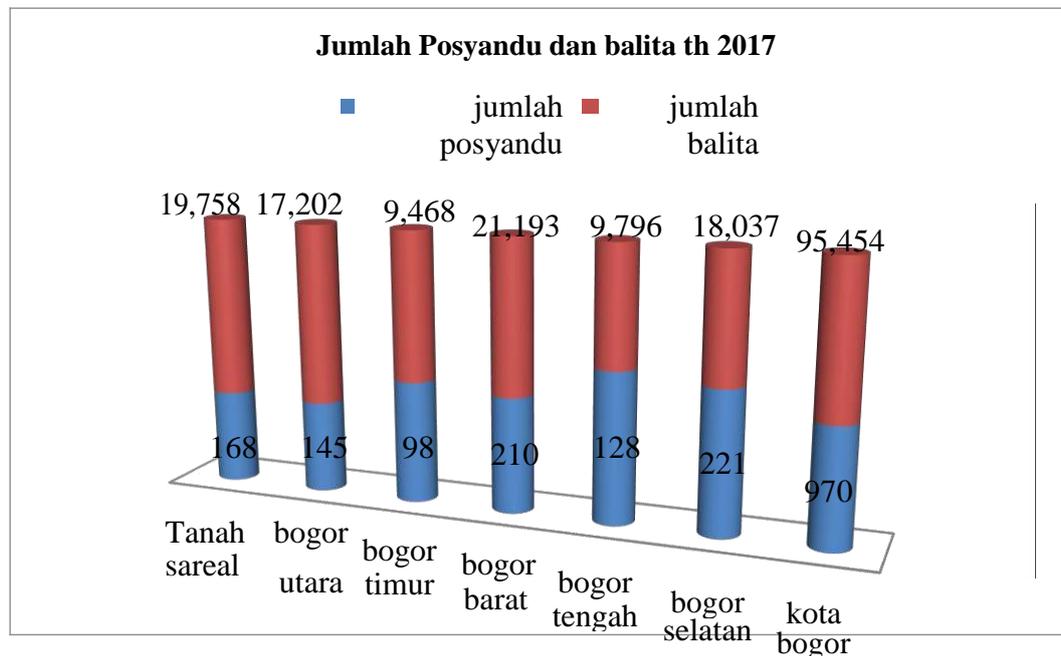
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

➤ **RASIO POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PER SATUAN BALITA**

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio ideal 1 unit poyandu untuk melayani balita adalah 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka di lakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

Grafik



Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

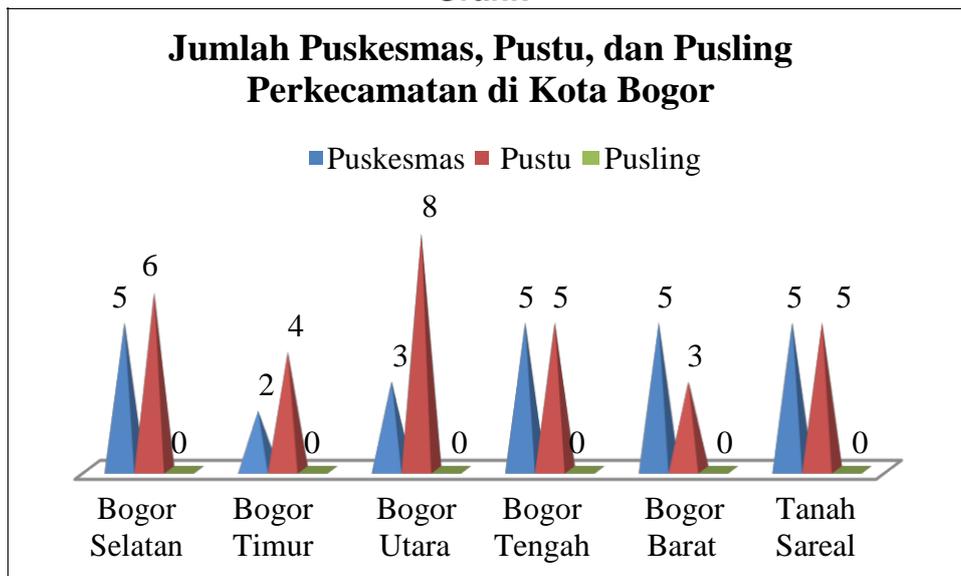
Kecamatan dengan rasio Posyandu per satuan balita tertinggi pada tahun 2017 terdapat pada Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio sebesar 16,47 yang artinya 1.000 balita

dapat dilayani Posyandu sebanyak 16 Posyandu. Kecamatan ini memiliki rasio posyandu per satuan balita tertinggi dikarenakan jumlah balita yang terdapat di Kecamatan Bogor Tengah merupakan jumlah balita paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya yang juga didukung oleh jumlah Posyandu yang memadai.

➤ **RASIO PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU)
DAN PUSKESMAS KELILING**

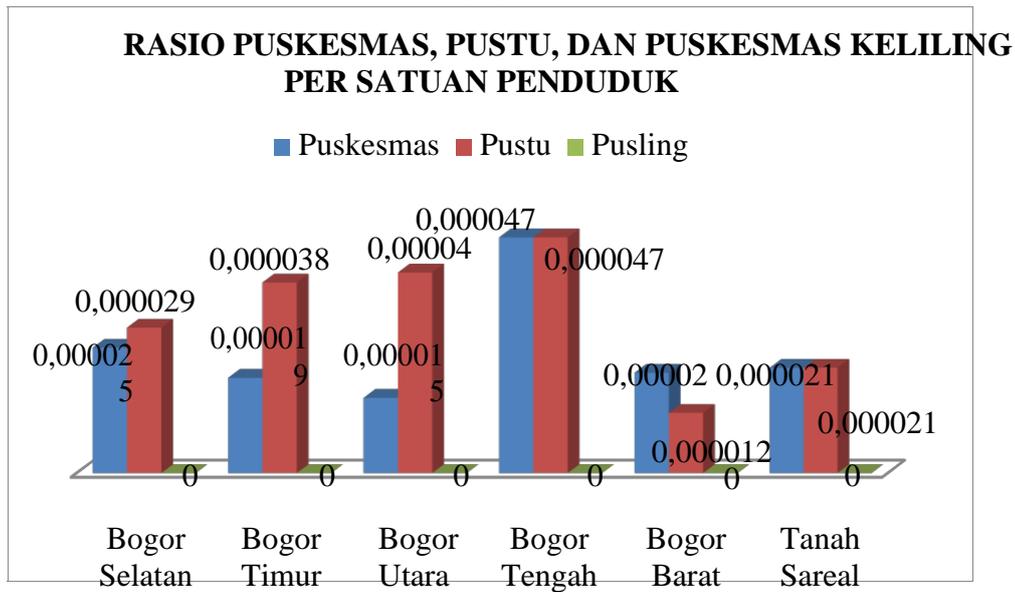
Puskesmas, Pustu dan puskesmas keliling merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Grafik



Sumber: Kota Bogor dalam Angka 2018

Grafik



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Tabel 1.16
**Jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling di Kota Bogor
Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Puskesmas Keliling	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	Rasio Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk
1	Bogor Selatan	5	6	0	201.618	40.323,6	33.603,0	0
2	Bogor Timur	2	4	0	106.209	53.104,5	26.552,2	0
3	Bogor Utara	3	8	0	196.051	65.350,3	24.506,4	0
4	Bogor Tengah	5	5	0	104.853	20.970,6	20.970,6	0
5	Bogor Barat	5	3	0	239.860	47.972,0	79.953,3	0
6	Tanah Sareal	5	5	0	232.598	46.519,6	46.519,6	0
JUMLAH		25	31	0	1.081.009	274.240,6	232.105,1	0

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Dari data di atas , rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor pada waktu tahun 2017 adalah 274.240,6 artinya setiap puskesmas melayani sebanyak 274.240 jiwa. Apabila dijumlahkan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling maka rasionya menjadi 58.683.632 . Kecamatan yang

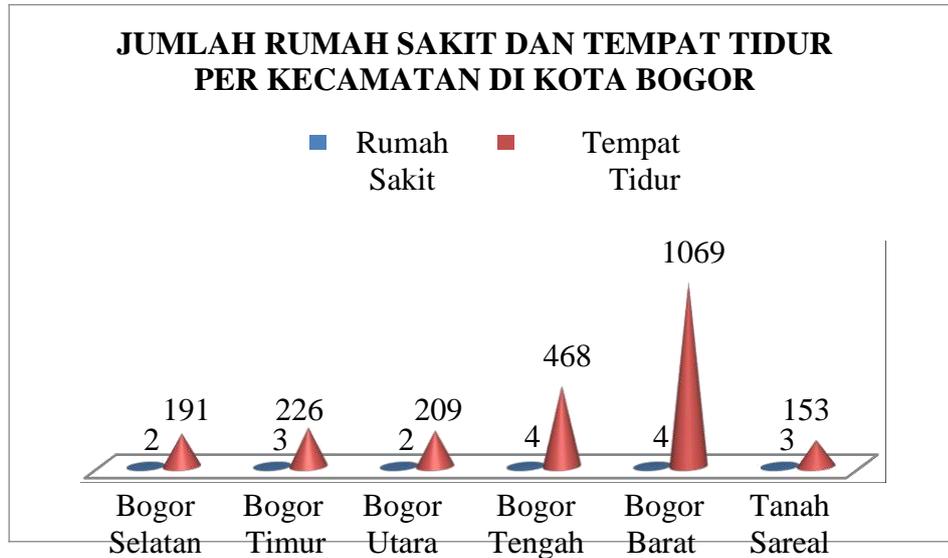
rasio Puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling per satuan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat dengan rasio sebesar 25.848.22 artinya satu Puskesmas melayani sebanyak 25.848 jiwa. Apabila dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas tanpa puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka dapat dikatakan jumlah Puskesmas yang ada di Kota Bogor belum memenuhi standar yang ada. Tetapi dengan adanya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling menjadi memenuhi standar.

➤ **RASIO RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK**

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gambaran jumlah tempat tidur dan rumah sakit dapat terlihat dalam grafik berikut :

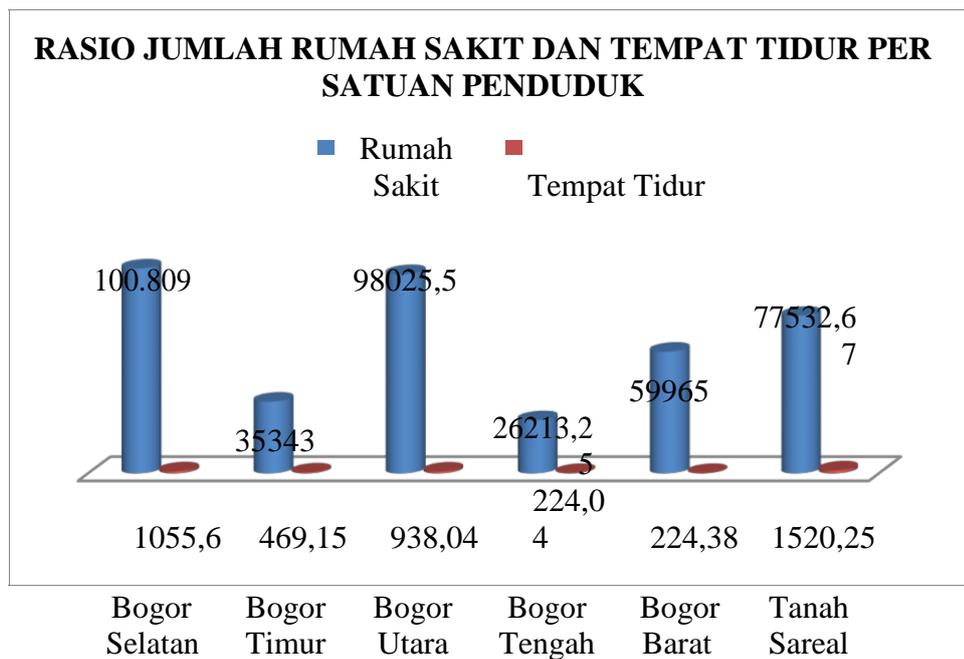


Grafik



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

Grafik



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

Bila dilihat dari grafik di atas Kecamatan Bogor Barat mempunyai jumlah tempat tidur terbanyak (1069 bed) dari 4 Rumah Sakit. Hal ini karena di Kecamatan Bogor Barat terdapat Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kecamatan

Bogor Barat 58.158,58 artinya satu rumah sakit melayani 58.158 penduduk . Untuk Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang tertinggi ada di Kecamatan Tanah Sareal yaitu 110,599 artinya satu rumah sakit melayani 110.599 penduduk, hal ini disebabkan di Kecamatan Tanah Sareal hanya mempunyai 2 rumah sakit dengan 64 tempat tidur.

Peningkatan jumlah rumah sakit setiap tahunnya diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin meningkat.

➤ RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu.

Tabel 1.17
Rasio Dokter Persatuan Penduduk

No	Uraian	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009
Jumlah Dokter Praktek					
2	Dokter Umum	602	821	272	199
3	Dokter Spesialis	554	696	560	570
4	Dokter Gigi	290	344	166	63
Rasio					
5	Dokter Umum	1.712	1.276	3.914	5.432
6	Dokter Spesialis	1.861	1.506	1.901	1.896
7	Dokter Gigi	3.554	3.046	6.413	17.158

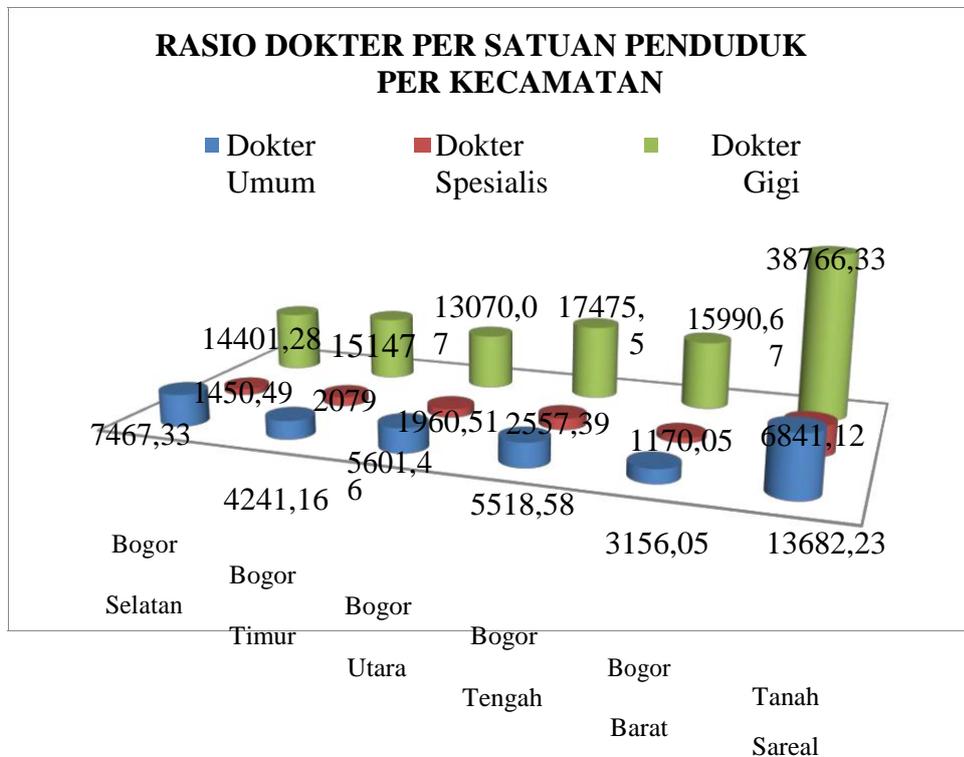
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018



Pada tabel di atas, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 3.914 artinya satu dokter melayani 3.914 jiwa. Berlanjut sampai tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk menjadi 5.432. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sudah memenuhi standar karena pada tahun 2017 rasio nya mencapai 1.896 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.896 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 17.158 artinya satu dokter gigi melayani 1 jiwa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk di katakan sudah ideal.

Untuk melihat kondisi sebarannya per kecamatan dapat di lihat pada grafik berikut :

Grafik

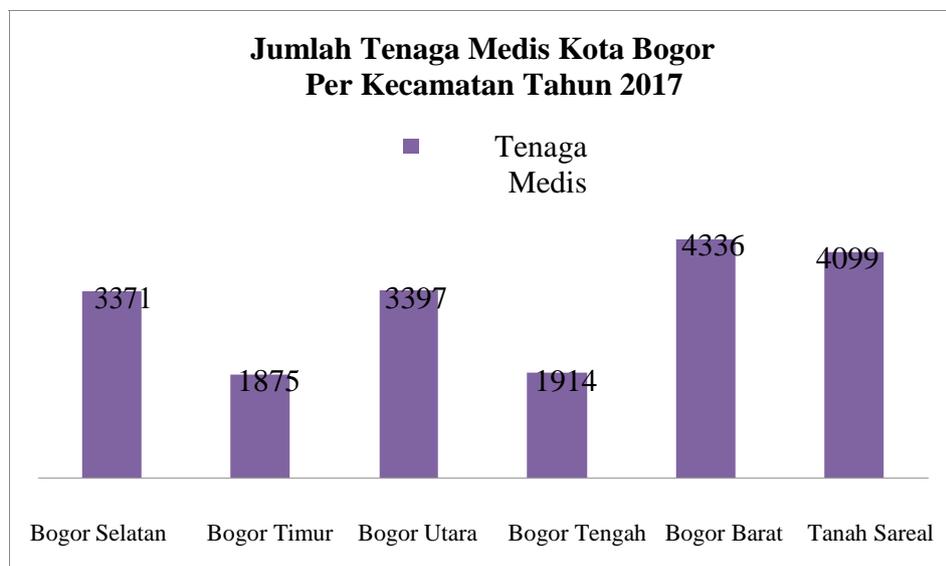


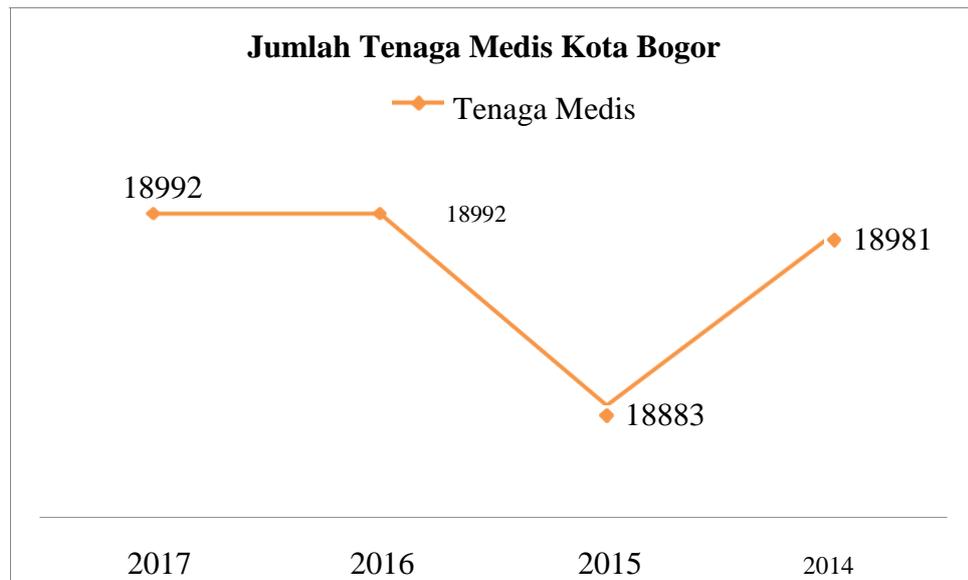
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Rasio Dokter Umum per satuan penduduk per Kecamatan sudah memenuhi standar pelayanan terpadu. Sedangkan rasio tertinggi untuk rasio dokter spesialis terdapat di kecamatan Bogor Selatan yaitu 3713 , sedangkan di Kecamatan Bogor Utara satu dokter melayani 15.071 jiwa. Rasio yang ideal untuk dokter terhadap penduduk, yaitu satu dokter melayani 2.500 penduduk sehingga sangat jelas bahwa rasio dokter per satuan penduduk di Kecamatan Bogor Utara tidak ideal. Hal ini terjadi dikarenakan Kecamatan Bogor Utara memiliki jumlah penduduk yang tinggi (180.847 jiwa) dengan tidak diimbangi oleh jumlah dokter yang memadai (12 dokter).

➤ **RASIO TENAGA MEDIS PER SATUAN PENDUDUK**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.





3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Penjelasan nya sebagai berikut :

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10%). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas.

- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel 1.18
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Proporsi panjang jaringan jalan baik (%)	86.5%	88.75%	88.91%	89.16%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Proporsi kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik terjadi peningkatan setiap tahunnya.

➤ **PEMBANGUNAN ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi



fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum.

Tabel 1.19
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
Pekerjaan Umum					
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	87.6	88.15	88.2	88.59
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	61.32	61.71	61.83	66.44
3.	Persentasi rumah tinggal bersanitasi	66.8	66.8	72.1	67.21
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	2.78	5.48	7.22	11.01
5.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	23	89	37	74.19
6.	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	11.46	22.92	34.38	45.83

➤ RASIO JARINGAN IRIGASI

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari

saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkapannya. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.20
Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018

No	Irigasi	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	11.46	22.92	34.38	45.83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami kenaikan setiap tahunnya .

➤ **RASIO TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PER SATUAN PENDUDUK**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 1.21
Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	11.59	11.41	11.24	11.71

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor



Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2015 di Kota Bogor sebesar 11.59 artinya jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebesar 11.59 per 1000 penduduk. Sebesar 11.71 per 1000 penduduk daya tampung tempat pemakaman umum untuk tahun 2018. Maknanya pada tahun 2018 Kota Bogor hanya mampu menampung 11 sampai 12 orang dari 1000 penduduk.

➤ **RASIO TEMPAT BERIBADAH PER SATUAN PENDUDUK**

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 1.22
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Bogor
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.0185	0.0183	0.018	0.018

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Bogor

Pada tahun 2015 Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk sebesar 0.0185 dan menjadi 0.018 pada tahun 2018 . Artinya di Kota Bogor tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah tempat ibadah.

➤ **LUASAN RTH PUBLIK SEBESAR 20% DARI LUAS WILAYAH KOTA/KAWASAN PERKOTAAN**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan
- d. Luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bogor tertera dalam Tabel berikut

Tabel 1.23
Luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bogor
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2015	2017
1.	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Wilayah Perkotaan	1.66	1.67	1.69	1.72

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor

➤ **RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian



atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 1.24
Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB
di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun	90%	99.37%	98.90%	99.74%
2	Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB	72%	75.69%	88.83%	82.32%

Sumber: LKPJ Walikota Bogor Tahun 2015,2016,2017,2018

90% bangunan di Kota Bogor pada tahun 2015 sudah ber-IMB terus mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99.37 % bangunan dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 98.90% dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 99.74 %.

➤ **KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan

ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Tabel 1.25
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	99.77	98.9	99.74

Sumber : Bappeda Kota Bogor

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

➤ RASIO RUMAH LAYAK HUNI

Rasio rumah layak huni mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2015- 2018. Ditahun 2015 mencapai 20,84 terus 20.73 di tahun 2016, 20,71 di tahun 2017 dan menjadi 17.28 di tahun 2018. Artinya di tahun 2018 penduduk Kota Bogor masih ada 17.28 rumah layak huni. Lebih lengkap kondisi rumah layak huni di Kota Bogor seperti dalam table berikut.



Tabel 1.26
Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018

No.	Uraian	2015	2015	2017	2018
1.	Rasio rumah layak huni	20.84	20.73	20.71	17.28
2	Rasio pemukiman layak huni	91.8	92.92	94.03	95.14
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	74.3	98.11	78.4	70.59
4	Cakupan layak huni yang terjangkau	89.69	92.5	44.84	76.61

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman

Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, rasio pemukiman layak huni terus meningkat. Yang pada tahun 2015 mencapai 91.8 menjadi 95.14 di tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layak huni yang terjangkau sangat fluktuatif menjadi 70.59 dan 76.61 pada tahun 2017 dan 2018.

➤ **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Secara bertahap persentase lingkungan pemukiman kumuh terus berkurang dimulai tahun 2015 sebesar 1.1% dan tiga tahun terakhir sebesar 0.005%.

Tabel 1.27
Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	1.1	0.005	0.005	0.005
2	Persentase luasan pemukiman kumuh di perkotaan	99.59	99.59	99.59	99.59
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.15	1.13	1.11	1.09

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor

Persentasi luasan pemukiman kumuh di perkotaan tidak mengalami kenaikan, ini merupakan hal yang positif karena tidak terjadi perluasan baru. Sedangkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan yaitu dari 1.15 pada tahun 2015 menjadi 1.09 di tahun 2018.

5) KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

> TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 DAN PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN PERDA

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum dalam Pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bogor telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan K3 dan penegakan perda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.28
Penyelesaian Penegakan PERDA di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	68	68	68	68
1.	Persentase Penegakan PERDA (%)	78	8856,75	88	90

Sumber: Sat Pol PP Kota Bogor

> Penanganan Bencana

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kota



Bogor tahun 2015-2017 sudah mencapai angka 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2017.

Tabel 1.29
Penanganan Bencana di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	68%	68%	68%	68%
2.	Tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran WMK (Menit)	74	76	78	95

Sumber : Sat pol PP Kota Bogor

6) SOSIAL

➤ Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penanganan dan bantuan terhadap PMKS tahun 2015-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.30
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Bogor Tahun 2015-2018

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	43.09	44.33	72.74	91.45

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat sepanjang tahun yaitu 43.09 % tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 44.33 % kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 yaitu menjadi 72.74 dan 91.45 Pada tahun 2017 naik menjadi 0,42 %.

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Kontribusi terbesar IPM tahun 2020 diperoleh dari Indeks Angka Harapan Hidup yang mencapai 73,61, Indeks Daya Beli Masyarakat mencapai 11.564. Angka Harapan Hidup yang mencapai 73,61 Tahun meningkat dibanding tahun 2019 mencapai 73,41, harapan Lama Sekolah 13,41, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,33 Tahun 2020, dan Pengeluaran perkapita masyarakat sebesar 11.564.

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor
Tahun 2017 –2020

No.	Indikator	Capaian Indikator Makro			
		2017	2018	2019	2020
1.	IPM	75,16	75,66	76,23	76,11
	Indeks Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,29	10,30	10,32	10,33
	Indeks Pendidikan Harapan Lama Sekolah (5)	13,37	13,38	13,40	13,41
	Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup	73,01	73,21	73,41	73,61
	Indeks Daya Beli Pengeluaran perkapita	10.940	11.348	11.825	11.564
2.	Persentase Penduduk Miskin Terhadap Total Penduduk (%)	7,11	5,72*	5,77	6,68
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,12	6,14	6,14	-2,32
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,57	9,65	9,10	12,68
5.	PDRB per Kapita ADHK (%)	38,47	42,21	41,79	Data belum update
6.	PDRB per Kapita ADHB (Rp.)	35.594.93	38.492.17	41.778.37	Data belum update
7.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,410	0,410	0,408	0,40*

(Sumber : Bappeda Kota Bogor)

b. Angka Kemiskinan

1. Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Artinya sebanyak 6,68% penduduk Kota Bogor merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 480.001,-. Kemiskinan dan Gini Rasio, Kemiskinan di Kota Bogor jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2017, dari 90 ribu orang menjadi 76 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio kemiskinan di Kota Bogor pun mengalami penurunan, dari 9,49% menjadi 7,26%. Laju penurunan penduduk miskin di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2017 rata-rata per tahunnya adalah 2,31%. Laju penurunan tertinggi adalah pada tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 4,61%. Laju penurunan terendah adalah dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,97%. Rasio kemiskinan, perbandingan antara orang miskin dengan penduduk di Kota Bogor relatif tinggi dibandingkan daerah lain sekitar ibukota, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga ke tahun 2013, yaitu dari 1,60 di tahun 2010 menjadi 1,13 pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan di tahun 2014, menjadi 1,26. Selanjutnya, sejalan dengan menurunnya laju pengentasan kemiskinan di Kota Bogor, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2016 ke 2017, juga mengalami penurunan, tahun 2015 yang sebesar 1,26 menjadi 1,08 di tahun 2016 dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 0,99. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2017 ke 2018, juga mengalami penurunan, tahun 2016 yang sebesar 1,08 menjadi 0,99 di tahun 2017 dan menurun lagi di tahun 2018 menjadi 0,77. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2018 ke 2019, juga mengalami penurunan, tahun 2017 yang sebesar 0,99 menjadi 0,77 di tahun 2018 dan menurun lagi di tahun 2019 menjadi 0,72. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Bogor, tahun 2019 ke 2020, mengalami kenaikan, tahun 2018 yang sebesar 0,77 menjadi 0,72 di tahun 2019 dan akibat dampak Covid-19 di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,08. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Begitu pula



dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,33 menjadi 0,26 tahun 2016, selanjutnya menurun lagi menjadi 0,17 tahun 2018. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0,18 dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan kembali akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi 0,26 Dengan naiknya P2, berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin bertambah. Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakatnya, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Dana bantuan sosial di Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 kecenderungannya mengalami penurunan. Pada tahun 2010 rasio dana bantuan sosial terhadap total belanja adalah 9,33%, menurun terus hingga tahun 2013, menjadi 1,55%, kemudian tahun 2016 yang sangat rendah, sebesar 0,00% dan tahun 2017 meningkat menjadi 1,25%. Sementara itu jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di wilayah sekitarnya, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Bogor, sepanjang tahun 2010 hingga 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Nilai P1 Kota Bogor lebih rendah dari nilai rata-rata P1 di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi dan Kota Depok memiliki nilai P1 yang rendah dibandingkan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dikarenakan tingkat garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi lebih tinggi dari Kota Bogor. Pada tahun 2017, jika dilihat dari garis kemiskinan di Kota Depok dan Kota Bekasi nilainya lebih tinggi dibandingkan Kota Bogor. Pada tahun 2010, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Kota Depok adalah Rp 332.849 dan Rp 278.530. Sedangkan Kota Bogor berada pada Rp 310.279. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai garis kemiskinan di Kota Bekasi dan Depok adalah Rp 449.026 dan Rp 443.302, sedangkan Kota Bogor adalah Rp 360.518. Begitu pula pada tahun 2017, garis kemiskinan Kota Bekasi dan Depok lebih tinggi dari Kota Bogor, yaitu Rp 544.534 dan Rp 556.470, sedangkan Kota Bogor sebesar Rp 450.078. Oleh karena itu nilai P1 di Kota Bogor relatif lebih tinggi dibandingkan 2 kota lainnya.

2. Menurut perhitungan Bappeda Tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, sehingga pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor sebanyak 5,77%

atau sebanyak 63.970 Orang. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan di Kota Bogor dan tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada tahun 2020 adalah sebanyak 75.040 orang (6,68%).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Pada tahun 2020, angka kemiskinan nasional adalah 7,88%, meningkat 1,06% dari tahun 2019 (6,82%). Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Kota Bogor akan lebih bersesuaian dengan angka kemiskinan nasional perkotaan yang berada di angka 7,38%, namun angka kemiskinan Kota Bogor masih lebih baik karena angka kemiskinan Kota Bogor berada di angka 6,68%.
4. Adanya Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bogor tahun 2020. Menurut Kepala Bappeda Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor meningkat salah satunya karena angka kemiskinan tingkat nasional sudah meningkat dan roda ekonomi sudah mulai terganggu dari awal tahun 2020. Adanya PHK besar-besaran akibat Pandemi Covid-19 juga memberi dampak yang sangat signifikan dalam meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor.
5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka menekan angka kemiskinan adalah dengan sedapat mungkin untuk tidak menambah jumlah angka kemiskinan absolut. Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor masih terus menjalankan program-program bantuan untuk membantu ekonomi warga di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu juga dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan membuat revisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih valid dan tepat sasaran.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 12.68% dikarenakan wabah pandemic covid 19 yang dialami negara kita. Kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 9.65 % menjadi 9.10 % pada tahun berikutnya.

d. Pertumbuhan Ekonomi

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kurun waktu 2017-2019 mengalami perkembangan. Pada tahun 2017 yaitu sebesar 6.12% dan meningkat menjadi



6,14% pada tahun 2018. Namun demikian, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun propinsi Jabar pada tahun 2019, maka terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor hanya berkisar 6,04% atau melambat kurang lebih 0,10% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Apabila di bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2019, Kota Bogor masih berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat yaitu sebesar 5.07%. Begitu juga bila di bandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada angka 5.02% pada tahun 2019.

2. Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yaitu menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memiliki proporsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di semua provinsi. Konsumsi rumah tangga di Kota Bogor diperkirakan menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan masyarakat yang lebih banyak menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga.
3. Selain itu, pertumbuhan investasi yang memiliki tujuan dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan di semua provinsi. Di Kota Bogor, diperkirakan investasi menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat, antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi PMDN.
4. Melemahnya sektor perdagangan dan industri berdampak pada meningkatnya pengangguran dan PHK saat Pandemi Covid-19. Sebanyak 42% warga sempat menganggur dan di PHK saat pandemi, sementara 7% diantaranya menganggur sebelum pandemi dan sisanya sebanyak 58% tetap sama seperti sebelum pandemi.
 - 1) Isu Strategis Perekonomian :
 - a. Pengangguran;
 - b. Daya saing, Produktivitas dan peran UKM/IKM, Ekonomi kreatif dan Koperasi dalam Perekonomian Kota;
 - c. Pendapatan Daerah;

- d. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
 - e. Investasi dan daya saing wilayah;
 - f. Pemerataan kualitas pengelolaan dan peningkatan Peran BUMD dalam Perekonomian.
- 2) Isu Strategis dan Permasalahan Ekonomi di masa Pandemi :
- a. Menurun Daya Beli masyarakat :
 - a. Kemiskinan, meningkatnya penduduk Rentan Miskin
 - b. Kesehatan,
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan akan gizi berimbang;
 - Tidak terpenuhinya Pelayanan Kesehatan;
 - Meningkatnya Permohonan Jaminan pembiayaan kesehatan.
 - c. Pendidikan,
 - Potensi Putus jenjang/ tidak lanjut, karena harus bekerja;
 - Tidak mampu memenuhi / mengikuti sistem pembelajaran daring.
 - d. Sosial,
 - Meningkatnya potensi PMKS;
 - Meningkatnya Kriminalitas.
- 3) Ketenagakerjaan
- a. Banyak PHK/ PHK sementara;
 - b. Meningkatnya Potensi pekerja anak;
 - c. Pengangguran terselubung;
 - d. Meningkatnya pekerja Non Formal.
- 4) Pembatasan Aksesibilitas dan Aktivas Ekonomi
- a. Keterbatasan jalur distribusi dan transportasi.
 - b. Keterbatasan Barang/ jasa di pasaran.
 - c. Peningkatan harga Barang/ jasa.
 - d. Kelangkaan bahan baku.
 - e. Peningkatan kebutuhan RT (Listrik, Air, Gas, Komunikasi, Kesehatan).
- 5) Ketahanan Ekonomi Keluarga
- a. Meningkatnya beban Ekonomi Keluarga.
 - b. Peningkatan kebutuhan RT (Listrik, Air, Gas, Komunikasi, Kesehatan).
 - c. Menurunnya pendapatan keluarga.
 - d. Menurunnya Dana Pihak ketiga di Perbankan.



- 6) Penurunan Pendapatan Daerah
 - a. Penurunan pendapatan dari sektor Unggulan.
 - b. Penurunan Potensi Pajak dan Retribusi.
 - c. Belum optimalnya penciptaan objek pajak baru.
 - d. Belum optimalnya Investasi yang masuk ke Kota Bogor.
 - e. Belum Optimalnya peran BUMD.
- 7) Tantangan Ekonomi di Masa Pandemi :
 - a. Potensi Penurunan Investasi.
 - b. Aksesibilitas barang jasa terhambat.
 - c. Pergeseran struktur tenaga kerja.
 - d. Kesiapan kesadaran pelaku ekonomi terkait penerapan Protokol Kesehatan dan AKB.
 - e. Kebijakan “PSBB” Pembatasan aktivitas ekonomi.
 - f. Keterbatasan Daya serap Pasar.
 - g. Aktivitas produksi belum pada, kapasitas optimal/ ekonomis.
 - h. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang jasa.
 - i. Di aspek moneter Potensi NPL Tinggi dan Penyaluran kredit terhambat.
 - j. Pola Pemulihan perekonomian pasca Covid.
- 8) Strategi dan Arah Kebijakan Perekonomian
 - a. Menurunkan Tingkat Pengangguran
 - Menciptakan kesempatan kerja dengan kolaborasi Pengusaha, UMKM, BUMN/BUMD, Perbankan dan Profesional, NGO.
 - Pemetaan potensi/ skill korban PHK terdampak covid dan fasilitasi penyaluran ke pasar kerja.
 - Peningkatan skill Angkatan kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja.
 - Menumbuhkan Wirausaha baru, Inkubasi Bisnis dan Start Up Firm.
 - Program pemagangan pencari kerja dengan berkoordinasi dengan Industri.
 - Penataan dan pembinaan Pekerja Informal.
 - Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
 - b. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin

- Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau berpotensi rentan miskin.
 - Meningkatkan kemampuan Ekonomi bagi masyarakat miskin.
 - Conditional Cash Transfer bagi masyarakat miskin.
 - Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin.
 - Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mengurangi kemiskinan.
- c. Peningkatan Peran dan daya saing UMKM/IKM, pelaku ekonomi kreatif dan koperasi dalam perekonomian Kota
- Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui Pembinaan dan Pendampingan, peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha.
 - Fasilitasi dan peningkatan kemampuan pemasaran serta perluasan jaringan distribusi.
 - Peningkatan kualitas produksi dan packaging.
 - Subsidi pada penyediaan bahan baku dan proses produksi.
 - Kerjasama dengan Industri besar dan menjadi bagian dari rantai nilai Industri besar tersebut.
 - Akselerasi pemanfaatan IT dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Strategi dan Arah Kebijakan Perekonomian
- Meningkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Wilayah
 - Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi.
 - Optimalisasi sektor ekonomi unggulan Kota Bogor.
 - Menyediakan layanan Publik dan perijinan yang responsive, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik.
 - Redistribusi pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bogor.
 - Pengendalian ruang kota yang kondusif.
 - Penerapan insentif dan disinsentif.
 - Peningkatan keamanan, ketertiban dan stabilitas wilayah.



- Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
5. Berdasarkan data Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) chapter Bogor, tingkat hunian rata-rata hotel per bulan Kota Bogor pada April 2020 mencapai titik terendah yakni 0%. Padahal, rata-rata tingkat hunian kota sebelum terjadi Pandemi Covid-19 sekitar 70-80%.
 6. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor perlu melakukan strategi pemulihan ekonomi berfokus pada program-program dan kegiatan yang dapat membangkitkan sektor perekonomian diantaranya dengan pengendalian Covid-19 (penerapan protokol kesehatan yang disiplin; strategi peningkatan kapasitas testing, tracing, dan isolasi; dan strategi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan), juga dengan melaksanakan akselerasi dan perluasan bantuan sosial, akselerasi bantuan keuangan, restrukturisasi dan penyaluran kredit untuk UMKM dan korporasi, serta akselerasi belanja pemerintah lainnya termasuk belanja modal

e. Pendapatan Per-Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2020 belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga yang melakukan perhitungan indikator dimaksud, sampai dengan laporan ini disusun masih belum mempublikasikan data realisasi tahun 2020. PDRB per kapita merupakan pembagian dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk dalam periode waktu yang sama, sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat tren sampai dengan tahun 2019, PDRB perkapita Kota Bogor ADHB dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Tercatat angka PDRB per kapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 41,77 juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 38,49 juta.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

1. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebesar 0,40 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang.
2. Kota Bogor mengalami ketimpangan kesejahteraan yang dikategorikan sedang, dan angka tersebut melebihi angka indeks gini rasio provinsi Jawa Barat dan indeks gini rasio nasional. Walaupun pada tahun 2019, angka tersebut secara perlahan sudah berhasil ditekan, tetapi hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor untuk terus berupaya menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional adalah pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,392. Data tersebut menunjukkan bahwa gini ratio Kota Bogor masih lebih tinggi dibanding Gini Ratio Nasional dan Gini Ratio Nasional di daerah perkotaan.
4. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja pada prinsipnya program yang dilaksanakan sama dengan program penanggulangan kemiskinan. Tambahannya berupa program pemantauan harga – harga barang pokok di Kota Bogor yang ditindak lanjuti dengan

operasi pasar apabila ditemukan fluktuasi harga karena penurunan pasokan barang pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan gula putih.

5. Perlunya penajaman penentuan sasaran bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu secara berkala dan berkualitas. Selain itu, diperlukan operasi pasar yang lebih rutin untuk mencegah penambahan pengeluaran Rumah Tangga Sasaran.

g. PDRB Per-Kapita (ADHB)

1. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,62 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,79 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.
2. Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2019 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 41,79 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6,14 persen. Penduduk di Kota Bogor tidak sedikit yang menjadi wirausaha. Rasio wirausaha terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor lebih tinggi daripada rasio ASN terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2010, rasio wirausaha terhadap penduduk adalah 13%, selanjutnya terus menurun, hingga 7,3% di tahun 2015. Selanjutnya meningkat kembali hingga tahun 2017, menjadi 10,6%. Sebagai daerah *buffer zone* dari ibukota, PDRB Kota Bogor dari tahun 2010 hingga tahun 2017 selalu meningkat, dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2012 ke tahun 2013, sebesar 23,26%. Selanjutnya, walaupun PDRB terus meningkat, tetapi lajunya semakin menurun hingga ke tahun 2017. Laju pertumbuhan dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8,77%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Laju pertumbuhan PDRB Per kapita ini menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (negeri dan swasta)	Sudah cukup jelas $\frac{200}{389} \times 100\%$ =51,42%	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	8.780 Siswa (100%)	sda	
		Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	233 siswa	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	239 pendidik	sda	
		Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	1.319 pendidik	sda	
		Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	494 pendidik	sda	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-	249 Orang	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	267 Sekolah	sda	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar	106.687 siswa	sda	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	84.351 siswa	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.677 pendidik	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.551 Orang	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	211 orang	sda	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	402 tenaga kependidikan	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.275 pendidik	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	277 Orang	sda	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	162 orang	sda	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi	113 sekolah	sda	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	59.270 siswa	sda	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	84,351 siswa	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	182 orang	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.139 Orang	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	125 orang	sda	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	102 Orang	sda	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.277 Orang	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	114 orang	sda	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	37 orang	sda	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	17 orang	sda	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.389 siswa	sda	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.262 Orang	sda	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	317 Orang	sda	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	153 Orang	sda	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	257 Orang	sda	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	32 Orang	sda	
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	21 RS	Dinas Kesehatan Kota Bogor	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	21 RS	sda	
2	Urusan Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) : 2.786 2. Tablet Tambah Darah : 1.760.940 3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil - Test Kehamilan : 19.566 - Pemeriksaan Hb : 19.566 - Pemeriksaan	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Golongan Darah : 19.566 buah - Pemeriksaan Glukoprotein Urine : 2.935 buah 4. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu : 19.566 buah 5. Buku KIA : 20.902 buah 1.Dokter :12 orang 2.Bidan :191 orang 3.Perawat:156 orang	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.Formulirpatrograf : 19.952 buah 2.Kartu Ibu (rekam medis) : 19.566 buah 3.BukuKIA : 19.566 buah 1.Dokter :12 orang	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar	2.Bidan :191 orang 3.Perawat:156 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Hepatitis B0 : 19.329 2. Vitamin K1 Injek : 19.329 3. Salep/ Tetes mata antibiotik : 19.329 4. Formulir Bayi Baru Lahir :19.329 5. Formulir MTBM : 57.987 6. Buku KIA : 20.902 1.Dokter :12 orang	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	2.Bidan :191 orang 3.Perawat:156 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku : 59.080 2.Formulir DDTK : 59.080 buah 3.Buku KIA : 36.757 buah 4.Vitamin A biru : 15792 buah 5.Vitamin A merah : 65.947 buah 6.Vaksin Imunisasi dasar HB0 : 18.168 BCG : 17.153 Polio : 66.507 IPV	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			: 3523 DPT-HB Hib : 49.378 Campak rubela :16.100		
			7. Vaksin Imunisasi Lanjutan DPT-HB Hib : 11.062 Campak Rubella : 9.187		
			8. Jarum Suntik dan BHP : 59. 080		
			9. Peralatan analfatik : 250		
			1.Dokter :12 orang		
			2.Bidan :191 orang		
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.Perawat:156 orang	sda	
			4.Gizi :47 orang		
			1. Buku Rapor Kesehatanku : 80.305 buah		
			2. Buku Pemantauan Kesehatan : 80.305 buah		
			3. Kuesioner Skrining Kesehatan : 80.305		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah : 80.305	sda	
			5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan usia Sekolah dan remaja di luar sekolah : 80.305		
			1. Dokter : 126 orang		
			2. Dokter gigi : 47 orang		
			3. Bidan : 191 orang		
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	4. Perawat : 156 orang	sda	
			5. Gizi : 47 orang		
			6. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 60 orang		
			1. Tas Kit : 50 buah		
			2. Alat ukur lingkar perut : 50 buah		
			3. Alat ukur tinggi badan : 50 buah		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4. Glucometer : 50 buah	sda	
			5. Alat ukut berat badan : 50 buah		
			6. Tensimeter : 50 buah		
			7. Tampon Tang		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			: 1 buah		
			8. Pinset anatomis ukuran 25cm : 1 buah		
			9. Lampu sorot : 1 buah		
			10. Waskom diameter 40cm : 1 buah		
			11. Mangkok kecil diameter 7,5cm : 1 buah		
			12. Box container untuk menampung Alat IVA : 1 buah		
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter PTM : 25 orang 2. Perawat PTM : 25 orang 3. Perawat Indra : 25 orang 4. Bidan IVA : 25 orang 5. Kader terlatih : 1.526 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.Strip Uji Pemeriksaan - Gula darah : 127.365 - Kolestrol : 127.365 2.Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) 3.Buku Kesehatan Lansia : 127.365	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter : 126 orang 2. Bidan : 191 orang 3. Perawat : 156 orang 4. Gizi : 47 orang 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 60 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Tas Kit : 50 buah 2. Alat ukur lingkar perut : 50 buah 3. Alat ukur tinggi badan : 50 buah 4. Alat ukur berat badan : 50 buah 5. Tensimeter : 50 buah	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter : 25 orang 2. Perawat : 25 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Alat fiksasi untuk tangan dan kaki yang aman. Alat fiksasi fisik dapat dibuat dari	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			bahan atau kain yang kuat tetapi halus seperti kain blacu. Manset fiksasi tersebut memiliki 2 tali pengikat, satu tali pengikat digunakan untuk mengikat manset, tali lainnya yang lebih kokoh digunakan untuk mengikat tempat tidur. Alat fiksasi disiapkan empat buah, masing-masing dua untuk lengan dan dua untuk tungkai : 50 buah.		
			2. Buku PPDGJ III : 25 buah		
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai Standar	1. Dokter Kesehatan Jiwa : 25 orang 2. Perawat Kesehatan Jiwa : 25 orang	sda	
		Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	- Jumlah BHP Catridge TCM : 2.800 Pot Dahak : 14.146 Pot Reagen ZN : 535 - Jumlah Media Banner TB : 25	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	Perawat : 19 orang Dokter : 5 orang Laboratorium : 25 orang Jumlah BHP : - Reagen HIV : 25.000 test - Alkohol Swab : 250 box - Plester : 30box - Jarum Vacutainer : 25.000 buah - Sput 3cc : 25.000 buah - Lanset : 250 box - Safety box : 250 buah - Tabung EDTA : 250 buah - Yellow Tips : 400 pax	sda	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	- Jarum Vacutainer : 25.000 buah - Sput 3cc : 25.000 buah - Lanset : 250 box - Safety box : 250 buah - Tabung EDTA : 250 buah - Yellow Tips : 400 pax	sda	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 34 orang Perawat : 34 orang RR : 15 orang Farmasi : 15 orang ATLM : 34 orang	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Pendampingan : 6 orang Penjangkauan : 7 orang		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	68,1 Ha		Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bogor
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	73,5 km	sda	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	sda	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	sda	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Tidak	sda	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	tidak	sda	
	Urusan Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	-	sda	
3.	Urusan Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	68,1 Ha	sda	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	73,5 km	sda	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	sda	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	sda	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	tidak	sda	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	tidak	sda	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota	-	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{48.150}{64.200} \times 100\%$ =75%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{16.728}{24.600} \times 100\%$ = 68%	sda	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{26.567}{42.850} \times 100\%$ = 62%	sda	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen	sda	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-	sda	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	PERUMDA Tirta Pakuan	sda	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	-	sda	
		Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	Tidak ada	sda	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	8.570 RT	sda	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	5.060 RT	sda	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	152.544 RT	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	8.570 RT	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	8.570 RT	sda	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	8.570 RT	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Kota Bogor tidak termasuk kategori tersebut dan tidak mempunyai target akses dasar	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{8.570}{212.784} \times 100\%$ = 4,03%	sda	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{5.060}{212.784} \times 100\%$ = 2,38%	sda	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{138.514}{212.784} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 65,10%		
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{3}{9} \times 100\%$	sda	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$= \frac{12 \frac{m^3}{hari}}{30 \frac{m^3}{hari}} \times 100\%$ = 40%	sda	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{5.060}{212.784} \times 100\%$ (RT)	sda	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	= 2,38% $\frac{8.570}{212.784} \times 100\%$ (RT)	sda	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{8}{34} \times 100\%$	sda	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	= 23,52% 900 IMB	sda	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada, Perda nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan	sda	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada, SK pembentukan TABG Kota Bogor	sda	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Harus berkoordinasi dengan Disparbud Kota Bogor	sda	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	Harus berkoordinasi dengan BKAD Kota Bogor terkait aset	sda	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	Harus berkoordinasi dengan BKAD Kota Bogor terkait aset	sda	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Harus berkoordinasi dengan BKAD Kota Bogor terkait aset	sda	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	719,385 km	sda	
		Panjang jalan yang dibangun	2.345,90 km	sda	
		Panjang jembatan yg dibangun	-	sda	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	15.449,06 km	sda	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	24.115,65 km	sda	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	30,76 km	sda	
		Panjang jalan yang dipelihara	9.605 km	sda	
		Panjang jembatan yang dipelihara	-	sda	
		Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	2017 = 1 2018 = 1 2019 = 1 2020 = 0 (Refocusing)	sda	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Tenaga Kerja Internal Dinas 2017 = 39 2018 = 41 2019 = 60 2020 = 0 (Refocusing)	sda	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tenaga Kerja Internal Dinas 2017 = 39 2018 = 41 2019 = 60 2020 = 0 (Refocusing)	sda	
		Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	sda	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tersedia di LPSE	sda	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tersedia di LPSE	sda	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	Tersedia di LPSE	sda	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedia di LPSE	sda	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedia	sda	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan	Tersedia 2017 = 1 2018 = 1 2019 = 1 2020 = 0	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	(Refocusing)		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tenaga Kerja Internal Dinas 2017 = 39 2018 = 41 2019 = 60 2020 = 0 (Refocusing)	sda	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tenaga Kerja Internal Dinas 2017 = 39 2018 = 41 2019 = 60 2020 = 0 (Refocusing)	sda	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	sda	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	IUJK sudah beralih ke DPMPSTSP pada Tahun 2018	sda	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/ kota	2016 = 119 2017 = 95 2018 = 40	sda	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota	Tidak Ada	sda	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/ Kota	-	sda	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/ Kota	Tersedia	sda	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	IUJK sudah beralih ke DPMPSTSP pada Tahun 2018	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Di DPUPR Kota Bogor Tugas dan Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi belum ada (masih setingkat eselon IV)	sda	Dinas Perumahan
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Nihil		Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	87	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	348	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	25	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	sda	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	25	sda	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Nihil	sda	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Nihil	sda	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Nihil	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	sda	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil	sda	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Nihil	sda	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	310,93	sda	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	16.207	sda	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	38,93	sda	
		Jumlah rumah di kab/kota	251.955	sda	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	16.207	sda	
		Jumlah rumah tidak layak huni	57.878	sda	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	Nihil	sda	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{343.860}{251.955} \times 100\% = 1,36\%$	sda	
		Jumlah rumah pembangunan baru	Nihil	sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	390	sda	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	58.500	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	390	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	58.500	sda	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Nihil	sda	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	390	sda	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Nihil	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Trantibumlinmas	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Nihil	sda	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Nihil	sda	
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	440 ----- x100% 480 = 91,7%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah total Linmas kota Bogor yang sudah terlatih dan dikukuhkan yaitu 427 anggota Linmas	sda	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan yang memuat sanksi sebanyak 54 Perda dan Perkada	sda	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS sebanyak 7 orang	sda	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum sebanyak 15 SOP	sda	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Sarana prasarana minimal yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 1649 item jenis barang	sda	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{492}{300} \times 100\%$ = 164 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{492}{300} \times 100\%$ = 164 %	sda	
Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{492}{300} \times 100\%$ = 164 %	sda			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{492}{320} \times 100\%$ = 153 %	sda	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{492}{320} \times 100\%$ = 153 %	sda	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{492}{600} \times 100\%$ = 82 %	sda	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{492}{600} \times 100\%$ = 82 %	sda	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{492}{600} \times 100\%$ = 82 %	sda	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{24}{24} \times 100\%$ (jam) = 100 %	sda	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{24}{24} \times 100\%$ (jam) = 100 %	sda	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{80}{100} \times 100\%$ = 80 %	sda	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{800}{1000} \times 100\%$ = 80 %	sda	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jumlah 123 Kejadian penyelamatan dan evakuasi non kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di wilayah kecamatan	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1. Sektor Sukasari (Kec Bogor Timur) 2. Sektor Yasmin (Kec Bogor Barat) 3. Sektor Cibuluh (Kec Bogor Utara) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) masing-masing 3 regu di 3 sektor pos damkar 1. Regu 1 2. Regu 2 3. Regu 3	sda	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di wilayah kelurahan 1. Sektor Sukasari (Kel Sukasari) 2. Sektor Yasmin (Kel Curug) 3. Sektor Cibuluh (Kel Cibuluh)	sda	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarana prasarana minimal yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebanyak 1649 item jenis barang	sda	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran yaitu sebanyak 38 Anggota	sda	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
6.	Sosial	daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 108 relawan			
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran yaitu sebanyak 38 Anggota 268 Layanan Disabilitas = 75 orang Anak terlantar = 61	sda		
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	orang Lanjut usia terlantar = 46 Gelandangan dan pengemis = 86 orang		Dinas Sosial Kota Bogor	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	268 orang	sda		
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 Tim	sda		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	268 orang	sda		
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 kendaraan	sda		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	268 orang	sda		
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Rumah Singgah	sda		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	268 orang	sda		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	75 orang	sda		
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2 Jenis	sda		
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1 Paket (berupa paket obat-obatan ringan)	sda		
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	0 orang (langsung	sda				



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	dibawa ke RS)		
			Tidak ada, Dinsos		
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	kerjasama denga RSUD dan RSMM	sda	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	3 Orang 1 orang pendamping disabilitas 1 orang PSM 1 orang Sakti Peksos	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	268 orang	sda	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Nihil	sda	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Nihil	sda	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.040 Jiwa	sda	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	350 Jiwa	sda	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Nihil	sda	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	300 Paket	sda	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	14 KK/ 57 Jiwa	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7.	Tenaga kerja	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	70 Orang Anggota Tagana	sda	
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 Buku Renacana Tenaga Kerja Daerah Kota Bogor Tahun 2017-2020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi Sda dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	Nihil	sda	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Nihil	sda	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{51}{51} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Nihil	sda	
		Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{11}{25} \times 100\%$ = 0,44 %	sda	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{25}{25} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Jumlah penganggur yang dilatih	40 orang	sda	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Nihil	sda	
		Persentase penyerapan lulusan	Nihil	sda	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	Nihil	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Nihil	sda	
Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Nihil	sda			
Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{100}{1834} \times 100\%$ = 5,45 %	sda			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). -2,32 – (11,85% + 3%) = -2,32 – 14,85 % $\frac{439}{455} \times 100\%$	sda	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	= 96 % $\frac{157}{121} \times 100\%$	sda	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	= 129 %	sda	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Jumlah SP/SB di perusahaan yang tercatat : 11 Jumlah Anggota : 3014 dari 11 SP/SB $\frac{263}{439} \times 100\%$	sda	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	= 59,9 %	sda	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{399}{1834} \times 100\%$ = 21,75 %	sda	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{25}{1834} \times 100\%$ = 1,3 %	sda	
		Jumlah mogok kerja	1 Perusahaan (PT Goodyear Indonesia, Tbk)	sda	
		Jumlah penutupan perusahaan	8Perusahaan a. CV Rumah Sedu b. CV Bina Sarana Industri c. PT Bangun Jaya Realty d. CV Abadi Raharja e. PT RawaDanau Ekowisata f. PT Mitra Karya Japindo g. Zoological Society	sda	
		Jumlah perselisihan kepentingan	3 Perselisihan	sda	
		Umlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada perselisihan antar SP/SB dalam 1 Perusahaan	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah perselisihan PHK	21 Perselisihan	sda	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	416 Pekerja/Buruh	sda	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	8 Perselisihan	sda	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS Tripartit Kota Bogor	sda	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	$\frac{8}{29} \times 100\%$ = 27 %	sda	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	1.511	sda	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4.572	sda	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	30	sda	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2 orang	sda	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	4	sda	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota	Nihil	sda	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	87	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Nihil	sda	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	5 orang	sda	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan yang diterbitkan	Nihil	sda	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Nihil	sda	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Nihil	sda	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Nihil	sda	
8	Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Nihil	Dinas Pemberdayaan	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Dan Perlindungan Anak			Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	Nihil	sda	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2 lembaga - P2TP2A - KPAID	sda	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{48 \text{ Anak}}{48 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$	sda	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga KPAID	sda	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Nihil	sda	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Nihil	sda	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{83 \text{ Wanita}}{83 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$	sda	
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Pertanian Kota Bogor
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	sda	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Tidak ada	sda	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	sda	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	sda	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	sda	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	sda	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	sda	
				Dinas	
				Penanaman	
		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	$\frac{2+4}{6} \times 100\% = 100\%$	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
10.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ absentee dan daftar subyek		sda	
		SK Bupati/Wali kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee		sda	
		Dokumen Izin membuka tanah		sda	
		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota		sda	
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota		sda	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap :	IKA = 56,33	Dinas	
		a. Indeks Kualitas Air (IKA)	ITH = 36,32	Lingkungan	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 80,09	Hidup Kota Bogor	
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)			
11.	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 522 ton/hari 2. 834 ton/hari	sda	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{63}{63} \times 100\% = 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{6}{63} \times 100\%$ = 9,52 %	sda	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{120}{390} \times 100\%$ = 30,77 %	sda	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{15}{15} \times 100\%$ = 100 %	sda	Dinas
	Administrasi Kependudukan	Penerbitan akta perkawinan	30 %	sda	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
12.		Penerbitan akta perceraian	19%	sda	
		Penerbitan akta kematian	52%	sda	
		Penyajian data kependudukan	51%	sda	Dinas
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Nihil	sda	Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
13.		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Nihil	sda	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Nihil	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Nihil	sda	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Nihil	sda	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Nihil	sda	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Nihil	sda	
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	sda	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{f} \times k = 16,42$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	sda	Data Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{32.931}{85.672} \times 100\% = 38,44 \%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	13 stakeholders	sda	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{55}{114} \times 100\%$ = 48,25 %	sda	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{113.924}{147.157} \times 100\%$ = 77,42 %	sda	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	775 Kelompok	sda	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{1.347}{17.625} \times 100\%$ = 7,64 % KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	sda	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/ Kota. Data/ informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/ Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah Kecamatan Bogor Tengah Kesertaan KB = 74,79%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah Unmet need =		
			1.681		
			$\frac{113.392}{249.332} \times 100\%$	sda	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	= 45,69 %		
			$\frac{12}{32} \times 100\%$	Dinas	
		Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	= 37,5 %	Perhubungan Kota Bogor	
			$\frac{19.548}{15.490} \times 100\%$	sda	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	= 79,24 %		
15.	Perhubungan	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Rp. 3.500,-	sda	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	79,74%	sda	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	79,74%	sda	
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{134}{139} \times 100\%$ = 96 %	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{116}{139} \times 100\%$ = 83 %	sda	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Ya	sda	
16.	Komunikasi Informasi Statistik Persandian		Nihil	sda	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi	$\frac{7}{36} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	= 19,44 %		
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{243}{243} \times 100\%$ (aplikasi)	sda	
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	= 100 %		
			$\frac{7}{36} \times 100\%$	sda	
		Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	= 19,44 %		
			$\frac{0}{36} \times 100\%$	sda	Aplikasi dari pusat sedang perbaikan
			= 0 %		
			Bapenda (SIM BPHTB-BPN)		
			DISDUKCAPIL (e-Menanduk-SIAK Kemendagri)		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	HUKUM (JDIH)	sda	
			Jumlah Layanan Publik: 193 Jumlah Layanan Administrasi : 48		
			$(3/193+48) \times 100\% = 1.24\%$		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{6}{36} \times 100\%$	sda	
			= 16 %		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{6}{36} \times 100\%$	sda	
			= 16 %		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{36}{36} \times 100\%$	sda	
			= 100 %		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{4557}{6020} \times 100\%$	sda	
			= 76 %		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{36}{36} \times 100\%$	sda	
			= 100 %		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{12}{22} \times 100\%$	sda	
			= 19,44 %		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government (Ada atau Tidak ada):	1 (ada) 2 (ada)	sda	1. Peraturan Daerah Penyelenggaraan



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi <p>2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab 			<p>Informatika dan Komunikasi Nomor 9 Tahun 2018</p> <p>2. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government</p> <p>3. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 tentang Standarisasi Pembuatan Aplikasi</p> <p>5. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Domain</p> <p>6. Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor</p> <p>7. Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor</p> <p>8. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Smart City Kota Bogor</p>
		<p>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota</p>	$\frac{809.071}{1.081.009} \times 100\% = 78,84 \%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					9. Peraturan Walikota Nomor 108 Th 2020 tentang Pemanfaatan Aplikasi Jejak dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bogor
					10. SOP Pengaduan Masyarakat Nomor 180/001/e-gov/diskominfostandi
					11. SOP Kegawat Daruratan Nomor 180/002/e-gov/diskominfostandi
					12. SOP Peliputan Nomor 180/003/egov/diskominfostandi
					13. SOP Pemasangan Jaringan Nomor 180/005/e-gov/diskominfostandi
					14. SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan Nomor 180/006/e-gov/diskominfostandi
					15. SOP Penanganan Gangguan Jaringan Nomor 180/007/e-gov/diskominfostandi
					16. SOP Pemeliharaan Jaringan Nomor 180/008/e-gov/diskominfostandi
					SOP Pengembangan



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Aplikasi Nomor 180/009/e-gov/diskominfostandi
					13. SOP Keamanan Jaringan Nomor 180/004/e-gov/diskominfostandi
					14. SOP Pemasangan Jaringan Nomor 180/005/e-gov/diskominfostandi
					15. SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan Nomor 180/006/e-gov/diskominfostandi
					16. SOP Penanganan Gangguan Jaringan Nomor 180/007/e-gov/diskominfostandi
					17. SOP Pemeliharaan Jaringan Nomor 180/008/e-gov/diskominfostandi
					18. SOP Pengembangan Aplikasi Nomor 180/009/e-gov/diskominfostandi
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{40}{40} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{35}{41} \times 100\%$ = 85 %	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya buku profil daerah	Ada	sda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4.557 Data	sda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Nihil	sda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Nihil	sda	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase kelengkapan meta data indikator sektoral	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Nihil	sda	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{164}{194} \times 100\%$ = 84 %	sda	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori renda	Nihil	sda	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{28}{28} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
17.	Koperasi Dan Usaha Kecil	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1 \text{ koperasi}}{1 \text{ koperasi}} \times 100\%$ = 100 %	sda	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{30 \text{ koperasi}}{891 \text{ koperasi}} \times 100\%$ = 3,36 %	sda	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh	$\frac{30 \text{ koperasi}}{891 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 3,36 %		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{450}{105.782} \times 100\%$ (orang)	sda	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 0,43 %		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{30 \text{ koperasi}}{891 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 0,43 %		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{20 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	= 3,44 %		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$\frac{50 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 8,60 %		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{63 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 10,84 %		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{50 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 8,60 %		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{5 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 0,86 %		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{110}{891} \times 100\%$ (koperasi)	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 12,35 %		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{5 \text{ koperasi}}{581 \text{ koperasi}} \times 100\%$	sda	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	= 0,86 %		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	-	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	-	sda	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	-	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18.	Penanaman Modal	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-	sda	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	-	sda	
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	100%	sda	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Nihil	sda	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Nihil	sda	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Nihil	sda	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Nihil	sda	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	sda	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	sda	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Laporan realisasi penanaman modal	Nihil	sda	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat serta kabupaten/kota	100%	sda	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Nihil	sda	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	100%	sda	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	245	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	Melalui kegiatan Dispora Youth Preuner Academy
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Nihil	sda	Dispora tidak memberikan bantuan kewirausahaan
		jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6	sda	Pelatihan Paskibra Kota



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Bogor
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Nihil	sda	Tidak ada kegiatan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	158	sda	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Nihil	sda	Tidak adanya event olahraga dikarenakan adanya pandemi covid-19
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	47	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	47	sda	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	18	sda	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	180	sda	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	47	sda	
		Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	18	sda	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar Kab/Kota dengan dukungan data	Nihil	sda	
		Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2	sda	
		Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	25	sda	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6	sda	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Nihil	sda	
		peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			
20.	Kebudayaan				



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
21.	Perpustakaan	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Nihil	sda	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Nihil	sda	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota	1	sda	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	sda	
		Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	1	sda	
		Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	141	sda	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	180	sda	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Nihil	sda	
		Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Nihil	sda	
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	7,30	sda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor
		Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,90	sda	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	17	sda	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	sda	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	sda	
22.	Kearsipan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Belum ada	sda	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Belum ada	sda	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Belum ada	sda	
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	98,11%	sda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	52,89%	sda	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Nihil	sda	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Arsip Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelamatan Arsip	sda	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	atau Pembubaran Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelamatan Arsip	sda	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	atau Pembubaran Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor	sda	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	Belum Ada	sda	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Belum Ada	sda	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	Belum Ada	sda	
		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Nihil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
23.	Kelautan dan Perikanan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$	sda	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang pembudidayaan ikan yang usahanya Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Nihil	sda	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan	654	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
24.	Pariwisata	pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	10.156.800 ekor	sda	
		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	20	sda	Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	175	sda	<p>kunjungan ke destinasi pariwisata Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuma • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Nihil	sda	Bisa sebagai peserta atau penyelenggara Dibuktikan
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Nihil	sda	dengan dokumen pendukung terkait
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Nihil	sda	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	sda	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
		Persentase tenaga kerja di sektor	100 x100%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		parwisata yang disertifikasi	30.112		
			= 0,33 %		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{979}{20.325} \times 100\%$	sda	
			= 4,82 %		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	8	sda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	475		
		Prasaran pertanian yang digunakan	0	sda	
25.	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	0	sda	
		Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{0}{0} \times 100\%$ =0%	sda	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Nihil	sda	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Nihil	sda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Nihil		
26.	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Nihil	sda	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Nihil	sda	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Nihil	sda	
27.	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Nihil	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	100%		
28.	Perdagangan	Persentase penerbitan TDG	0%	sda	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0%	sda	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	a. 100%		
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	b. 0%	sda	
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	c. 0%		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
29.	Perindustrian	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			
		Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	sda	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0%	sda	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0%	sda	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4%	sda	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	46,02%	sda	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	10,81%	sda	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	70,85%	sda	
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Nihil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30%	sda	
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	29,41%	sda	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan	Nihil	sda	
30.	Transmigrasi	Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	Nihil	sda	
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Nihil	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Nihil	sda	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Nihil	sda	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{19.035}{37.260} \times 100\%$ = 51,087 %	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{110.205}{108.800} \times 100\%$ = 101,291 %	sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{48.379}{54.972} \times 100\%$ = 88,007 %	sda	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0	sda	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{2905}{1.112.081} \times 100\%$ = 0,261 %	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{18}{21} \times 100\%$ = 85,714 %	sda	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{19.566}{20.902} \times 100\%$ = 93,608 %	sda	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{18.583}{19.952} \times 100\%$ = 93,139 %	sda	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{18.677}{19.329} \times 100\%$ = 96,627 %	sda	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{59.080}{74.935} \times 100\%$ = 78,842 %	sda	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	$\frac{40.924}{80.305} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan kesehatan sesuai standar	= 50,961 %		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{140.613 \times 100\%}{748.791}$ = 18,779 %	sda	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{76.666 \times 100\%}{127.365}$ = 60,194 %	sda	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{53.635 \times 100\%}{77.938}$ = 68,818 %	sda	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{17.431 \times 100\%}{19.694}$ = 88,509%	sda	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.376 \times 100\%}{1.556}$ = 88,432 %	sda	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{3.352 \times 100\%}{3.220}$ = 104,099 %	sda	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{13.306 \times 100\%}{13.900}$ = 95,727 %	sda	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{33,03}{68,10} \times 100\%$ = 48,502 %	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	- (Bogor tidak memiliki daerah pantai)	sda	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{154,24}{220,34} \times 100\%$ = 70,001%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{163.798 RT}{212.784 RT} \times 100\%$ = 76,979 %	sda	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{152.144 SR}{212.784 RT} \times 100\%$ = 71,502 %	sda	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{593}{900} \times 100\%$ = 83,467%	sda	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{600.446}{719385} \times 100\%$ = 83,467%	sda	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{140}{70} \times 100\%$ = 70%	sda	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{271}{271} \times 100\%$ = 100%	sda	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{389}{933} \times 100\%$ =141,693 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Penduduk Kota Bogor	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0	sda	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{38,93}{310,93} \times 100\%$ =12,521	sda	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{57878}{251955} \times 100\%$ =22,972 %	sda	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{17.229}{251.955} \times 100\%$ =6,838 %	sda	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	440 ----- x100% 480 = 91,667%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{54}{54} \times 100\% = 100\%$	sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	242.417	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	219.167	sda	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{2.795}{1} = 279500$	sda	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{72 + 72}{73} \times 100\% = 197,26\%$	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap < 15 Menit	sda	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{268}{268} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial Kota Bogor	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{1.040}{2.032} \times 100\% = 51,181\%$	sda	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{11}{16} \times 100\% = 68,75\%$	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{85.106}{486.867} \times 100\% = 17,48\%$	sda	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{32.250.502.080}{486.867} \times 100\% = 66,24\%$ $\frac{2.250.502.080}{31.508.740.532} \times 100\% = 64,72\%$	sda	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS)	$\frac{1.505}{1.834} \times 100\% = 82,061\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{965}{4.572} \times 100\% = 21,107\%$	sda	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{12.019.301.200}{1.271.941.031.429.19} \times 100\% = 0,945\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{48}{317123} \times 100\%$ (Orang) = 0,015 %	sda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{83}{521.279} \times 100\%$ (Orang) = 15,9 %	sda	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{8.183}{17415265186} \times 100\%$ kg/th = 0,005%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{98.387 + 48.643}{277.817} \times 100\% = 52,923\%$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Nihil	sda	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{98.387 + 48.643}{277.817} \times 100\% = 53\%$	sda	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Nihil	BPN Kota Bogor	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Nihil	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	20 Kasus	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH = (56,33X30%) + (80X30%) + (36,32X40%)	Dinas Lingkungan Hidup Kota	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			IKLH = 55,45	Bogor	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$= \frac{522}{676,156} \times 100\%$ $= 77,201\%$	sda	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$= \frac{128}{148} \times 100\%$ $= 86,486\%$	sda	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{738260}{755572} \times 100\%$ $= 97,709 \%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{66719}{308253} \times 100\%$ $= 21,644 \%$	sda	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{257936}{334599} \times 100\%$ $= 77,088 \%$	sda	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{7}{35} \times 100\%$ $= 20 \%$	sda	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Nihil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Nihil	sda	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $= 1,24 \text{ (Data Disdukcapil)}$ $ASFR_i = \frac{b_i}{f} \times k$ $= 2.135 \text{ (Usia 15-49 tahun)}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			(Data Disdukcapil)		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{113.942}{147.157} \times 100\%$ = 77,429 %	sda	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,77	Dinas Perhubungan Kota Bogor	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 79,74% Hari Kerja = 0,53 Hari Libur = 0,52	sda	
16	Komunikasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{140}{193} \times 100\%$ = 75,539%	sda	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{809.071}{1081} \times 100\%$ = 78,84%	sda	
	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	sda	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{36}{36} \times 100\%$ = 100%	sda	
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{395}{5} \times 100\%$ = 79000%	sda	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{213}{891} \times 100\%$ = 23,906%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Masyarakat Kota Bogor	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{374}{39930} \times 100\%$ = 0,937%	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{1,60-2,64}{2,64} \times 100\%$ = -39%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{3,286}{235.206} \times 100\%$ =1,397 %	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{10,192}{235.206} \times 100\%$ =4,3 %	sda	
		Peningkatan prestasi olahraga	0 Medali	sda	
20	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{31}{485} \times 100\%$ =6,392%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
21	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	3,08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60	sda	
22	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	22471,75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	sda	
23	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	5.150,99 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
24	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Nihil	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	$\frac{(3.382.638-8.8709.412)}{8.709.412} \times 100\%$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= -61,161 %		
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{910938}{2118460} \times 100\%$ = 43 %	sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2.204	sda	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	140.292.952.222 (Nov 2020)	sda	
25	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{14.833}{1.107} \times 100\%$ = 13,40 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{429-358}{358} \times 100\%$ = 19,832 %	sda	
26	Energi dan Sumber Daya mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Nihil	Nihil	
27	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{127}{603} \times 100\%$ = 21,061%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{195}{223} \times 100\%$ = 87,44%	sda	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{48519}{448457} \times 100\%$ = 10,819%	sda	
28	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{6}{85} \times 100\%$ = 7,059 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	30	sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	$\frac{25}{85} \times 100$	sda	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	=29,41%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Nihil	sda	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	Nihil	sda	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) = 7 - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) = 6 - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) = 1290 <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) = Nihil - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) = Nihil 	sda	



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	34,114%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	Tercapai
		Rasio PAD	1,67%	Badan Pendapatan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat Daerah Kota Bogor	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	sda	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	76,81%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	Opini Laporan Keuangan	WTP	sda	Tercapai
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Sekretariat Daerah Kota Bogor	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2,5%	sda	
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	67%	sda	Tercapai
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1640}{1581} \times 100\% = 103,732\%$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{336}{3221} \times 100\%$	sda	



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			=10,432%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>336</u> x 100% 336	sda	
			=100%		
		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	9,61%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	19,47%	sda	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	sda	
4			<u>327500388676</u> x 100%		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	252650499919	sda	
			=12963		
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	<u>2871218762599</u> x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	
5			2516504949919		
			=100%		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	<u>12</u> x 100% 12	sda	
			=100%		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2020 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2020 merupakan kinerja tahun pertama RPJMD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-

2024. Adapun capaian kinerja utama Pemerintah Kota Bogor tahun 2020 yang diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

MISI 1

A. Sasaran I Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya berkesinambungan, terpadu dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Derajat Kesehatan dimaksud diukur melalui Angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yaitu dengan mendorong upaya pelayanan Kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu.

Berbagai upaya yang dilaksanakan yaitu melalui:

- peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan;
- peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- standarisasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan;
- menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan;
- Peningkatan ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan Kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas Kesehatan sesuai dengan standar;
- Kolaborasi pembiayaan Kesehatan masyarakat;
- Penyediaan pelayanan Kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir	73,08	73,12	100,18	73,15	73,41	100,36	73,69	73,61	99,89	74,91	98,26
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang Kesehatan.

Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih ditingkatkan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang.



Sumber : BPS Jawa Barat (2020)

Mulai tahun 2015 – 2020 angka harapan hidup di Kota Bogor mengalami peningkatan. Meskipun belum mencapai target, capaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0.20 dibanding tahun 2019 yang mencapai 73,41 tahun. Peningkatan itu menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan target Angka Harapan Hidup dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui Program Nga EMAS (Expanding Maternal & Neonatal Survival), namun dikarenakan

- adanya Pandemic-Covid 19 pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan bulan maret;
- b) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada balita melalui pembinaan tumbuh kembang balita, remaja dan lansia melalui Peer Conselor, Pos Pelayanan terpadu, namun dikarenakan adanya Pandemic-Covid 19 pelaksanaan kegiatan hanya bisa dilaksanakan sampai dengan bulan maret;
 - c) Perbaiki gizi pada balita dan ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan, serta kegiatan inovasi Tanggap Leungitkeun Stunting Ti Kota Bogor (Taleus Bogor), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - d) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - e) Standarisasi sarana dan pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan pelayanan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - f) Pemberian jaminan kesehatan kepada penduduk miskin;
 - g) Pelayanan kunjungan rumah masyarakat dengan Bogor Anjang Sehat (BAS);
 - h) Perbaiki lingkungan sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - i) Pencegahan dan pengendalian penyakit baik penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit berbasis lingkungan.

Adanya Pandemi-Covid 19 yang menimpa berbagai negara termasuk Indonesia mulai awal bulan maret 2020 yang disebabkan oleh penyebaran virus corona menyebabkan tingginya penyebaran kasus virus corona di berbagai daerah, serta sangat berdampak pada perekonomian. Hal tersebut merupakan salah satu kendala untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bogor dimana anggaran lebih difokuskan untuk penanganan Pandemi-Covid 19 sehingga target tahun 2020 belum bisa tercapai.

B. Sasaran II Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya



mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain agar setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit, mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga serta anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi.

Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya Kesehatan promotif, preventif dan meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pemberdayaan olahraga pada masyarakat. Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yaitu:

- a. Melaksanakan advokasi pembangunan berwawasan Kesehatan;
- b. Melaksanakan kemitraan dengan kelompok Kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau; serta
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi secara berkelanjutan.

Sasaran meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
% Rumah Tangga Ber-PHBS	70	65,45	93,50	72	65,8	91,39	68	66,3	97,50	72	92,08
Angka Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	-	0,45	-	-	0,46	-	0,45	0,39	86,7	0,53	73,58
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Rumah Tangga ber-PHBS ditentukan berdasarkan pencapaian 10 indikator. Apabila ada satu atau dua indikator yang tidak terpenuhi, maka rumah tangga

tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak atau belum ber-PHBS. Pada tahun 2019 pendataan PHBS RT dilakukan oleh kader kesehatan/ PHBS di 25 puskesmas, 68 kelurahan serta di seluruh rumah tangga yang ada di kota Bogor. Apabila di 1 rumah tangga terdiri lebih dari 1 KK (kepala keluarga), maka diambil KK yang memiliki indikator PHBS terlengkap. Untuk mengetahui jumlah Rumah Tangga ber-PHBS, maka setiap tahun dilakukan pendataan dengan mempergunakan dana APBD maupun APBN. Pendataan dilakukan oleh kader yang telah dilatih tentang PHBS RT. Pada tahun 2020 pendataan dilakukan terhadap 204.372 KK dengan RT yang telah ber-PHBS sebesar 135.463 (66.3%). Hasil pendataan memberikan gambaran pencapaian PHBS RT sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Rumah Tangga ber PHBS per Kecamatan
Tahun 2016 s/d 2020

No.	Kecamatan	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Tanah Sareal	69,6	70,2	70,0	68,9	70,08
2	Bogor Tengah	50,5	52,4	50,7	50,9	62,9
3	Bogor Timur	64,5	65,7	60,1	59,7	65,3
4	Bogor Utara	66,1	67,4	67,1	68,1	67,7
5	Bogor Selatan	58,8	60,9	68,8	67,0	57,0
6	Bogor Barat	65,6	69,2	65,3	69,0	70,08
	Kota Bogor	65	65,2	65,5	65,8	66,3
	Target	64	65	66	72	68

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2020)

Tabel 2.3
Capaian 10 Indikator PHBS RT Tahun 2017 s/d 2020

No	Indikator PHBS	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	88,9	91,6	94,3	94,4
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	70,1	81,7	73,7	68,4
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	89,8	90,5	91,1	83,7
4	Menggunakan air bersih	97,6	96,6	97,7	95,5
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	81,2	94,1	96,6	96,3
6	Menggunakan jamban sehat	86,9	84,8	85,3	83,4
7	Memberantas jentik nyamuk	95,7	93,9	96,1	94,8
8	Makan sayur dan buah setiap hari	92,8	93,3	92,2	92,5
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	93,5	92	94,5	93,5
10	Tidak merokok di dalam rumah	63,8	62,6	64,6	67,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor (2020)



Persentase Rumah Tangga ber-PHBS pada tahun 2020 belum mencapai target. Namun pencapaian masing-masing indikator meningkat dibanding dengan pencapaian tahun 2019. Pencapaian yang belum maksimal karena terkendala beberapa hal sebagai berikut:

- a. Di beberapa wilayah, kesadaran masyarakat untuk ber PHBS belum optimal. Terutama pada indikator ASI Eksklusif (0-6 bulan) yang hanya mencapai 68.4% atau turun 5.3% dibanding tahun 2019). Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang asi eksklusif, pemberian asi eksklusif hanya 3 bulan dikarenakan ibu yang bekerja, masih adanya mitos memberikan ASI dapat menyebabkan payudara yg kendur, serta tidak keluarnya asi dari awal kelahiran sehingga bayi langsung diberi susu formula. Selain itu juga disebabkan adanya pandemic Covid-19 sehingga kurangnya pendataan lewat posyandu.
- b. Masih rendahnya realisasi indikator tidak merokok di dalam rumah sebesar 67,5% karena Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya merokok didalam rumah khususnya bahaya asap rokok bagi perokok pasif, Perilaku atau kebiasaan yang sulit diubah.
- c. Beberapa wilayah pencapaian PHBS Tatanan Rumah Tangga menunjukkan peningkatan dimana untuk tahun 2020 sudah tidak terdapat kelurahan yang termasuk PHBS I zona merah, terdapat 8 kelurahan yang masuk ke PHBS II zona kuning, terdapat 53 kelurahan yang masuk ke PHBS III zona hijau dan 7 kelurahan yang masuk ke PHBS IV zona biru. Peningkatan tersebut dicapai melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun tokoh masyarakat atau kader yang sudah dilatih. Selain itu kesadaran dan peran serta masyarakat meningkat serta sarana prasarana untuk ber PHBS di beberapa wilayah dimanfaatkan secara optimal. Sarana prasarana dimaksud adalah air bersih untuk cuci tangan, penyediaan disinfektan, jamban sehat, dan lain-lain juga pemakaiannya meningkat setelah adanya pandemic-covid 19.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mencapai indikator tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan Ngariung Sehat yang telah dilaksanakan dari tahun 2019 dan menjadi program inovasi dalam meningkatkan persentase rumah

tangga ber PHBS. Tahun 2020 Kegiatan Ngariung Sehat telah dilaksanakan di 6 lokus di masing-masing kecamatan untuk mengetahui permasalahan di wilayahnya dan adanya solusi dari permasalahan tersebut sehingga cakupan PHBS RT menjadi meningkat.

- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader PHBS RT di tingkat Kota dalam rangka pembinaan, pendataan PHBS di tatanan RT secara online;
- c. Jejaring kemitraan dengan komunitas muda (Duta Muda Sehat, Saka Bhakti Husada) dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kesehatan ke RT secara online;
- d. Melibatkan peran UKBM (Kel Siaga, RW Siaga, Posyandu, posbindu, RW Siaga Covid dll) dalam mendukung penerapan PHBS RT di wilayahnya masing-masing;
- e. Kerjasama dan kemitraan dengan PKK kota, kecamatan dan kelurahan dalam kegiatan pembinaan PHBS RT;
- f. Pengembangan program-program inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian cakupan PHBS melalui Ngariung Sehat, Kampung Germas, Kampung Taleus;
- g. Penyediaan sarana-sarana informasi kesehatan terkait promotif preventif /PHBS melalui media cetak, mural, media elektronik, billboard, dll; serta
- h. Kampanye ke masyarakat luas terutama wilayah yang menjadi lokasi lomba atau memiliki masalah kesehatan terutama terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus Covid 19.

Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Tangga ber-PHBS antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan kader akan pentingnya ASI Eksklusif dan bahaya rokok;
- b. Melakukan kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya kepada masyarakat luas dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi terkait program inovasi “Ngariung Sehat” dalam mengatasi permasalahan kesehatan dengan melibatkan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang sama;



- d. Meningkatkan jumlah lokus terkait program inovasi “Ngariung Sehat” dalam intervensi masalah PHBS serta meningkatkan cakupan PHBS di masyarakat;
- e. Penguatan, monitoring dan evaluasi implementasi Germas di OPD / instansi pemerintah dengan melibatkan lintas sektor terkait;
- f. Menggunakan data PIS-PK untuk melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan setiap keluarga atau KK;
- g. Melibatkan generasi muda (SBH, Duta Muda Sehat, Relawan Bogoh ka Bogor, Karang taruna, dll) untuk melakukan penyuluhan di masyarakat;
- h. Integrasi dengan Seksi Gizi dalam program inovasi Taleus Bogor;
- i. Pembentukan komunitas warga tanpa rokok di semua wilayah, tidak hanya pada lokasi lomba; dan
- j. Melakukan kemitraan dengan Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan peran kader Dasawisma dalam pembinaan dan peningkatan PHBS di setiap rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Satu kader dasawisma bertanggungjawab terhadap 10-15 rumah tangga.

Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (APMO) menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Pengukuran APMO dilakukan oleh tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) melalui survey terhadap masyarakat yang berusia diatas 7 tahun yang terdiri dari strata pelajar/mahasiswa, PNS/TNI/POLRI/BUMN, pegawaiswasta, wiraswasta/wirausaha, petani/nelayan dan lainnya dengan sampel sebesar 10% dari setiap strata. Pelaksanaan survey tahun 2020 dilakukan pada 2 kecamatan yaitu kecamatan bogor utara dan kecamatan bogor timur sesuai domisili SP3OR dan diperoleh Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga sebesar 0,39. Capaian tersebut menurun dari tahun 2019 yaitu 0,46. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 dimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau untuk melaksanakan *physical distancing*, sehingga berdampak banyak yang berubah dari cara hidup masyarakat sehari-hari. Setiap orang secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, beribadah termasuk dalam berolahraga. Tempat-tempat olahraga seperti GOR, lapangan, serta fasilitas olahraga lainnya ditutup untuk menghindari terjadinya kerumunan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona.

Berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2020 untuk peningkatan prestasi dan pemasyarakatan olahraga, yaitu:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi melalui:
 - 1) koordinasi dan kerjasama lintas dektoral dan antar tingkat pemerintahan;
 - 2) peningkatan potensi sumberdaya olahraga tingkat kota dan prestasi olahraga di tingkat kota dan nasional;
 - 3) penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui:
 - 1) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - 2) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- c. Pengelolaan olahraga melalui:
 - 1) peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan
 - 2) pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, sanggar olahraga, dan sentra pembinaan olahraga.
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Kota dan Propinsi dalam rangka penguatan fondasi bangunan olahraga nasional;
 - 2) Fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - 3) Pembinaan olahragawan andalan nasional.
- f. Pemberdayaan Olahraga Profesional, melalui:
 - 1) Pembinaan organisasi olahraga profesional dan pengembangan tenaga profesional keolahragaan;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian olahraga professional.
- g. Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga, yaitu:
 - 1) Perencanaan pembangunan sarana prasarana olahraga di setiap kecamatan;

- 2) Inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat kota, desa dan kelurahan;
 - 3) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
- h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat, melalui:
- 1) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan;
 - 2) Mediasi masyarakat dalam berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga;
 - 3) Advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang keolahragaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.

Gambar II.1
Kegiatan Peningkatan SDM keolahragaan



Gambar II.2
Kegiatan Pemberian Penghargaan Insan Olahraga



C. Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 163 ayat 1 mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi Kesehatan.

Kondisi kualitas lingkungan sehat di perumahan dan permukiman dapat diukur melalui indikator persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan kawasan kumuh kewenangan kota dan persentase reduksi sampah.

Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman yaitu:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman melalui penyediaan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perkotaan, peningkatan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas, serta peningkatan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan system air limbah yang layak melalui penyediaan system air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat, serta menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh, standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman, pengembangan dan pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat, pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang berorientasi



pada mitigasi resiko bencana, serta akselerasi pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
% Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman	94,62	91,98	97,21	98,95	92,83	93,82	93,15	76,98	82,64	100	76,98
% Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak	67,26	67,21	99,93	67,58	64,14	94,91	67,47	70,90	105,08	73,03	97,08
% Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Kota	-	-	-	-	-	-	2,44	2,30	105,74	1,77	70,06
% Reduksi Sampah	4,4	6,26	142,27	4,7	6,89	146,60	6,4	7,61	118,91	7,2	105,69
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang Aman tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76,98% dari target sebesar 93,15%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan dan perpipaan. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan, merupakan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kegiatannya adalah membangun infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Rumah yang terlayani jaringan perpipaan, sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 154.623 RT, dan yang terlayani jaringan air bersih non perpipaan sebesar 9.175 RT Dengan demikian jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih melalui non perpipaan maupun perpipaan mencapai 163.794 RT dari jumlah keseluruhan 212.784 RT. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, capaian tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari 92,83% turun menjadi 76,98%. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan, semula untuk 1 rumah terdiri dari 6 jiwa (berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum), sedangkan tahun 2020 berdasarkan standar yang digunakan dalam Juklak Juknis dari BPPPSPAM yaitu untuk 1 rumah terdiri dari 5 jiwa.

Tabel 2.4
Rumah Tangga yang Dilayani Air minum yang Aman per Kecamatan

Kecamatan	PDAM		Non PDAM		Jumlah Keseluruhan	
	Jiwa	RT/KK	Jiwa	RT/KK	Jiwa	RT/KK
Bogor Selatan	148.362	29.672	10.834	2.167	159.196	31.839
Bogor Timur	77.210	15.442	3.312	662	80.522	16.104
Bogor Tengah	87.244	17.449	1.603	321	88.847	17.769
Tanah Sareal	154.842	30.968	9.643	1.929	164.485	32.897
Bogor Utara	142.194	28.439	9.004	1.801	151.198	30.240
Bogor Barat	163.265	32.653	11.479	2.296	174.744	34.949

Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2020)

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pelayanan air minum yang aman baik yang melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan yaitu:

- Meningkatkan akses aman air minum;
- Penambahan jumlah pelanggan, dengan menekankan pemicuan dan sosialisasi;
- Pengembangan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan;
- Dukungan pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, dan dana lainnya yang sah; dan
- Jaminan ketersediaan air baku.

Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak dapat terealisasi 70.90% dari target 67,47%. Capaian tersebut diperoleh dari total 208.345 sambungan rumah, yang dapat terlayani sebesar 147.716 sambungan rumah. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 bahwa Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui standar teknis SPM yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, dan mutu pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan SPALD-T skala Permukiman di satu lokasi yaitu Kelurahan Katulampa yang melayani 20 sambungan rumah, serta penambahan sambungan rumah di SPALD-T Skala Permukiman yang telah terbangun yaitu di Kelurahan Bondongan sebanyak 20 sambungan rumah dan di Kelurahan Tajur sebanyak 17 sambungan rumah.

Gambar II.3
Pembangunan SPALDT Skala Permukiman di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur



Gambar II.4
Penambahan sambungan rumah di 2 lokasi yaitu di Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur



Upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian target tahun 2020 yaitu:

- Mengembangkan perencanaan pengelolaan air limbah domestik skala kawasan/permukiman dan skala kota;
- Mengembangkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
- Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan;
- Meningkatkan pemahaman pengelolaan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- Optimalisasi sarana dan prasarana air limbah domestik untuk memenuhi SPM

- f. Mengembangkan pola Kerjasama pengelolaan air limbah domestik dengan sektor swasta atau sumber alternatif pendanaan lainnya;
- g. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik melalui kegiatan pemicuan STBM maupun sosialisasi/edukasi lainnya; dan
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga.

Selain berbagai upaya diatas, dilakukan juga berbagai strategi dalam pengembangan air limbah domestik melalui penyiapan perencanaan maupun penyusunan peraturan daerah berupa penyusunan dokumen perencanaan dengan melaksanakan review rencana induk serta DED pengelolaan air limbah domestik, dan melaksanakan penyusunan/review kebijakan daerah mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik serta menyiapkan peraturan-peraturan turunan kebijakan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 653.45-282 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh, bahwa luasan kawasan kumuh di Kota Bogor sebesar 511,84 ha dan luasan kawasan kumuh kewenangan kota sebesar 310,93 ha. Pada Tahun 2020, luas kawasan kumuh yang berhasil diintervensi yaitu sebesar 38,93 ha sehingga persentase luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota dapat terealisasi sebesar 2,30% dari target 2,44%. Capaian tersebut diperoleh dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Pada tahun 2020, Kota Bogor mendapatkan bantuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pemberian IBM pada 12 Kelurahan yaitu Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Semplak, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Sempur, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Ciparigi, dan Kelurahan Kedung Jaya.



Tabel 2.5
Total Luas Kawasan Kumuh Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Total Luas Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Hasil Intervensi (Ha)
1	Bogor Selatan	14	56,22	0,00
2	Bogor Timur	4	59,45	4,30
3	Bogor Tengah	10	68,98	6,09
4	Bogor Barat	15	115,48	24,38
5	Bogor Utara	7	109,02	10,81
6	Tanah Sareal	11	102,69	4,49
TOTAL		61	511,84	50,07

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (2020)

Tabel 2.6
Total Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kota Per Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Total Luas Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Hasil Intervensi (Ha)
1	Bogor Selatan	13	45,66	0,00
2	Bogor Timur	3	29,30	4,30
3	Bogor Tengah	6	30,92	2,59
4	Bogor Barat	13	78,68	21,72
5	Bogor Utara	5	49,93	5,83
6	Tanah Sareal	10	76,44	4,49
TOTAL		50	310,93	38,93

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (2020)

Upaya atau intervensi yang telah dilaksanakan untuk mengurangi kawasan kumuh sedang dilakukan melalui penataan sarana prasarana lingkungan. Masing-masing meliputi jalan setapak, drainase, jembatan, Tembok Penahan Tanah (TPT), serta penanggulangan sampah dan pembangunan MCK. Keberhasilan menurunkan jumlah kawasan kumuh sedang, tidak terlepas dari kolaborasi penanganan kawasan kumuh antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam rangka menurunkan jumlah kawasan kumuh sedang. Antara lain, belum semua *stakeholder* mengacu pada perhitungan kumuh tertentu (R0), penataan tata ruang yang masih berorientasi pada pemugaran, adanya keterbatasan lahan dalam menuntaskan 7 indikator kumuh, adanya keterbatasan

anggaran dalam penanganan kumuh, kurangnya sinergitas antar perangkat daerah yang ikut terlibat dalam penanganan kawasan kumuh, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat di kawasan kumuh untuk ikut terlibat dalam perbaikan di wilayahnya masing-masing.

Upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan capaian penurunan kawasan kumuh di tahun-tahun mendatang yaitu melalui:

- a. Peningkatan sinergitas antar perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan kawasan kumuh;
- b. Perhitungan pengurangan kumuh mengacu pada metode yang sama;
- c. Penentuan konsep penataan ruang dan penanganan kumuh kedepan melalui peremajaan dan relokasi;
- d. Membangun budaya hidup sehat dan peduli lingkungan di masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi untuk mendukung ekonomi warga sasaran;
- f. Pelaksanaan *Vocational Training* di lokasi kawasan kumuh yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- g. Membangun kelompok pemelihara dan pengelola yang aktif.

Pada tahun 2020 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7.61 ton/hari dari target sebesar 6.6 ton/hari. Capaian tersebut meningkat 0.72 ton/hari dari tahun sebelumnya. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis *Reduce Reuse Recycle* (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 26 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 364 unit yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Jumlah KK yang dilayani sebanyak 12.759 KK dan jumlah warga yang sudah terbiasa memilah sampah di rumah tangga sebanyak 2.998 KK.

Pencapaian target reduksi sampah merupakan hasil dari berbagai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R yang dilakukan secara sidak maupun rutin terjadwal dalam pengelolaan sampah di TPS 3R;



2. Melaksanakan sosialisasi secara *bottom up* (berdasarkan permintaan warga) dan tidak massal sehingga lebih tepat sasaran dan efektif;
3. Menetapkan target pemilahan sampah baik di rumah tangga yang dilayani oleh TPS 3R dan Bank Sampah maupun mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R dan Bank Sampah dengan target yang berbeda sesuai dengan kemampuan SDM, jumlah layanan dan komitmen KSM TPS 3R di masing-masing TPS 3R;
4. melakukan penimbangan setiap sampah yang masuk ke TPS 3R;
5. Pembangunan fasilitas pengurangan sampah 3R berbasis masyarakat berupa bangunan sarana pengomposan di 26 lokasi, alat pengolahan air kotor sebanyak 5 unit, sarana prasarana mesin pengolah sampah, serta peningkatan sarana penunjang TPS 3R di dua lokasi;
6. Pengelolaan sampah 3R berupa pengolahan sampah di sumber di 27 lokasi, pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat di 15 lokasi, pemeliharaan sarana prasarana 3R di 15 lokasi, penyelenggaraan uji kualitas kompos, penyediaan tenaga pemilah sampah.
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah diantaranya melalui gerebek dapur, pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot;
8. Penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar moderen dan pusat perbelanjaan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang berisi larangan penyediaan kantong plastik di toko ritel dan mal;
9. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah serta sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup di 6 kecamatan.

Untuk melakukan perbaikan kondisi di tahun-tahun mendatang, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik personil di Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup maupun personil di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS 3R;

- b. Menambah jumlah lokasi TPS 3R, melengkapi sarana prasarana di TPS 3R, serta menambah jumlah layanan rumah TPS 3R;
- c. Menerapkan punishment dan reward kepada KSM TPS 3R dalam mengelola sampah di TPS 3R serta membuat pengangkutan sampah terjadwal sesuai jenisnya.

D. Sasaran 4. Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Air

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian.

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan sumber-sumber pencemar air yaitu:

- a) Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air melalui naturalisasi sungai ciliwung dan cisadane, konservasi sumber daya air secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA, serta melaksanakan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air;
- b) Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air melalui pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air, penegakan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air serta kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumber daya air.

Sasaran terkendalinya sumber-sumber pencemar air diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Kualitas Air	54	49,67	91,98	55	51,67	93,95	49,67	56,33	113,34	50	112,66
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	



Indeks kualitas air dihitung berdasarkan status pencemaran air sungai melalui metode indeks pencemar dengan melaksanakan pengujian dan analisa air sungai di 30 titik lokasi dan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. berdasarkan hasil pengujian diperoleh indeks kualitas air sebesar 56,33 dimana status air memenuhi sebanyak 32 persen dan sisanya sebesar 68 persen tercemar ringan.

Tabel 2.7
Data Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar Tahun 2020

No.	Sungai	Jumlah Skor (Storet)	Status Mutu (Storet)	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
Semester I Tahun 2020									
1	Ciliwung	-46	TB	5,73	5,70	5,39	TS	TS	TS
2	Cibalok	-28	TS	5,79	5,64	5,77	TS	TS	TS
3	Ciparigi	-40	TB	5,71	5,14	7,69	TS	TS	TS
4	Ciluar	-40	TB	5,72	5,46	5,45	TS	TS	TS
5	Cisadane	-44	TB	5,78	5,70	3,96	TS	TS	TR
6	Sindang Barang	-54	TB	5,54	5,70	5,85	TS	TS	TS
7	Cipakancilan	-40	TB	5,63	5,12	5,46	TS	TS	TS
8	Cianten	-54	TB	5,73	5,70	4,72	TS	TS	TR
9	Cidepit	-40	TB	5,58	5,05	5,64	TS	TS	TS
10	Angke	-36	TB	5,79	5,45	6,15	TS	TS	TS
Semester II Tahun 2020									
1	Ciliwung	-28	TS	5,61	5,62	6,88	TS	TS	TS
2	Cibalok	-52	TB	5,51	6,29	6,38	TS	TS	TS
3	Ciparigi	-36	TB	5,84	5,96	6,38	TS	TS	TS
4	Ciluar	-40	TB	5,30	4,91	5,91	TS	TR	TS
5	Cisadane	-46	TB	6,72	6,02	5,68	TS	TS	TS
6	Sindang Barang	-38	TB	5,95	6,22	6,29	TS	TS	TS
7	Cipakancilan	-50	TB	6,15	5,66	5,63	TS	TS	TS
8	Cianten	-46	TB	5,75	5,57	4,80	TS	TS	TR
9	Cidepit	-58	TB	5,49	8,10	5,36	TS	TS	TS
10	Angke	-50	TB	5,61	6,24	6,06	TS	TS	TS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (2020)

Tabel 2.8
Indeks Kualitas Air

Status	Jumlah	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	19	32%	70	22.16667
Cemar Ringan	41	68%	50	34.16667
Cemar Sedang	0	0%	30	0
Cemar Berat	0	0%	10	0
Total	60			
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2020				56.33
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2019				51,67
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2018				49,67
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2017				34,44
Indeks Kualitas Air Kota Bogor 2016				27,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (2020)

Indeks kualitas air tahun 2020 masih meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 51,67 serta masih jauh di bawah target provinsi sebesar 40,76 dan target nasional sebesar 53. Perbaikan ini dicapai melalui beberapa upaya pengendalian pencemaran sebagai berikut:

1. Terbentuknya Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 660.45-247 tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor yang melibatkan masyarakat serta sector lainnya diluar Pemerintah Kota Bogor.
2. Melakukan Edukasi kepada masyarakat (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantor, kelompok pemuda/karang taruna) untuk tidak membuang sampah disungai dan melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pencemaran air sungai dan melakukan monitoring terhadap pengelolaan IPAL kegiatan usaha.
4. Memberlakukan sanksi/tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan
5. Bekerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat untuk membersihkan sampah di sungai.

Gambar II.5
Kegiatan Naturalisasi Sungai Ciliwung



Untuk melakukan perbaikan kondisi di tahun-tahun mendatang, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:



1. Mengidentifikasi sumber pencemar di sepanjang ruas sungai dan situ di Kota Bogor untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pengendalian pencemar yang masuk ke dalam sungai maupun situ;
2. Menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai di Kota Bogor sehingga dapat menentukan kuota izin pembuangan limbah cair ke aliran air;
3. Memberikan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat di berbagai kalangan (pelajar, ibu rumah tangga, pegawai kantor, kelompok pemuda/karang taruna) tentang arti lingkungan hidup sehingga mereka lebih lebih mencintai lingkungan hidupnya serta memberlakukan sanksi atau tindakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan;
4. Membuat iklan layanan masyarakat tentang pentingnya mencegah pencemaran air sungai dan situ dalam bentuk reklame atau iklan baliho, pamflet ataupun brosur di media elektronik maupun media sosial;
5. Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas situ dan sungai;
6. Memberi sanksi hukum kepada pelaku pencemaran di sekitar situ dan sumur apabila melakukan pembuangan limbah langsung tanpa pengolahan; dan
7. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik masyarakat melalui IPAL terpusat baik skala kawasan maupun skala kota.

E. Sasaran 5. Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Udara

Udara merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan dari yang dulunya segar kini menjadi kering dan kotor. Keadaan ini apabila tidak segera di tanggulangi dapat membahayakan Kesehatan manusia, kehidupan hewan serta tumbuhan.

Sumber pencemar udara dapat merupakan kegiatan yang bersifat alami dan kegiatan antropogenik. Contoh pencemar alami adalah akibat letusan gunung berapi, kebakaran hutan ,dekomposisi biotik, debu, spora tumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan sumber pencemar udara yang berasal dari kegiatan antropogenik yaitu akibat adanya aktivitas transportasi, industri, persampahan baik akibat proses dekomposisi ataupun pembakaran dan rumah tangga.

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan sumber-sumber pencemar udara yaitu:

- a) Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara melalui pengembangan transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara, pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara, melaksanakan kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara; dan
- b) Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, pengelolaan limbah domestik, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, serta melaksanakan kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sasaran terkendalinya sumber-sumber pencemar udara diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Kualitas Udara	79,5	85,86	108	80	81,76	102,2	85,9	80,09	93,24	86,3	92,80
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 mencapai 80,09 dari target 85,9 atau sebesar 93,24 persen. Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode passive sampler dengan parameter NO₂ dan SO₂. Hasil yang didapat merupakan gabungan dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (APBD Kota Bogor), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (APBD Provinsi Jawa Barat) dan Ditjen Pengendalian Pencemaran Udara, KLHK (APBN). Masing- masing pemantauan dilakukan 2(dua) kali dalam setahun dan dilakukan di 4(empat) lokasi yang mewakili daerah transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri.



Tabel 2.9
Hasil Perhitungan Passive Sampler Tahun 2020

Peruntukan	Konsentrasi NO2 Rata-Rata Tahunan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)						Konsentrasi SO2 Rata-Rata Tahunan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)						IKU Kota
	Tahap I			Tahap II			Tahap I			Tahap II			
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Transportasi	0,25	26,00	26,00	14,50	25,00	-	0,40	15,00	5,82	14,40	10,00	-	80,09
Industri	10,00	18,34	18,34	35,00	16,00	20,72	0,40	12,00	13,65	6,80	14,00	12,93	
Pemukiman	30,00	21,52	21,52	9,50	9,00	16,36	1,20	9,00	14,65	0,80	10,00	11,44	
Perkantoran	10,00	25,05	25,05	27,50	12,00	21,81	2,00	12,00	13,20	2,80	7,00	12,54	
Blank	<0,41	<0,41	<0,41	<0,41	<0,41	<0,41	<2,57	<2,57	<2,57	<2,57	<2,57	<2,57	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (2020)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 93,24% lebih kecil dibandingkan tahun 2019 mencapai 102,2 %, hal ini disebabkan adanya peningatan arus wistawan dari DKI Jakarta dan sekitarnya akibat pembatasan aktifitas di DKI Jakarta akibat adanya pandemi Covid 19 ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara ambien di Kota Bogor, walaupun secara status IKU masih menunjukkan kualitas tidak tercemar/baik.

Dengan hasil perhitungan passive sampler sebesar 80,06 maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Bogor pada tahun 2020 termasuk katagori sangat baik. Hal ini didukung beberapa kegiatan program langit bersih sebagai berikut:

1. Program Bogor City Walkability Campaign, yang didukung dengan konsep pembangunan atau perbaikan jalur pejalan kaki dengan target 22,5 km di tahun 2020;
2. Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan;
3. Program Kampung Iklim;
4. Penetapan System Satu Arah;
5. Pembangunan taman tematik.
6. Pelebaran jalan dan relokasi pedagang pasar bogor; dan
7. Penanaman pohon/aksi hijau nusantara.

Untuk memperbaiki kondisi ini di tahun-tahun mendatang, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membangun dan menambah Ruang Terbuka Hijau untuk menambah serapan sumber pencemar udara;
2. Membangun persepsi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak pencemaran udara;

3. Membuat program Pengendalian Pencemaran Udara secara terkoordinasi di Kota Bogor untuk mendukung Program Langit Biru;
4. Membentuk forum peduli lingkungan Kota Bogor agar dapat meminimalisir pencemar serta menjaga kondisi kualitas udara; dan
5. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku pencemaran udara.

F. Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang menyatakan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan yaitu:

- a) Penyediaan ruang terbuka hijau publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas;
- b) Pelestarian dan konservasi kawasan lindung yang meliputi Kawasan perlindungan setempat, Kawasan pelestarian alam, Kawasan rawan bencana, serta Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah; dan
- c) Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada tempat pemakaman umum hijau.



Sasaran meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
% Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	5,9	5,89	99,83	5,925	6,12	103,29	5,91	13,11	221,82	5,96	219,96
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Ruang terbuka hijau dapat terealisasi sebesar 13,11% dari target sebesar 5,91%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan luas RTH publik yang sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 93,18 ha dari 711 ha total luas ruang terbuka hijau publik berupa 43,54 ha taman skala kota, taman skala lingkungan, dan taman jalur hijau jalan, 49,57 ha taman dari PSU yang telah diserahterimakan, 0,05 TPU hijau, dan 0,03 kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi. Hasil capaian penambahan ruang terbuka hijau pada tahun 2020 lebih berfokus kepada pembangunan taman jalur hijau yang merupakan hasil pengembalian fungsi dari semula non RTH menjadi RTH. Meskipun telah mencapai target, namun penambahan luasan ruang terbuka hijau tahun 2020 hanya sebesar 0,056 ha dari target sebesar 1,8 ha. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran pada kegiatan Pembangunan RTH maka target diturunkan dengan fokus hanya pada pembangunan taman jalur hijau yang merupakan pengembalian fungsi RTH dari non RTH.

Upaya pencapaian target penambahan ruang terbuka hijau publik tahun 2020 dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan kualitas Taman Sudut Jalan Binamarga yang merupakan taman lama yang ditingkatkan kualitasnya agar estetis dan tertata. Kegiatan tersebut mendukung upaya Pemerintah Kota Bogor dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi tapak.

Gambar II.6
Taman Sudut Jalan Binamarga



2. Pembangunan Taman Sudut Jalan Djuanda yang merupakan taman yang baru dibangun di atas lahan eks TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara).

Gambar II.7
Taman Sudut Jalan Djuanda



3. Penataan Taman Jalur eks Pedagang Kaki Lima di Jalan Otista yang merupakan taman baru yang dibangun diatas lahan eks PKL Souvenir Jalan. Otista. Taman yang dibangun berupa jalur hijau dan vertikal garden pot sebagai display untuk menambah keindahan.

Gambar II.8
Taman Jalur Eks PKL Jalan Otista



4. Pembangunan dan Penataan Taman Jalur Hijau Jalan Padi yang merupakan taman baru yang dibangun diatas lahan eks PKL dan eks TPS.

Gambar II.9
Taman Jalur Eks PKL Jalan Otista



5. Pengadaan pagar pengamanan taman tepi yang bertujuan untuk menyediakan pagar pengaman yang melingkupi seluruh area lahan di lokasi eks Taman Topi Jalan Kapten Muslihat yang nantinya akan dibangun Alun-alun Kota Bogor sehingga area tidak dapat dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sekaligus melindungi aktifitas di dalamnya dari gangguan apapun.

Gambar II.10
Pagar Pengaman Taman Topi



Tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan alun-alun Kota Bogor yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Namun karena adanya Pandemi-Covid 19 yang mengakibatkan adanya refocusing anggaran, maka pembangunan alun-alun kota bogor dijadwalkan ulang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Selain itu, hal tersebut tidak hanya berdampak pada batalnya pembangunan alun-alun kota bogor, namun pembangunan taman-taman baru serta batalnya pemangunan dan pemeliharaan taman yang dananya bersumber dari CSR merupakan dampak dari adanya Pandemi-Covid 19.

Perluasan lahan RTH publik di tahun-tahun mendatang akan terkendala oleh keterbatasan lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Untuk mengatasi hal itu maka akan dilaksanakan pembangunan taman di Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang terletak di perumahan, sesuai *siteplan* peruntukkan ruangnya. Pembangunan taman skala lingkungan di tahun mendatang akan lebih difokuskan pada kuantitas, sehingga akan diupayakan untuk mencari lahan-lahan PSU yang berukuran lebih dari 250 m².

MISI II

A. Sasaran 7 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal yaitu:

- a) Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dasar 9 tahun melalui peningkatan kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong



penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan enterpreneurship, standarisasi dan pemerataan mutu Pendidikan dasar, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, pengembangan system dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu Pendidikan dasar 9 tahun, penerapan system zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas, serta memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswi miskin.

- b) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal melalui pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat dalam rangka pemberantasan buta aksara, meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya wajib belajar 12 tahun (setara SMA/SMK), meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada pasar kerja, meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas.

Sasaran meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:



Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Rata-rata lama Sekolah	10,36	10,3	99,42	10,4	10,32	99,23	10,63	10,33	97,18	12	86,08
Harapan Lama Sekolah	-	-	-	13,50	13,40	99,26	13,6	13,41	98,60	15	89,40
Nilai Rata-Rata USBN SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,10	0
Nilai Rata-Rata USBN SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,83	0
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Nasional Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk mencapai rata-rata lama sekolah 12 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 10,33. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan berusia 15 tahun keatas sudah mencapai kelas 2 SMA lebih.



Sumber : BPS (2020)



Permasalahan perlambatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya penduduk berusia >25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan Angka Putus Sekolah SMP dan SMA serta mengintensifkan program kejar paket A, paket B dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah-wilayah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak 7 tahun keatas unuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bogor pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 13,41. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,41 tahun atau setara dengan Diploma I. capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,40.

B. Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda yaitu dengan membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatanan karakter, prestasi, kreatifitas dan inovasi generasi muda melalui:

- a) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- b) Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang;
- c) Aktualisasi nilai budaya bangsa pada generasi muda;
- d) Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda;
- e) Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor;
- f) Memerangi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan minuman keras pada generasi muda;

- g) Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social (anak jalanan, WTS, dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya;
- h) Peningkatan peran serta pemuda dalam meniscikan pembangunan;
- i) Pembinaan organisasi kepemudaan dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif;
- j) Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda;
- k) Revitalisasi perpustakaan kota dan pengembangan taman-taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat; serta
- l) Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan Pendidikan agama dan budi pekerti.

Sasaran meningkatnya kualitas generasi muda diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	-	-	-	56,31	-	0	67,05	0
Capaian Sasaran Tahun 2020										-	

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan secara keseluruhan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *The Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menandai era baru pembangunan kepemudaan yang bersifat *cross-cutting*. Salah satu amanat Perpres tersebut yaitu penyusunan Indeks Pelayanan Kepemudaan atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP secara substantif merefleksikan lima isu besar yang dihadapi para pemuda yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan



dan kesempatan kerja, partisipasi politik dan kepemimpinan, serta masalah gender dan diskriminasi.

Penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kota Bogor tidak dapat direalisasikan pada tahun 2020 dengan target sebesar 56,31. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan penghitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan

Meskipun IPP belum diketahui realisasinya, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu:

a. Penyadaran pemuda melalui:

- 1) Peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan dan hukum, serta pemahaman kemandirian ekonomi;
- 2) Peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan.

b. Pemberdayaan pemuda melalui:

- 1) Peningkatan potensi, kapasitas, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda;
- 2) Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- 3) Perluasan kesempatan memperoleh serta meningkatkan kompetensi keterampilan.

c. Pengembangan kepemimpinan pemuda melalui:

- 1) Penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- 2) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pengkaderan, dan pendampingan pembentukan kader pemimpin.

d. Pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:

- 1) Peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan;
- 2) Pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pendampingan, kemitraan dan promosi pembentukan pemuda kader wirausaha.

e. Pengembangan kepeloporan pemuda melalui:

- 1) Pengembangan inovasi, keberanian dalam melakukan terobosan, dan budaya kreatif pemuda;
 - 2) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang dapat sesuai dengan karakteristik daerah setempat.
- f. Peningkatan sinkronisasi dan kemitraan kepemudaan melalui:
- 1) Program sinergis antar sector dalam hal penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 2) Penyusunan kajian dan penelitian Bersama tentang persoalan pemuda;
 - 3) Pengembangan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- g. Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui:
- 1) Inventarisasi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kepelajaran;
 - 2) Peningkatan kreativitas dan inovasi, pengasahan kematangan intelektual, penyaluran minat bakat, serta penumbuhan rasa percaya diri, semangat kesetiakawanan social, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) Peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan;
 - 4) Akreditasi tingkat kesesuaian dengan pengaturan dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- h. Peningkatan peran serta masyarakat melalui:
- 1) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan kepemudaan;
 - 2) Mediasi masyarakat dalam menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda;
 - 3) Advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang kepemudaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
- i. Pemberian penghargaan kepemudaan yaitu pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

C. Sasaran 9 Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk



mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat yaitu dengan menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat melalui:

- a) Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis;
- b) Memperkuat jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “Business As Usual”; dan
- d) Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, Pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll).

Sasaran meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	600-610	5.162	*tidak dapat dibandingkan	641-650	*tidak dapat dibandingkan
Capaian Sasaran Tahun 2020										-	

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan penilaian Indeks

Inovasi Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Fungsi Indeks Inovasi Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintahan daerah yaitu sebagai pusat data inovasi daerah berdasarkan aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai sarana pelaporan inovasi daerah, sebagai instrument pengukuran inovasi daerah, untuk penghitungan tambahan penghasilan pegawai daerah, dan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami perubahan. Ketika penentuan target RPJMD Tahun 2020, penilaian indeks inovasi daerah berdasarkan indeks dibagi jumlah inovasi yang diinput. Sedangkan pelaksanaan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2020 mengalami perubahan cara dan variabel pengukuran indeks sehingga berpengaruh terhadap pengukuran realisasi indeks inovasi daerah tahun 2020.

Capaian indeks inovasi daerah tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 30.640 dengan Predikat Sangat Inovatif dengan jumlah inovasi yang diinput sebanyak 47 inovasi sehingga diperoleh nilai rata-rata indeks 651, sedangkan capaian tahun 2020 nilai total indeks inovasi dapat terealisasi sebesar 5.162 dan mendapat peringkat sebagai Kota Sangat Inovatif dengan jumlah inovasi yang diinput sebanyak 67 inovasi, dan yang diverifikasi sebanyak 64 inovasi sehingga jika dihitung hanya memperoleh nilai 80,65 dengan inovasi unggulan Kampung Tematik, Sistem Informasi Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan (SMART), dan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH). Keberhasilan dari pencapaian target ini adalah adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan apresiasi terhadap inovasi yang muncul dari masyarakat melalui pemberian penghargaan, dan adanya dukungan dari Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap inovasi yang muncul serta adopsi inovasi untuk masyarakat. Selain itu juga dengan melibatkan banyak stakeholder (Badan Litbang, Dunia Pendidikan, Masyarakat, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Bisnis, Komunitas dan Media) melalui sosialisasi secara lebih intens dan keterlibatan yang baik dalam upaya membina dan memfasilitasi inovasi.

Gambar II.11

Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020



Pada tahun 2020, Kota Bogor mendapatkan penghargaan juara 1 klaster Kota se-Indonesia untuk 3 sektor, yaitu Sektor Pasar Tradisional, Sektor Pasar Modern, dan Sektor Restoran serta mendapatkan juara 2 untuk Sektor Wisata atas konsep tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 pada Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Gambar II.12

Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Tahun 2020



D. Sasaran 10 Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, dan Toleransi Masyarakat

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, dan toleransi masyarakat yaitu dengan membangun budaya partisipatif, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam setiap proses pembangunan daerah serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender, menumbuhkembangkan kerukunan, toleransi, dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat.

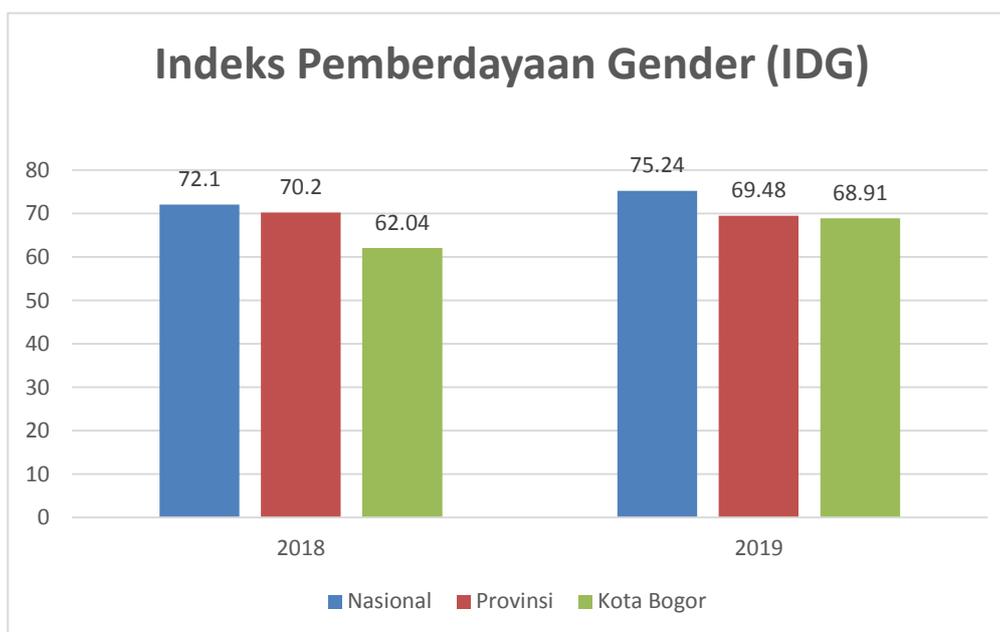
Sasaran meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	62,04	-	-	68,91	-	69,5	68,91* (th 2019)	99,15	73,5	93,76
Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-	-	71	68,51* (prov.jabar)	96,49	72,5	94,49
Capaian Sasaran Tahun 2020											

Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IDG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IDG.

Capaian IPM tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 76,11 sedangkan capaian IDG tahun 2020 belum dapat diketahui realisasinya dari target sebesar 69,5 dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi indikator dimaksud. Capaian IDG kota bogor tahun 2019 mencapai

68,91 masih dibawah capaian provinsi jawa barat yang mencapai 69,48 dan capaian nasional sebesar 75,24. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilihat dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.



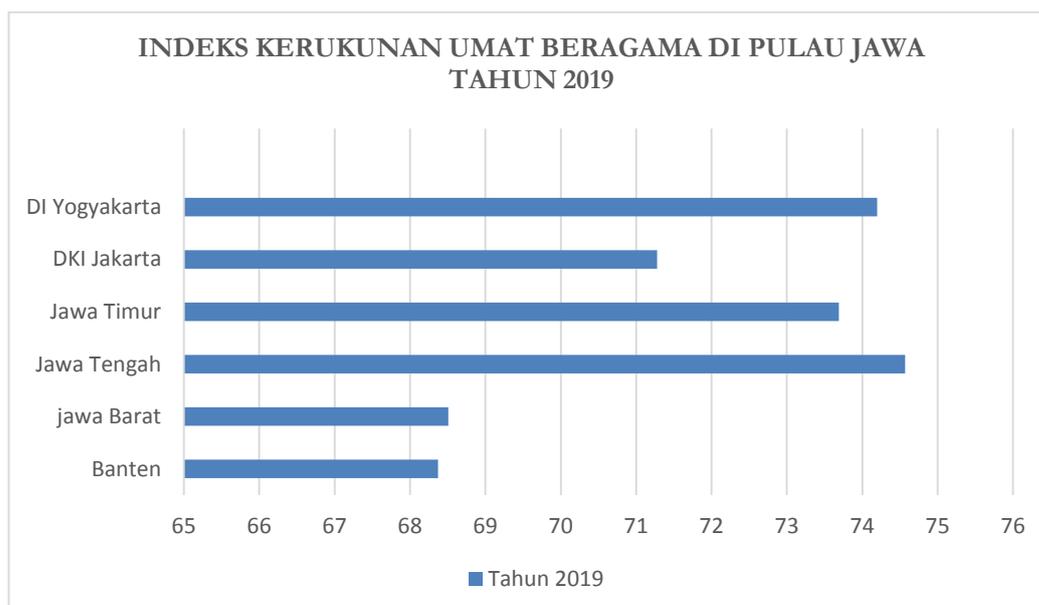
Sumber : BPS (2020)

Indeks Kerukunan Umat Beragama diperoleh dari 3 perhitungan indikator, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Indikator kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya indikator Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Indikator penilaian Indeks kerukunan umat beragama masih berbeda-beda, kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama belum menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional. Pada tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan perhitungan mandiri indeks kerukunan umat beragama, namun adanya *refocusing* anggaran yang difokuskan untuk penanganan covid 19

mengakibatkan pelaksanaan penilaian tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga target tahun 2020 tidak dapat tercapai.

Meskipun penilaian indeks kerukunan umat beragama kota bogor tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, namun capaian provinsi jawa barat tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 68,51%, lebih rendah dari capaian nasional yaitu sebesar 73,83%. Berbagai upaya yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu dengan penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan Imprisial dan Pusad Paramadina dalam penyelenggaraan kegiatan penguatan toleransi dan perdamaian dalam kehidupan keagamaan di Kota Bogor melalui dialog kebangsaan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat sipil (Kelompok pemuda) soal isu HAM dan Toleransi, pelaksanaan pawai toleransi dalam rangka Hari Jadi Bogor ke 537, pelaksanaan FGD Pengarusutamaan Toleransi dalam program kerja Pemerintah Kota Bogor menuju Bogor Kota Ramah HAM, pelaksanaan Lokakarya penguatan Torelansi di Kota Bogor, pelaksanaan dialog kebangsaan dengan tema “Satukan Perbedaan untuk Sinergitas Perubahan Baru“, pelaksanaan kongkow bareng pemuda lintas Iman dengan tema “Membangun Penggerak Toleransi dan Perdamaian di Kota Bogor”, dan pelaksanaan Deklrasi Forum Muda Lintas Agama (FORMULA) serta Out Bond Kebangsaan.



Sumber : Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2020)



E. Sasaran 11 Tercapainya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Sistem Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.

Strategi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu dengan mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui:

- a) Penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan melalui memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan;
- b) Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas
- c) Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- d) Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
- e) Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien

- f) Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur
- g) Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan “*smart*”
- h) Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
- i) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta
- j) Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;

Sasaran tercapainya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD		
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B	B	102	BB	B	94,36	BB	B* (Th 2019)	94,36	A	82,57	
Capaian Sasaran Tahun 2020											Sangat Baik	

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 masih belum dapat diketahui realisasinya, karena sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi selaku lembaga yang melakukan perhitungan indikator tersebut belum mempublikasikan data realisasi tahun 2020. Namun pada tahun 2019 realisasinya telah mencapai nilai 66,10 atau berpredikat B. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun, jika dibandingkan dengan tahun 2018 capaian tahun 2019 lebih baik, yaitu meningkat dari 61,00 menjadi 66,10. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan nilai 34,43 pada komponen pengungkit/proses, dan 31,67 pada komponen hasil. Komponen proses dinilai berdasarkan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan, masing-masing adalah Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan penilaian komponen hasil ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta survei persepsi internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bogor.



Dari hasil evaluasi itu pula, terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi, termasuk diantaranya beberapa catatan tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pada PD masih belum banyak terlihat perubahan yang berarti dan merata. Perbaikan yang dilakukan di PD belum secara substantif memperbaiki tata kelola yang ada;
- b. Hasil pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dituangkan ke dalam rencana aksi tindak lanjut, termasuk juga pemantauan pelaksanaan quick win reformasi birokrasi;
- c. Penerapan 'Agen Perubahan' belum dilaksanakan oleh seluruh PD, serta belum memperhatikan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan;
- d. Identifikasi terhadap keseluruhan peraturan perundangan yang masih berlaku belum dilakukan, serta evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala;
- e. Kelembagaan yang disusun tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. Mekanisme *cascade* kinerja tidak selalu berpedoman pada proses bisnis organisasi. *Cascade* kinerja yang telah disusun tidak selalu dapat menggambarkan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran masing-masing jabatan yang telah ditetapkan;
- g. Peta proses bisnis belum disusun dan ditetapkan berdasarkan kinerja yang diharapkan akan dicapai dalam RPJMD;
- h. Pembangunan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dikembangkan, serta belum dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- i. Ukuran kinerja individu pada beberapa PD belum menggambarkan *cascade* kinerja dari organisasi. Selain itu, masih terdapat perbedaan antara ukuran kinerja individu dengan tolok ukur keberhasilan yang dituangkan dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- j. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan, guna mendukung pencapaian kinerja;
- k. Sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dibangun belum diterapkan pada seluruh PD dan terintegrasi;
- l. Perbaikan kualitas pelayanan publik belum didukung dengan perbaikan proses bisnis dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang perbaikan pelayanan publik tersebut;
- m. Penerapan sistem integritas belum terimplementasi sepenuhnya, yaitu terkait penerapan Whistle Blowing System (WBS) dan penanganan benturan kepentingan;
- n. Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada unit kerja pelayanan belum optimal, implementasinya belum berdampak signifikan pada kinerja. Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- o. Pelaksanaan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar, masih belum terimplementasikan dengan baik;
- p. Hasil survei internal terhadap 334 pegawai Kota Bogor sebagai responden atas survei integritas jabatan menunjukkan, terdapat 12,5% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilakukan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sebanyak 75% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 12,5% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya;
- q. Survey internal terhadap integritas organisasi Tahun 2019 menunjukkan indeks 3,31 dalam skala 0 – 4 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.10
Survey Internal Terhadap Integritas Organisasi Tahun 2019

Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1. Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,10	3,20
2. Integritas terkait Pengelolaan SDM	3,43	3,38
3. Integritas terkait Pengelolaan Anggaran	3,22	3,41
4. Integritas Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,16	3,23
Indeks Integritas Organisasi	3,23	3,31
<i>Sumber : LHE Pelaksanaan RB oleh Kemenpan RB Tahun 2019</i>		

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Kota Bogor terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2018 yang mencapai 3,23.

r. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kota Bogor menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan mencapai indeks 3,37 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang mencapai 3,21. Kenaikan ini menunjukkan tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan yang semakin membaik. Hasil survei masih menunjukkan adanya gap atau kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima;
- 2) Hasil survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,54 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang mencapai 3,55. Upaya pembangunan integritas oleh Pemerintah Kota Bogor sudah dilakukan, dan sudah mulai dirasakan oleh penerima layanan, walaupun masih harus ditingkatkan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam rencana aksi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing PD, termasuk juga hasil pemantauan terhadap pelaksanaan *quick wins* reformasi birokrasi, agar dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik. Pemantauan hendaknya dilakukan oleh petugas yang telah mendapatkan pelatihan yang cukup;
2. Meningkatkan penerapan 'agen Perubahan' untuk lebih mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh PD;
3. Melakukan identifikasi/pemetaan keharmonisan terhadap keseluruhan peraturan perundangan yang masih berlaku, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan, dan dilakukan secara berkala;
4. Memastikan terwujudnya *performance based organization*, dengan cara menyelaraskan kelembagaan PD dan RPJMD serta menitikberatkan kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang diharapkan di dalam RPJMD;
5. Melakukan penyusunan peta proses bisnis berdasarkan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD. Selanjutnya melakukan reviu terhadap *standard operating procedure* yang telah ditetapkan, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;
6. Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun terkait pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, terutama integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir, pemberian *reward and punishment*, serta sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
8. Meningkatkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan hasil *asesmen* pegawai, mengidentifikasi rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan dukungan



- anggaran yang mencukupi, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
9. Menindaklanjuti hasil survei terhadap pegawai, dengan melakukan upaya penyegaran terhadap pegawai berupa pelatihan dan sebagainya, selain untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta ukuran keberhasilannya, juga untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai, serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai;
 10. Menyempurnakan sistem pengukuran kinerja yang telah dibangun agar terintegrasi, dan penerapannya dilakukan pada seluruh PD;
 11. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan mengimplementasikan kebijakan penerapan WBS dan penanganan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai PD, serta melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM terhadap unit kerja pelayanan, dengan dukungan kompetensi APIP yang memadai;
 12. Mengimplementasikan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar, untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan;
 13. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki SOP pelayanan yang lebih memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan sesuai standar pelayanan.

F. Sasaran 12 Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi yaitu dengan melakukan akselerasi pembangunan melalui:

- a) Optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan mendorong percepatan pembangunan kota bogor yang cerdas (Bogor Smart City) melalui

pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat; dan

b) Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan.

Sasaran meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Level Kematangan Smart City	-	-	-	Scattered	Integrative		Initiative	Integrative* (Th 2019)	305%	Smart	76%
Capaian Sasaran Tahun 2020											Sangat Baik

Smart city merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi cerdas untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia melakukan penelitian terkait evaluasi kota cerdas, salah satunya dengan menyelenggarakan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) sebagai bagian dari evaluasi implementasi kota cerdas Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan 2 tahunan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi konsep kota cerdas di Indonesia. Hasil dari RKCI adalah indeks kota cerdas untuk kota besar, kota sedang dan kota kecil beserta beberapa kategori khusus yang ada di Indonesia. Hasil ini merepresentasikan kota yang paling tinggi dalam mendapatkan benefit dari implementasi kota cerdas. RKCI dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan RKCI 2019 adalah kegiatan ketiga setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 dan 2017, dimana Surabaya terpilih menjadi kota terbaik dalam melakukan inisiasi kota cerdas. Melalui kajian ini didapat gambaran kota-kota di Indonesia dalam mengelola kota untuk menyelesaikan permasalahan kota dengan efektif dan efisien. Melalui even ini pula dapat diketahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan kota yang disediakan untuk kemudahan masyarakat.



Tabel 2.11
Tingkat Kematangan Smart City

Level Kematangan	Skor
Initiative	>20% - 40%
Scattered	>40% - 60%
Integrative	>60% - 80%
Smart	>80% - 100%

Sumber : RKCI (2019)

Pada tahun 2019 Kota Bogor mendapatkan nilai 61,13% atau berada pada level *Integrative*, meningkat dari penilaian sebelumnya pada tahun 2017 yang mendapatkan nilai 49,0 atau berada pada level *scattered*. Nilai tertinggi Kota Bogor diperoleh pada bidang ekonomi (65,56%) dan bidang industri & *tourism* (64,5%), sementara nilai terendah selain bidang keamanan (51,54%) juga diperoleh dari bidang lingkungan (52%).

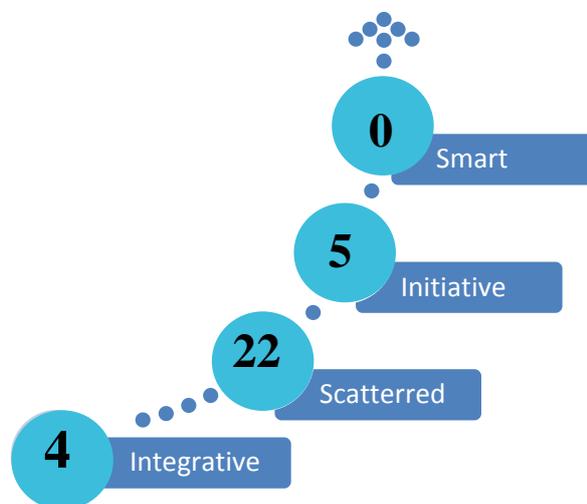
Tabel 2.12
Hasil Capaian Per Bidang Level Kematangan Smart City

Bidang	Rata-Rata 32 kota	Kota Bogor
Ekonomi	62,00	65,56
Mobility	56,03	60
Industri & Tourism	59,24	64,5
Pendidikan	57,47	53
Keamanan	54,44	51,54
Kesehatan	63,62	63,64
Pelayanan publik	72,10	70
Energi	38,10	64,29
Tata Ruang	57,68	63,33
Lingkungan	56,67	52

Sumber : RKCI (2019)

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap 31 kota di Indonesia pada tahun 2019 diperoleh hasil bahwa 4 kota berada pada tingkat *Integrative*, 22 kota pada tingkat *Scattered*, 5 kota kota berada pada tingkat *Initiative*, dan belum ada kota yang berhasil mencapai tingkat kematangan *Smart*.

Gambar II.13
Hasil Penilaian RKCI Tahun 2019 Terhadap 31 Kota Di Indonesia



Sumber : RKCI (2019)

MISI III

A. Sasaran 13 Menurunnya Tingkat Pengangguran

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai permasalahan yaitu diantaranya tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Kebijakan yang dilaksanakan untuk menurunkan tingkat pengangguran yaitu dengan menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, perbankan profesional melalui:



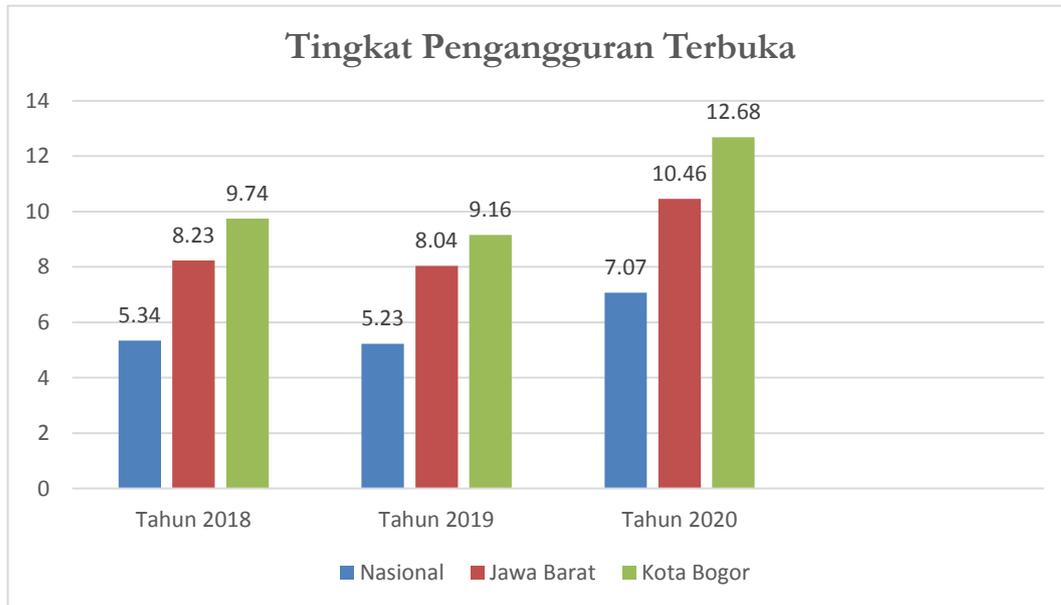
- a) Peningkatan kapasitas dan keterampilan Angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
- b) Pengembangan inkubator bisnis;
- c) Memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah;
- d) Peningkatan¹ produktivitas tenaga kerja;
- e) Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan
- f) Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja.

Sasaran menurunnya tingkat pengangguran diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Tingkat Pengangguran Terbuka)	6,26	9,74	45,85	5,66	9,16	39,22	8,47	12,68	50,30	7,6	33,16
Capaian Sasaran Tahun 2020										Kurang Baik	

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor pada tahun 2020 mencapai 12,68%. Capaian tersebut belum mencapai target atau belum mampu menekan jumlah pengangguran terbuka yang ditetapkan dengan target sebesar 8,47%. Dibandingkan dengan tahun 2019, capaian tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 9,16 meningkat menjadi 12,68. Selain itu, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka juga menyebabkan tingkat kesempatan kerja di Kota Bogor menurun dari 90,9 persen menjadi 87,74 persen. TPT Kota Bogor tahun 2020 masih jauh dibawah capaian TPT Provinsi Jawa Barat yg mencapai 10,46 dan capaian nasional sebesar 7,07.

Grafik



Sumber : BPS (2020)

Penyebab meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Untuk tahun 2020, jumlah pencari kerja sampai dengan bulan desember sebanyak 4.572 orang dan jumlah lowongan yang tersedia hanya 1.511 lowongan. Selain itu, adanya pandemi covid 19 mengakibatkan terjadinya penutupan kegiatan usaha sebanyak 1.217 perusahaan dan berdampak terhadap 1.071 pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Walaupun terkendala adanya pandemi covid 19, namun sepanjang tahun 2020 telah dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bursa Kerja Expo secara *online* melalui website <https://bogorkerja.kotabogor.go.id>;
2. Pemberian Kerja Sementara (padat Karya) terhadap tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tenaga kerja yang dirumahkan karena terdampak pandemi covid 19;



3. Pelaksanaan penyuluhan bimbingan jabatan dan pembinaan bursa kerja khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapan diri calon pencari kerja atau siswa-siswi maupun mahasiswa -mahasiswi perguruan tinggi sebelum memasuki dunia kerja;
4. Pelaksanaan penyuluhan ketenagakerjaan tentang Angkatan kerja khusus/disabilitas;
5. Pelaksanaan pembekalan tenaga kerja mandiri yang bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja dapat berwirausaha atau memajukan bidang usahanya;
6. Penyiapan wirausaha baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan diri generasi pengusaha atau pelaku yang memiliki rintisan usaha dalam menjalankan usaha dengan memberikan pelatihan Manajemen Pengelolaan, Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran;
7. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan penganggur;
8. Pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis masyarakat seperti tata rias wajah, souvenir, menjahit dan hidroponik; dan
9. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

B. Sasaran 14 Menurunnya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan;
- b. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana Sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Tingkat Pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja;
- d. Kurangnya perhatian pemerintah, dimana pemerintah terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan;

e. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

1. Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling miskin;
2. Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen-20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin;
3. Kelompok 3 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen-30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin

Kebijakan yang dilaksanakan untuk menurunkan kemiskinan yaitu dengan menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin, dan meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin.

Sasaran menurunnya kemiskinan diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Angka Kemiskinan	7,05	5,93	115,89	7	5,77	117,57	5,8	6,68	84,83	5	66,40
Capaian Sasaran Tahun 2020										Baik	

Badan Pusat Statistik menyatakan, angka kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2020 mencapai 6,68%. Artinya sebanyak 6,68% penduduk Kota Bogor merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 480.001,-. jumlah penduduk miskin Kota Bogor terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, sehingga pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor sebanyak 5,77% atau sebanyak 63.970 Orang. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan di Kota Bogor dan tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Bogor pada tahun 2020 adalah sebanyak 75.040 orang (6,68%). Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang

mengakibatkan roda ekonomi mulai terganggu serta adanya PHK besar-besaran mulai awal tahun 2020.

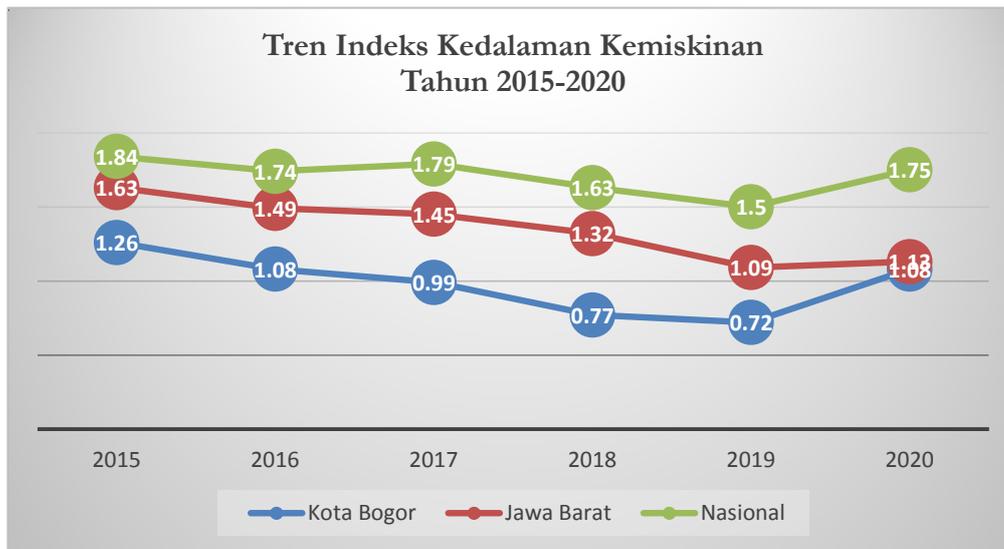
Grafik



Sumber : BPS (2020)

Pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*) tahun 2020, nilai Kota Bogor mencapai 1,08. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai ini sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program, karena dapat menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan. Nilai yang diperoleh tahun 2020 naik dibanding tahun 2019 yang mencapai 0,72. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Bogor cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Selanjutnya pada Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*) tahun 2020, nilai Kota Bogor mencapai 0,26. Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik



Sumber : BPS (2020)

Grafik



Sumber : BPS (2020)

Efektivitas pelaksanaan program juga ditunjang oleh semakin membaiknya penetapan target atau sasaran program bantuan melalui penggunaan Basis Data Terpadu yang gencar disosialisasikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 oleh Pemerintah kota Bogor untuk menekan angka kemiskinan terdiri dari:



1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat dan untuk menunjang program pendidikan dan kesehatan. Data awal pada tahun 2008, jumlah calon penerima RTSM (rumah tangga sangat miskin) yang sekarang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 14.774 KPM. Adapun persyaratan kepesertaan PKH adalah sebagai berikut :

- a. Kesehatan didalamnya ada ibu hamil/nifas ,anak pra sekolah
- b. Pendidikan terdiri anak usia SD/MI/ sederajat/paket A, SMP/Mts/ sederat/paket B, SMA/MA/SMK/ sederajat/paket C
- c. Kesejahteraan sosial ada penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar.

Pada Tahun 2018 penerima manfaat PKH sebanyak 17.071 KPM, sedangkan pada Tahun 2019 penerima manfaat PKH sebanyak 21.804, angka ini meningkat seiring dengan penambahan kuota (komponen) berdasarkan kriteria diatas. Tahun 2020 penerima manfaat PKH sebanyak 30.466 , angka ini meningkat seiring dengan perluasan serta penambahan kuota (komponen) di atas terkait pandemic covid 19.

2. Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT atau yang sekarang disebut dengan Program SEMBAKO adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat usaha yang menjual bahan pangan yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur (e-Warong). Penerima manfaat mendapat bantuan sebesar Rp. 200.000,-/KPM per Bulan, dimana sesuai ketentuan bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai tetapi dapat dipergunakan khusus untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa sembako yaitu karbohidrat (beras), sumber protei hewani (telur, ayam, daging dan ikan segar), nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe), vitamin dan mineral (buah dan sayur). Adapun jumlah penerima bantuan Program SEMBAKO Tahun 2020 sampai dengan Tahap IV Tahun 2020 sebanyak 58.070 KK.

3. Pembentukan elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) KUBE

e-Warong KUBE adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima program KUBE, PKH dan BPNT dan dikelola secara non tunai. E-Warong KUBE berfungsi sebagai tempat menjual bahan pangan murah

berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga dan agen bank penyalur bantuan sosial non tunai. Juga berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil produksi KUBE dan sebagai tempat pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum. Tahun 2017 KUBE e-warong di Kota Bogor bertambah menjadi 58 KUBE (580 orang KPM didalamnya) yang tersebar di 68 Kecamatan di Kota Bogor. Kenaikan tersebut adalah tambahan kuota dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pencairan Program SEMBAKO yang dapat sehari hari melayani 500 – 1000 KPM. Pada tahun 2020 KUBE JASA e-warong masih berjalan, data tersebut berdasarkan hasil monitoring terhadap 58 e-warong KUBE jasa yang masih menjadi tempat penyaluran Program SEMBAKO ditambah 49 unit Agen Bank Penyalur program tersebut. Belum ada penambahan jumlah KUBE e-warong dikarenakan belum ada penambahan kuota dari Pemerintah Pusat

4. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Pada Tahun 2018, 20 Orang WRSE dapat mandiri yaitu 10 Orang di Kelurahan Sukaresmi dan 10 Orang di Kelurahan Cipaku . Sampai dengan saat ini hasil monitoring dan evaluasi untuk WRSE Binaan Dinas Sosial Kota Bogor Masih berjalan dan dikatakan sudah mandiri dikarenakan mereka masih menjalankan usahanya. Tahun 2020 tidak ada penambahan karena anggaran kegiatan ini terkena refocusing akibat Pandemi Covid 19.

5. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Jumlah Penduduk Kota Bogor tahun 2020 sebanyak 338.386 Kepala Keluarga, sedangkan Jumlah masyarakat Miskin yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 71.024 Kepala Keluarga yang sah diakui oleh Pemerintah, Artinya Data kemiskinan dikota Bogor hanya mencapai 20.98 % dari jumlah kepala keluarga di Kota Bogor. Dampak adanya pandemi covid 19 menyebabkan terdapat penambahan jumlah warga miskin baru yang perlu dibantu secara ekonomi sebesar 230.000 Kepala Keluarga serta telah diberikan bantuan yang bersumber dari APBD Kota Bogor untuk 28.906 kepala keluarga, APBD Provinsi untuk 29.530 kepala keluarga, dan APBN (Kemensos) untuk 28.866 kepala keluarga.



C. Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga

Kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga yaitu:

1. Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga melalui peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya;
2. Meningkatkan ketahanan fisik keluarga dengan menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga, peningkatan kualitas Kesehatan keluarga, peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga, serta memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui peningkatan pendapatan per kapita keluarga dengan pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan Pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun, peningkatan jaminan Kesehatan masyarakat berbasis keluarga, pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera, serta pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;
4. Meningkatkan ketahanan social psikologis keluarga dengan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, Pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak, peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, Pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
5. Meningkatkan ketahanan social dan budaya dalam keluarga dengan meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan

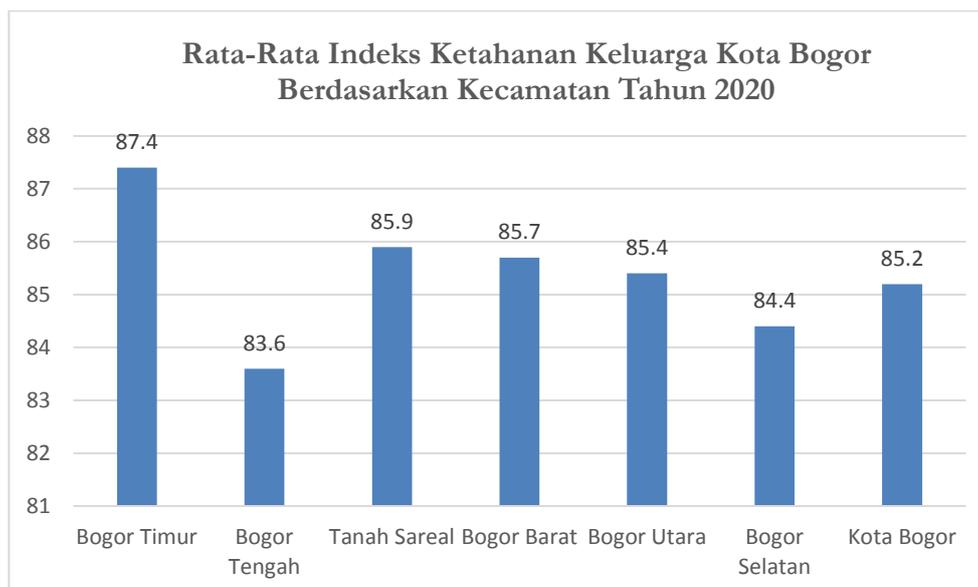
daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang.

Sasaran meningkatnya kualitas ketahanan keluarga diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Indeks Ketahanan Keluarga	-	-	-	-	-	-	73-74	85,2	116,71	76-77	112,11
Capaian Sasaran Tahun 2020									Sangat Baik		

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) disusun atas dimensi-dimensi ketahanan yang dijabarkan dalam sejumlah variabel dan indikator pengukuran. Dimensi tersebut yaitu legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, ketahanan sosial budaya, dan kemitraan gender.

Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor tahun 2020 mencapai 85,2. Berdasarkan kategori BPS capaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi, demikian juga untuk seluruh wilayah kecamatan. Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka empat wilayah kecamatan yaitu kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal, Bogor Barat dan Bogor Utara memiliki nilai Indeks Ketahanan Keluarga di atas rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor dan dua kecamatan yaitu kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan masih dibawah rata-rata Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor. Indeks Ketahanan Keluarga tertinggi adalah Kecamatan Bogor Timur (87,4) dan terendah adalah kecamatan bogor Tengah (83,6).



Sumber : BPS Kota Bogor (2020)

Apabila dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, sebagian besar keluarga (lebih dari 80%) memiliki indeks ketahanan keluarga dengan kategori sangat tinggi. Walaupun demikian, keluarga dengan kategori rendah dan sangat rendah masih ditemukan dan tersebar di semua wilayah kecamatan. Kecamatan Bogor Tengah memiliki persentase keluarga dengan indeks ketahanan keluarga kategori rendah dan sangat rendah tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 2.13
Sebaran Keluarga Berdasarkan Kategori Indeks
Ketahanan Keluarga dan Kecamatan

Kecamatan	Persentase di Setiap Kategori				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup	Rendah	Sangat Rendah
Bogor Timur	92,0	3,5	2,2	0,7	1,6
Bogor Tengah	81,4	7,0	3,0	2,1	6,6
Tanah Sareal	86,3	5,0	2,9	1,4	4,4
Bogor Barat	86,5	4,8	2,5	1,4	4,8
Bogor Utara	86,2	4,5	2,8	1,9	4,7
Bogor Selatan	84,6	6,3	3,0	1,1	5,0

Sumber : BPS Kota Bogor (2020)

Berdasarkan hasil penilaian indeks ketahanan keluarga, terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki, diantaranya yaitu:

1. Dimensi ekonomi memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap ketahanan keluarga, tetapi di sisi lain dimensi ekonomi memiliki indeks paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Oleh karena itu, penguatan ekonomi menjadi hal yang prioritas perlu untuk dilakukan;
2. Kepemilikan tabungan menjadi indikator kuat yang mencerminkan dimensi ekonomi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi sosialisasi gerakan menabung dan manfaatnya, termasuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya di wilayah dengan pendapatan per kapita rendah untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan keluarga, menerapkan gaya hidup sederhana, tidak konsumtif dan menggunakan strategi koping keuangan yang sehat, tidak terlilit hutang riba, dan lain-lain;
3. Meskipun Kota Bogor memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi tetapi masih ditemukan indeks ketahanan keluarga yang rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, program-program bantuan untuk keluarga dengan ketahanan keluarga rendah dan sangat rendah harus menjadi prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi atau program bantuan lainnya agar ketahanan keluarganya semakin meningkat;
4. Dimensi lain yang memiliki pengaruh kuat terhadap ketahanan keluarga adalah dimensi sosial psikologis. Hal ini berarti program penguatan ekonomi harus diikuti dengan program penguatan internal keluarga, misalnya melalui program sekolah ibu, peningkatan kapasitas pendamping desa/kelurahan, peningkatan kegiatan BKB, BKL, BKR, PIK-R, Puspaga atau Posyandu, peningkatan kapasitas ibu atau istri serta ayah dan suami melalui majelis taklim yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, serta edukasi keluarga *online*;
5. Peningkatan pada semua dimensi ketahanan keluarga melalui berbagai program dengan melibatkan perangkat daerah terkait sehingga pembangunan keluarga bersifat holistik, sinergis dan *integrative*; dan
6. Capaian indeks ketahanan keluarga di setiap kecamatan dan kelurahan menunjukkan masih ada yang tinggi, rendah, termasuk juga kesenjangan antar wilayah antara capaian tinggi dan rendah. Oleh karena itu, program-program



pembangunan keluarga di setiap kecamatan atau kelurahan memiliki skala prioritas yang berbeda-beda dalam menjalankan program dan kegiatannya .

D. Sasaran 16 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan yang dilaksanakan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yaitu dengan meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah melalui:

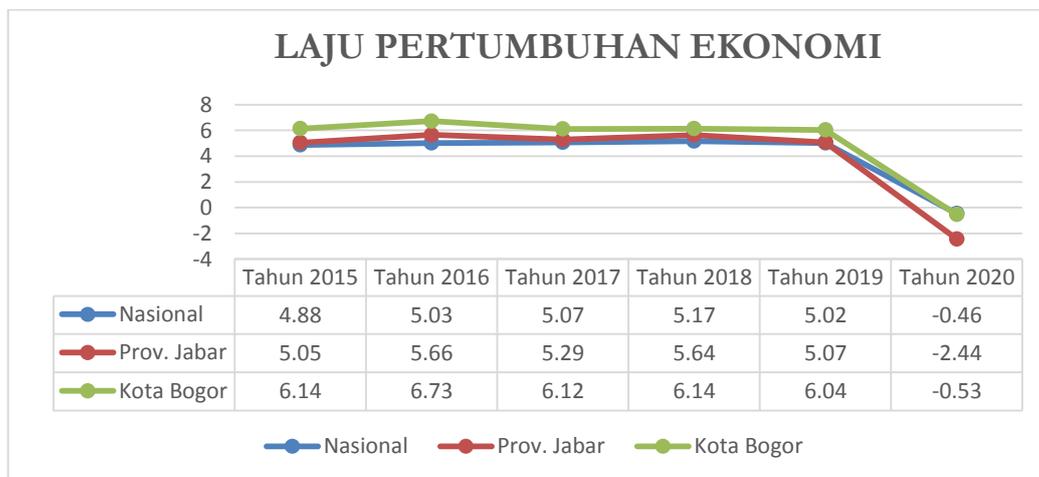
1. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local;
2. Penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi, dan kreativitas;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi;
4. Mengembangkan klaster industry, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah;
5. Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
6. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)
7. Meningkatkan system dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen;
8. Revitalisasi pasar tradisional;
9. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah;
10. Mendorong pengembangan BUMD yang bergerak di sector pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:



Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,56	6,14	93,60	6,66	6,04	90,69	6,66	-0,53	7,96	7	7,57
PDRB Per Kapita	38	38,49	101,29	40	41,79	104,48	40,36	41,79*	103,54	49,84	83,848
Pengeluaran Per Kapita	-	11.348	-	-	11.825	-	11.124	11.564	103,96	11.504	100,52
Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	-	-	-	-	-	-	20	19,11	95,55	25	76,44
Capaian Sasaran Tahun 2020										Baik	

Laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,12% dan meningkat menjadi 6,14% pada tahun 2018 dan mengalami perlambatan pada tahun 2019 yaitu menjadi 6,04%. Pada tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor terealisasi sebesar -0,53%.



Sumber : BPS dan BPS Jawa Barat (2020)

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yaitu menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang memiliki proporsi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di semua provinsi. Konsumsi rumah tangga di Kota Bogor diperkirakan menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan masyarakat yang lebih banyak menyimpan uangnya karena motif berjaga-jaga. Selain itu, pertumbuhan investasi yang memiliki tujuan dalam penyerapan tenaga



kerja dan penciptaan pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan di semua provinsi. Di Kota Bogor, diperkirakan investasi menurun sejalan dengan penurunan di Provinsi Jawa Barat, antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi PMDN. Melemahnya sektor perdagangan dan industri berdampak pada meningkatnya pengangguran dan PHK saat Pandemi Covid-19. Sebanyak 42% warga sempat menganggur dan di PHK saat pandemi, sementara 7% diantaranya menganggur sebelum pandemi dan sisanya sebanyak 58% tetap sama seperti sebelum pandemi. Berdasarkan data Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) chapter Bogor, tingkat hunian rata-rata hotel per bulan Kota Bogor pada April 2020 mencapai titik terendah yakni 0%. Padahal, rata-rata tingkat hunian kota sebelum terjadi Pandemi Covid-19 sekitar 70-80%.

Strategi yang dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi berfokus pada program-program dan kegiatan yang dapat membangkitkan sektor perekonomian diantaranya dengan pengendalian Covid-19 (penerapan protokol kesehatan yang disiplin; strategi peningkatan kapasitas testing, tracing, dan isolasi; dan strategi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan), juga dengan melaksanakan akselerasi dan perluasan bantuan sosial, akselerasi bantuan keuangan, restrukturisasi dan penyaluran kredit untuk UMKM dan korporasi, serta akselerasi belanja pemerintah lainnya termasuk belanja modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Bogor tahun 2020 belum dapat diketahui realisasinya. Sampai dengan laporan ini disusun Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi tahun 2020. PDRB per kapita merupakan pembagian dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk dalam periode waktu yang sama, sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Berdasarkan PDRB per Kapita dapat diketahui besarnya pengeluaran setiap penduduk di suatu daerah. Apabila melihat *trend* sampai dengan tahun 2019, PDRB perkapita Kota Bogor ADHB dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,62 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,79 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

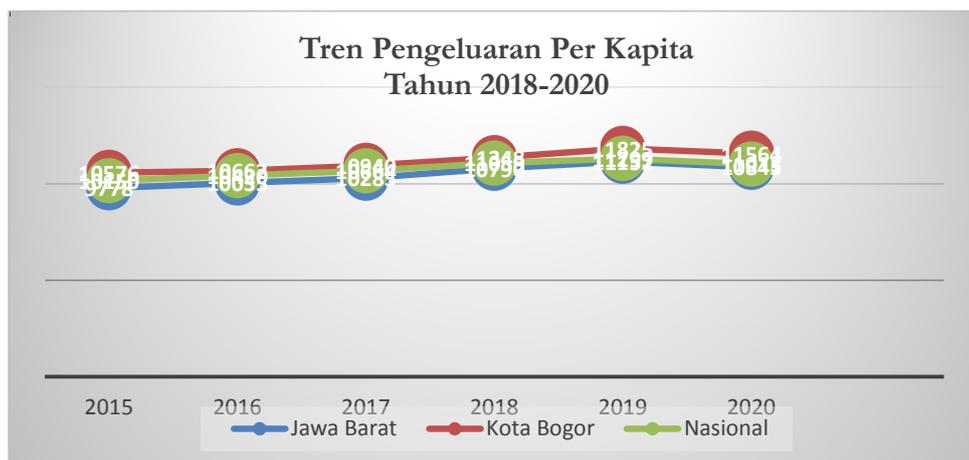
Grafik



Sumber : BPS Jawa Barat, 2018

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Laju pertumbuhan PDRB Per kapita menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 261.000 (2,21%) dibandingkan dengan tahun 2019. Pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia tahun 2020 hasil perhitungan BPS sebesar 11,01 juta. Jumlah tersebut turun 2,53 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,3 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita di Kota Bogor mengalami penurunan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita nasional.



Sumber : BPS (2020)

Adanya Pandemi Covid-19 berakibat turunnya pendapatan masyarakat, hal ini berbanding lurus dengan pengeluaran per kapita yang juga mengalami penurunan.

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit tahun 2020 dapat trealisasi sebesar 19,11%, menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 mencapai 19,22%. Angka tersebut masih dibawah capaian Provinsi Jawa Barat yang sudah mencapai 19,41%. Proporsi kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp. 4.611.849.000.000,- dari total seluruh pinjaman sebesar Rp. 24.132.146.000.000,-. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 3.190.122.000.000,-, dan untuk investasi sebesar Rp. 1.421.728.000.000,-

E. Sasaran 17 Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta dengan mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Sasaran meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:



Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
% Realisasi Rencana struktur Ruang	-	-	-	-	-	-	20	48,7	243,50	100	48,70
% Realisasi Rencana Pola Ruang	-	-	-	-	-	-	20	92,5	462,50	100	92,5
Capaian Sasaran Tahun 2020										Sangat Baik	

Persentase ketercapaian rencana struktur ruang sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 48,7%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi penilaian pelaksanaan program pemanfaatan ruang RTRW Kota Bogor pada tahun anggaran 2020. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian di antaranya meliputi :

- a. Realisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan melalui pembangunan BORR seksi IIIA, pembangunan persimpangan tidak sebidang di Jalan RE Martadinata, penertiban pemanfaatan di sepanjang jaringan jalur kereta api.
- b. Realisasi program konversi angkutan kota ke angkutan massal, pengembangan dan pengoperasian angkutan umum melalui shift dan rerouting, penataan parkir *on-street* dan *off street*.
- c. Realisasi Program Jaringan Air Minum melalui penambahan jumlah dan kapasitas reservoir, Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi, Pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi, Pembangunan system penyediaan air minum dengan menggunakan sumber air ekonomis (mata air) dan air tanah dalam untuk sumber air minum komunal serta mengendalikan pembangunan fisik di kawasan sumber mata air.
- d. Realisasi Program Pengembangan Air Limbah melalui pengembangan system pengelolaan air limbah secara terpusat dengan septic tank komunal, peningkatan pengguna sanitasi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan, peningkatan pengawasan terhadap sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) non domestik, penambahan sarana operasional pelayanan truk tinja, pembangunan instalasi biogas IPLT, serta perencanaan sistem offsite dengan septic tank komunal.
- e. Realisasi program persampahan melalui Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan volume sampah kota, peningkatan



cakupan daerah pelayanan pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dengan program 3R, bank sampah, lomba persampahan, pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan, mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta maupun elemen masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

- f. Realisasi Program jaringan drainase melalui penanganan drainase tersier, normalisasi sungai dan saluran, revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya, optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer, pengamanan embung-embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik, naturalisasi Ciliwung.
- g. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau baik skala lingkungan.

Persentase pemanfaatan ruang di Kawasan lindung dan Kawasan budidaya yang sesuai RTRW sampai dengan tahun 2020 dapat tercapai sebesar 92,5%. Capaian ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap realisasi perwujudan pola ruang yang tergambar dalam perwujudan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031, yaitu bahwa kawasan lindung dan budidaya pada tahun 2018 telah mencapai 10.966,538 ha. Pencapaian target tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mewujudkan arah pembangunan Pemerintah Kota Bogor sebagai Green City, serta akses dan proses perizinan yang menjadi lebih mudah salah satunya melalui Mall Pelayanan Publik. Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh pelaksanaan program perencanaan tata ruang, program pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) dan simpul jaringan informasi geospasial;
- b. Proses perdampingan Revisi RTRW Kota Bogor tahun 2011-2031 dan proses persetujuan substansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
- c. Sosialisasi pengawasan dan pengendalian bangunan Gedung;
- d. Pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung;
- e. Pembangunan jalur hijau sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Untuk peningkatan target di tahun mendatang, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Proses persetujuan substansi dan penetapan Perda Perubahan RTRW;
- Proses pembahasan RDTR dengan Pansus DPRD;
- Pembangunan ruang terbuka hijau;
- Pengendalian dan pengawasan bangunan Gedung;
- Sosialisasi tata ruang.

F. Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi

Kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi yaitu dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, serta dengan menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran meningkatnya kualitas kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi yang diukur berdasarkan capaian indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2018			2019			2020			Akhir RPJMD	
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)
% Jalan Berkondisi Baik	-	-	-	-	-	-	89	83,47	93,79	90	92,74
% cakupan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	50	32	64	90	35,55
Capaian Sasaran Tahun 2020										Baik	

Persentase jalan berkondisi baik sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 83,47%. Dari total panjang jalan kota 719,385 km, jalan yang berkondisi baik baru mencapai 600,448 km. capaian ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 89%. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19.



Tabel 2.14
Rincian Panjang Jalan Kota Beserta Kondisi Permukaannya

No.	Kecamatan	Panjang Jalan Kota	Kondisi Permukaan Jalan (km)					
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Tanah Sareal	75,783	137,330	64,842	22.910	10,852	985	0,089
2	Bogor Utara	160,016	139,876	125,502	19.462	27,787	678	6,727
3	Bogor Timur	69,012	57,816	52,214	10.951	15,172	245	1,626
4	Bogor Selatan	136,130	125,787	131,364	9.857	4,766	486	-
5	Bogor Tengah	117,219	71,634	96,971	3.620	19,051	529	1,197
6	Bogor Barat	161,225	106,307	129,555	10.518	29,356	394	2,316
Jumlah Total		719,385	638,751	600,448	77.317	106,984	3.317	11,886

Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor (2020)

Untuk pencapaian target tahun 2020, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung yaitu:

1. Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan pada Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal.

2. Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 2

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan pada Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur.

3. Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 3

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan, Perkerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan pekerjaan perbaikan jembatan pada Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah.

4. Pemeliharaan Berkala Jalan, trotoar, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal.

5. Pemeliharaan Berkala Jalan, trotoar, Drainase, dan Jembatan Wilayah 2

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan.

6. Pemeliharaan Berkala Jalan, trotoar, Drainase, dan Jembatan Wilayah 3

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan presentase panjang jalan berkondisi mantap (baik dan sedang) dari seluruh panjang jalan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Barat.

7. Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan di daerah wisata

Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Bogor sebagai dampak pandemic covid-19. Pemerintah Kota Bogor berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata.

Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 32% dari target yang ditetapkan sebesar 50%.

Walaupun target tahun 2020 belum tercapai, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung yaitu:

1. Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Bogor dan mengurangi beban di pusat kota, dilakukan pengembangan cakupan wilayah pelayanan angkutan umum ke wilayah pinggiran untuk pemerataan pembangunan. Dalam mengembangkan system angkutan massal dan rerouting angkot, prinsip yang digunakan adalah penataan jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang atau pengumpan (*feeder*).

Tabel 2.15
Pelayanan Angkutan Umum

No.	PELAYANAN		EXISTING
A	ANGKUTAN MASSAL	JUMLAH TRAYEK	2 Trayek
		BUS SEDANG	28 Unit
		BUS KECIL / AMPERE	-
B	ANGKUTAN FEEDER	JUMLAH TRAYEK	23 Trayek
		BUS KECIL / ANGKOT	3412 Unit
C	WILAYAH KELURAHAN		59 Kel.

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (2020)

2. Pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan melalui Pengembangan *Bogor Intelligent Transport System* (BITS) dan pemasangan perlengkapan jalan. Pemasangan rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan, peningkatan dan pemeliharaan APILL, serta pengadaan dan pemasangan cermin tikungan khususnya di kawasan rawan kecelakaan dan rawan kemacetan mampu meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Bogor.
3. Penambahan personil lapangan non-ASN melalui pengadaan Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Petugas Operasional Lalu Lintas dalam mendukung pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas dengan sistem penugasan pada 7 (tujuh) wilayah pengendalian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Gambar II.14

**Kegiatan Operasi Penertiban Terpadu terhadap Kendaraan Angkutan Umum
di Jalan**



Tidak tercapainya target tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Adanya beberapa kegiatan pendukung yang terkena refocussing akibat pandemi covid 19;
2. Belum efektifnya pelaksanaan operasional pelayanan koridor/trayek angkutan perkotaan berdasarkan SK Jaringan Trayek Tahun 2018;
3. Belum berjalannya program konversi 3 : 1 dan 3 : 2;
4. Terbatasnya kemampuan permodalan dan manajemen Badan Usaha Angkutan Umum;
5. Belum layakny kondisi sarana dan prasarana (fasilitas utama dan penunjang) terminal;
6. Ketidakpastian lahan Terminal Merdeka yang masuk dalam PMD pada Perumda Pasar Pakuan Jaya;

`Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sebagaimana dimaksud diatas, hasil evaluasi terhadap capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Bogor pada Tahun 2020 dapat dijelaskan pada matrik sebagai berikut :



Misi I : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2020	Target Perjankin KD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Terhadap Target RPJMD Tahun 2020	% Terhadap Target Perjankin KD Tahun 2020
1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	73,69	73,69	73,61	98,26	99,89
2	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1 % Rumah Tangga Ber-PHBS	68	68	66,3	92,08	97,50
		2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	0,45	0,45	0,39	73,58	86,7
3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman	1 % Rumah tangga yang dilayani air minum yang aman	93,15	93,15	76,98	76,98	82,64
		2 % Rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	67,47	67,47	70,90	97,08	105,08
		3 % Luasan Kawasan kumuh kewenangan kota	2,44	2,44	2,30	70,06	105,74
		4 % Reduksi Sampah	6,4	6,4	7,61	105,69	118,91
4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	1 Indeks kualitas air	49,67	49,67	56,33	112,66	113,34
5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1 Indeks Kualitas Udara	85,9	85,9	80,09	92,80	93,24
6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan	1 % Luas ruang terbuka hijau publik	5,91	5,91	13,11	219,96	221,82

Misi II : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Target Perjankin KD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Terhadap Target RPJMD Tahun 2020	% Terhadap Target Perjankin KD Tahun 2020	
1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu Pendidikan formal dan non formal	1	Rata-rata lama sekolah	10,63	10,63	10,33	86,08	97,18
		2	Harapan lama sekolah	13,6	13,6	13,41	89,40	98,60
		3	Nilai rata-rata USBN SD	76,02	-	-	-	-
		4	Nilai rata-rata UN SMP	67,77	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas generasi muda	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,31	-	-	-	-
3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	600-610	600-610	5.162	*Tidak Dapat Dibandingkan	*Tidak Dapat Dibandingkan
4	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,5	69,5	68,91* (Th. 2019)	93,76	99,15
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	70,5	-	68,51* (Prov. Jabar)	94,49	96,49
5	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BB	BB	B* (Th. 2019)	82,57	94,36
Initiative	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan public berbasis teknologi	1	Level kematangan smart city	Scattered	Initiative	Integrative	76	305



Misi III : Menjadikan Bogor Kota yang Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	Target Perjankin KD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	% Terhadap Target RPJMD Tahun 2020	% Terhadap Target Perjankin KD Tahun 2020
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	8,47	8,47	12,68	33,16	50,30
2	Menurunnya angka kemiskinan	1	Angka kemiskinan	5,8	7,22	6,68	66,40	84,83
3	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	1	Indeks Ketahanan Keluarga	73-74	73-74	85,2	112,11	116,71
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,66	3,5	-0,53	7,57	7,96
		2	PDRB Per Kapita	40,36	40,36	41,79* (Th. 2019)	83,84	103,54
		3	Pengeluaran per kapita	11.124	11.124	11.564	100,52	103,96
		4	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	20	20	19,11	76,44	95,55
5	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	20	20	48,7	48,7	243,50
		2	% realisasi rencana pola ruang (periode rencana 2020-2024)	20	20	92,5	92,5	462,50
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	% Jalan berkondisi baik	89	89	83,47	92,74	93,79
		2	% cakupan pelayanan angkutan umum	50	50	32	35,55	64

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, sebagaimana tertuang dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.16
Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pajak Daerah	398,435,398,328	492,138,653,391	555,477,512,682	592,978,746,862	689.543.006.040	509.039.468.746
1.1.2	Retribusi Daerah	46,219,894,849	62,727,631,456	49,046,366,179	48,414,245,997	51.362.153.192	35.010.375.259
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,807,740,268	33,107,211,225	29,949,487,128	26,772,427,406	28.241.844.911	31.927.293.792
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154,134,016,696	195,900,091,147	267,354,262,108	240,081,650,933	246.737.212.776	296.069.787.730
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	627,597,050,141	783,873,587,219	901,827,628,097	908,247,071,198	1.015.884.216.919	872.046.925.527

Sumber: Diolah dari Laporan keuangan Kota Bogor 2015-2019

PAD selama kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11.17%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 36.34%.



Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

- a) Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
- b) Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif
- c) Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :
- d) Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65.29% dari total PAD 2018 dan meningkat menjadi 67.87% dari total PAD pada tahun 2019
- e) Lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak daerah yaitu sebesar 26.43% dari total PAD tahun 2018 dan 24.29% dari total PAD pada tahun 2019
- f) retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 5.33% dari Total PAD 2018 dan 5.06% dari total PAD tahun 2019
- g) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2.95% dari total PAD 2018 dan 2.78 % dari total PAD tahun 2019

Grafik

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen Tahun 2015-2019



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2019

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negative Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan.



Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Dengan adanya kebijakan pembatasan social dalam rangka menekan laju persebaran virus Covid-19 maka secara otomatis berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas ekonomi. Penurunan Penerimaan Pajak Daerah berupa pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sangat terpengaruh signifikan karena menurunnya aktivitas pariwisata di Kota Bogor. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai upaya untuk tetap mendorong penerimaan sector pajak daerah di masa pandemi, antara lain :

- a) memberikan Stimulus bagi Wajib Pajak di Kota Bogor yang jenis usahanya terkena dampak akibat Pandemi COVID-19, melalui penetapan peraturan Walikota sebagai berikut :
- b) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terhutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, 4 (empat) jenis Pajak Daerah tersebut diatas, dalam pembayaran masa pajak bulan April, Mei, dan Juni 2020 jatuh tempo pembayaran pajaknya tidak dikenakan denda sanksi administrasi sampai tanggal 30 Juni 2020.

- c) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB P2 masa Pajak sampai dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Kejadian Luar Biasa COVID-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki Objek PBB P2 di Kota Bogor mendapatkan pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2020 dengan pembayaran masa pajak bulan April sebesar 15%, dan masa Pajak Bulan Mei sebesar 10%, serta masa Pajak di Bulan Juni sebesar 5%. Dan pembebasan pembayaran sanksi administratif tunggakan PBB P2 Sampai dengan tahun 2019.
- d) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Terhutang BPHTB Tahun 2020 sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa COVID-19 di Kota Bogor. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak BPHTB untuk mendapatkan pengurangan sebesar 10% untuk masa Pajak Bulan Mei dan Juni 2020.
- e) Mendorong percepatan pemulihan sector ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, terutama pemulihan dan penguatan pertumbuhan sector Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
- f) Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak di era adaptasi kebiasaan baru (AKB);
- g) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha, salah satunya melalui penataan reklame dan sebagainya.
- h) Mendorong inovasi dalam pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru untuk mempercepat pengembalian pertumbuhan ekonomi daerah.



Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020, masih berada pada kisaran Rp 872.046.925.527,- atau turun sebesar 14,15% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 996.655.000.000,-, kinerja realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2020 masih mencapai 87,5 %.

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Dari sisi belanja berikut ini adalah gambaran realisasi belanja pada Tahun 2019-2020 berdasarkan struktur belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.17
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
II.	BELANJA DAERAH	2.528.507.371.799	2.290.571.687.339
A.	Belanja Operasi		
	1. belanja Pegawai	1.181.891.175.329	1.010.375.376.986
	2. belanja bunga	6.578.046.142	5.427.749.091
	3. belanja subsidi		-
	4. belanja hibah	79.149.334.000	93.233.837.587
	5. belanja bantuan sosial	46.743.921.755	43.678.702.506
	6. belanja barang dan jasa	711.106.178.176	798.213.394.942
B.	Belanja Modal	501.033.407.778	276.157.283.029
C.	Belanja Tidak Terduga	9.455.600	62.350.812.198
D.	Belanja Transfer		
	1. Belanja Bagi Hasil		
	2. Belanja Bantuan Keuangan	1.995.853.019	1.134.531.000

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2020

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dalam laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja yang mendukung pelaksanaan pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor. Berikut Pengukuran Kinerja Keuangan yang dihitung dengan membandingkan Pagu Anggaran dengan Realisasi yang mendukung setiap sasaran kinerja:

Misi 1. MEWUJUDKAN KOTA SEHAT

No.	Sasaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	424.999.675.804,19	423.013.715.105,00	99,53
2.	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	6.690.974.000,00	6.670.743.310,00	99,70
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	132.526.371.250,00	120.660.896.297,00	91,05
4.	Terkendalinya sumber-sumber pencemaran air	17.674.989.420,00	16.170.154.714,00	91,49
5.	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	152.984.800,00	136.025.250,00	88,91
6.	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	8.934.353.250,00	8.297.180.547,00	92,87

Misi 2. MEWUJUDKAN KOTA CERDAS

No.	Sasaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	150.847.699.068,00	141.218.653.905,00	93,62
2.	Meningkatnya kualitas generasi muda	5.801.078.150,00	5.072.787.153,00	87,45
3.	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	583.178.400,00	554.010.100,00	95
4.	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	8.441.319.700,00	7.076.839.398,00	83,84
5.	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	334.178.751.238,00	296.598.559.874,20	88,75
6.	Meningkatnya kualitas	1.947.147.000,00	1.806.465.000,00	92,77



No.	Sasaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (Smart City)			

Misi 3 MEWUJUDKAN KOTA SEJAHTERA

No.	Sasaran	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Menurunnya tingkat pengangguran	1.455.932.900,00	1.078.391.500,00	74,07
2.	Menurunnya tingkat kemiskinan	878.008.400,00	806.757.290,00	91,88
3.	Meningkatnya ketahanan keluarga	9.729.216.700,00	8.873.413.737,00	91,20
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	21.894.902.606,00	15.696.323.025,00	71,69
5.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	10.866.000.000,00	7.071.425.209,00	65,08
6	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	72.527.557.050,00	62.231.716.850,00	85,80

Akuntabilitas kinerja keuangan juga mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai sasaran kinerja. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dengan hasil yang maksimal. Dari rata-rata capaian kinerja yang mencapai target dan melebihi target serta efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat dari 17 sasaran strategis terdapat sasaran strategis yang memiliki efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Berikut capaian efisiensi pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja (\geq %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	99,89	99,53	0,36
2.	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	92,1	99,70	-7,6
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	103,09	91,05	12,04
4.	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	113,34	91,49	21,85
5.	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	93,24	88,91	4,33
6.	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	221,82	92,87	128,95
7.	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	97,89	93,62	4,27
8.	Meningkatnya kualitas generasi muda	(tidak ada target)	87,45	-
9.	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat		95	
10.	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	97,82	83,84	13,98
11.	Tercapainya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	94,36	88,75	5,61
12.	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	305	92,77	212,23
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	50,3	74,07	-23,77
14.	Menurunnya kemiskinan	84,83	91,88	-7,05
15.	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	116,71	91,20	25,51
16.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	77,75	71,69	6,06
17.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	353	65,08	287,92
18.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transparansi	76,89	85,80	-8,91

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sebagian urusan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Sedangkan urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bogor tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kota Bogor yang didanai dari APBN. Adapun Bantuan yang di terima Kota Bogor tahun 2020 baik dari pemerintah Pusat melalui Kementerian maupun dari Bantuan Provinsi Jawa barat seluruhnya masuk kedalam Kas Daerah melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pemerintah Kota Bogor tidak memiliki desa, sehingga tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Layanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis layanan dasar tersebut adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	JUMLAH TARGET CAPAIAN	PEMBIAYAAN APBD/APBN (RP)	KETERANGAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	51.09	2,853,383,000.00	Dinas Pendidikan Kota Bogor
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun -25- (SD/Mi, SMP/MTs)	100		175,859,503,595.20	Dinas Pendidikan Kota Bogor
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100		415,800,000.00	Dinas Pendidikan Kota Bogor

3. Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	KETERANGAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	49,66	51,09	Dinas Pendidikan Kota Bogor
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 % Setiap Tahun -25- (SD/Mi, SMP/MTs)	122,65%	101,29	Dinas Pendidikan Kota Bogor
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,42%	0,7	Dinas Pendidikan Kota Bogor

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp 80.860.708.971,- (Delapan Puluh Miliar Delapan Ratu Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah.);
- b. APBN sebesar Rp.98.267.978.424,- (delapan puluh Sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan

5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah sebagai berikut :



No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	3.191	S3 : 2 orang S2 : 197 orang S1 : 2.247 orang D3 : 27 orang D2 : 213 orang D1 : 23 orang SMA : 81 orang SMP : 16 orang SD : 16 orang	Gol IV : 1.412 orang, Gol III : 1.321 orang Gol II: 83 orang Gol I : 6 orang 2.822	Eselon II :1 orang Eselin III : 5 orang Eselon IV :15 orang	Orang 2.822 (termasuk guru)

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

I. Permasalahan

1. Pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, masih terjadi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di beberapa Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih belum terserap optimal;
2. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi penurunan disebabkan data peserta didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun 2019.4.
3. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Bogor diatas umur 25 tahun yang masih belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kota bogor memiliki angka rata rata lama sekolah, mulai darifaktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

II. Solusi

1. Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik;

2. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya.
3. Mengajak masyarakat kota bogor khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);



2. Target Pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,6%	14.750.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	93,1%	17.803.000
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	93,1%	32.560.000
4.	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	78,8%	12.241.500
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	51%	-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	18.8%	872.458.500
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	60.2%	11.566.000
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68.8%	161.976.978
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88.5%	19.350.000
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	88.4%	52.843.500
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	104.1%	969.327.809
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95.7%	1.167.670.000

3. Realisasi

No.	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian (2019)	Realisasi Capaian (2020)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,30%	93,6%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	99,10%	93,1%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	103,5%	93,1%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	78,8%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	51%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Usai produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	78,67 %	18.8%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	60.2%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	62,80 %	68.8%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	102,9%	88.5%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang dengan ODGJ	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	89,2 %	88.4%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	110,8 %	104.1%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang dengan terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	86,38%	95.7%



4. Alokasi anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp.406.183.700,- (Empat ratus enam juta seratus delapan puluh tiga tujuh ratus rupiah)
- b. APBN sebesar Rp. 2.763.867.587,- (dua milyar tujuh ratus enampuluh tiga delapan enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan
- c. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. 162.496.000,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor (Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah) adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	<p>PNS : 646 orang</p> <p>Non PNS : 187 orang</p> <p>Jumlah : 833 orang</p>	<p>PNS</p> <p>S2 : 35 orang</p> <p>S1 : 259 orang</p> <p>D4 : 18 orang</p> <p>D3 : 275 orang</p> <p>D1 : 1 orang</p> <p>SMA/ sederajat : 58 orang</p> <p>Jumlah : 646 orang</p>	<p>Gol IV : 151 orang</p> <p>Gol III : 431 orang</p> <p>Gol II : 64 orang</p> <p>Jumlah : 646 orang</p>	<p>Es. II : 1 orang</p> <p>Es. III : 5 orang</p> <p>Es. IV : 15 orang</p> <p>Jumlah : 21 orang</p>	<p>PNS Dinas : 15 orang</p> <p>Puskesmas dan Labkesda : 559 orang</p> <p>Jumlah : 574 orang</p>

6. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 yang tidak memenuhi target 100%, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2020 belum terpenuhi karena kondisi pandemi dimana pelayan posyandu tidak ada, banyak ibu hamil yang takut untuk datang ke fasilitas kesehatan 2. Untuk kegiatan EMAS baru terlaksana sampai K1 karena kondisi pandemi 3. Kegiatan pertemuan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan karena kondisi pandemi 4. Laporan dari PKM terkadang mengalami keterlambatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Janji temu 2. Melakukan konsultasi via WA atau telepon 3. Kegiatan melalui Zoom meeting 4. Setiap akhir bulan melalui group WA mengingatkan kembali puskesmas untuk segera mengumpulkan laporan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	93.1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak maksimal dalam melakukan kegiatan PONEB karena kondisi pandemi sehingga penguatan PONEB dilakukan secara virtual 2. Pendampingan EMAS pada tahun 2020 yang seharusnya di laksanakan di 2 RS dan 3 Puskesmas tidak terlaksana, pendampingan EMAS baru di laksanakan sampai kunjungan 1 di 2 RS. 3. Dimasa pandemi ini kegiatan posyandu sejak bulan maret sampai saat ini masih belum berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Janji temu 2. Melakukan konsultasi via WA atau telepon 3. Penguatan PONEB dilakukan melalui Zoom meeting
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96.6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak maksimal dalam melakukan kegiatan PONEB karena kondisi pandemi sehingga penguatan PONEB dilakukan secara virtual 2. Pendampingan EMAS pada tahun 2020 yang seharusnya di laksanakan di 2 RS dan 3 Puskesmas tidak terlaksana, pendampingan EMAS baru di laksanakan sampai kunjungan 1 di 2 RS. 3. Dimasa pandemi ini kegiatan posyandu sejak bulan maret sampai saat ini masih belum berjalan 4. Kelas ASI tidak dilaksanakan dikarenakan pandemic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Janji temu 2. Manfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	78.8%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target tahun 2020 belum terpenuhi karena kondisi pandemi 2. Banyak ibu yang takut untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya 3. Posyandu dan Kelas ibu balita tidak dilakukan di masa pandemic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Janji temu 2. Manfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum dilakukannya pembelajaran tatap muka, sehingga petugas kesehatan kesulitan untuk melakukan skrining secara langsung 2. penjarangan dilakukan dengan mengisi data oleh masing-masing orang tua murid melalui aplikasi, namun tidak semua orang tua murid memiliki android yang dapat melakukan pengisian data melalui aplikasi yang sudah ada. 3. Dari pedoman penjarangan anak sekolah, bila ada 1 sekolah di suatu wilayah belum dilakukan penjarangan maka Puskesmas dianggap belum melakukan penjarangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Janji temu 2. Manfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan 3. Peserta didik yang tidak mempunyai HP, bisa dilakukan pengisian aplikasi penjarangan oleh guru.



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.8%	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kebijakan PSBB pada bulan April 2020 yang melarang adanya kegiatan mengumpulkan orang, sehingga Posbindu PTM tidak dapat dilakukan. Kegiatan skrining hanya dapat dilakukan di dalam gedung (Puskesmas), yaitu bagi pengunjung Puskesmas dan pengantar yang berusia >15 thn keatas.2. Penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-193. Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none">1. Mengacu pada kegiatan pelayanan Posbindu sesuai dengan Juknis pelayanan Posbindu di masa AKB dari Kemkes RI, dan SE dari Dinas Kesehatan Kota Bogor Nomor: 443/3014/VIII/P2P/2020 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM selama masa AKB2. Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM3. Pelaksanaan kegiatan selama pandemi Covid-19, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.2%	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi Pandemi Covid 19 membuat kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terbatas kecuali untuk kondisi darurat.2. Banyak masyarakat (lansia) yang merasa takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Janji temu2. Manfaatkan WAG untuk memberi informasi dan pengetahuan



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	68.8%	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM puskesmas terbatas dan memegang program rangkap, sehingga pengumpulan data untuk beberapa puskesmas tidak tepat waktu 2. penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 3. Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 4. Kondisi PSBB membuat masyarakat takut untuk datang ke fasilitas kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev secara berkala setiap bulan / pertriwulan kepada pemegang program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu ke dinas kesehatan 2. Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM 3. Pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi dilakukan secara daring, bagi yang memiliki alat ukur mandiri dapat dilakukan deteksi secara mandiri dan menyampaikan hasil pengukuran tekanan darah kepada petugas programer PTM Puskesmas, monitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita Hipertensi. 4. Pengambilan obat untuk pasien Hipertensi dapat dilakukan untuk kebutuhan 30 hari, dan diperbolehkan melalui kader ataupun keluarga pasien untuk pengambilan obat lanjutan

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	88.5%	<ol style="list-style-type: none"> SDM puskesmas terbatas dan memegang program rangkap, sehingga pengumpulan data untuk beberapa puskesmas tidak tepat waktu penganggaran kegiatan mengalami pengurangan, dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19 Pelaksanaan kegiatan ada yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monev secara berkala setiap bulan / pertriwulan kepada pemegang program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu ke dinas kesehatan Mengefisiensikan kegiatan dan memilah dengan memprioritaskan kegiatan SPM Pelayanan Kesehatan bagi penderita DM dilakukan secara daring, bagi yang memiliki alat ukur mandiri dapat dilakukan deteksi secara mandiri dan menyampaikan hasil pengukuran kadar gula darah kepada petugas programer PTM Puskesmas, monitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita DM. Pengambilan obat untuk pasien DM dapat dilakukan untuk kebutuhan 30 hari, dan diperbolehkan melalui kader ataupun keluarga pasien untuk pengambilan obat lanjutan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	88.4%	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi Pandemi Covid 19 membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan ditiadakan sementara, kecuali untuk kondisi darurat. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas. Jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi pasien ODGJ di masa pandemi Covid-19 untuk beberapa pasien menjadi kurang teratur: menyebabkan kondisi kekambuhan kembali pada ODGJ atau putus obat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan pendampingan dan monitoring kondisi pasien ODGJ, yaitu untuk mengurangi risiko putus obat dan kekambuhan pada pasien ODGJ. Tenaga kesehatan melakukan pendampingan melalui on call atau metode daring, baik pada pasien ODGJ, keluarga pasien, dan kader keswa. Melakukan kunjungan rumah untuk keadaan darurat dengan protokol kesehatan yang berlaku



No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)	Permasalahan	Solusi
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	95.7%	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan HIV; Masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang HIV; SDM yang masih kurang dalam melakukan skrining pada populasi kunci pada setiap wilayah kerja layanan; Belum semua faskes melakukan input data Pasien secara mandiri ke SIHA 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan skrining HIV kepada masyarakat; Penyebaran informasi tentang HIV dan skrining kepada sasaran usia muda (anak sekolah dan kuliah), usia produktif (para pekerja di instansi/pabrik yang masih kurang terpapar informasi tentang HIV); Penambahan tenaga kesehatan baik pns atau non pns dalam melakukan skrining hiv pada populasi kunci; Melakukan Edukasi ke petugas/ OJT

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dengan demikian, maka Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik ini diawali dengan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang tingkat capaian air limbah domestiknya sangat rendah, tentu saja banyak sekali kendala yang dihadapi seperti ketersediaan lahan, perilaku masyarakat dan sumber dana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian 2020 (%)	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Daerah Kabupaten/Kota (PDAM + Non PDAM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	93,15	201.338.000.000	Dinas PUPR Kota Bogor
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100	67,47		Dinas PUPR Kota Bogor

3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2020 (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	92,83	76,92	PDAM/JP: 72,67 Non PDAM/BJP: 4,31
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	70,55	71,50	(67,47% akses layak, 4,03 % akses aman)



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

Urusan Air Minum:

- a. Cakupan pelayanan turun di karenakan :
 - 1 Rumah = 6 jiwa berdasarkan (Permendagri 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum)
 - 1 Rumah = 5 Jiwa (perhitungan berdasarkan juklak dan juknis BPPSPAM tentang penilaian kinerja) mengacu kepada Data BPS Kota/ kab Setempat
- b. Permendagri 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjelaskan bahwa dasar perhitungan cakupan air minum Jaringan Perpipaan menggunakan standar 1 Rumah adalah 6, tetapi saat ini sudah menggunakan standar yang digunakan Juklak Juknis dari BPPSPAM, yaitu 1 rumah adalah 5 jiwa.
Dengan demikian terdapat perubahan realisasi cakupan jaringan perpipaan yang semula 92 % menjadi 72 %.
- c. Anggaran yang menunjang capaian air minum jaringan perpipaan bersumber dari dana Perumda Tirta Pakuan dan APBN, sedangkan untuk anggaran air minum bukan jaringan perpipaan, tahun 2020 tidak ada anggaran baik dari APBD maupun dari PBN, tetapi merupakan dana swadaya dari masyarakat untuk kegiatan penambahan dan pemeliharaan sarana air minum bukan jaringan perpipaan
- d. Upaya untuk mencapai target air minum baik Jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan adalah:
 - Meningkatkan akses aman air minum

- Penambahan jumlah pelanggan, dengan menekankan pemicuan dan sosialisasi
- Pengembangan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan
- Dukungan Pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, dan dana lainnya yang sah.
- Jaminan Ketersediaan Air Baku

Urusan Air Limbah :

- a. APBD Kota Bogor sebesar Rp. 4.058.546.200,- (Terbilang: Empat Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah);

Urusan Air Minum:

- e. Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan air limbah domestik adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Tren belanja sanitasi di Kota Bogor dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir diperoleh berdasarkan data-data terkait keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pokja Sanitasi dan Air Minum melakukan kajian keuangan daerah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.
- f. strategi pengembangan air limbah domestik ditetapkan berdasarkan misi pengembangan sanitasi yang diturunkan dari visi misi Kota Bogor yang termuat dalam RPJMD 2019-2024. Adapun misi dalam pengelolaan air limbah domestik yang disepakati oleh Pokja (Kelompok Kerja) Sanitasi Kota Bogor adalah sebagai berikut.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- h. Menumbuhkembangkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.



- i. Meningkatkan Akses sanitasi layak dan aman

5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas PUPR Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	17 orang	S3 : - orang S2 : 4 orang S1 : 4 orang D3 : 2 orang D2 : - orang D1 : - orang SMA : 7 orang SMP : - orang SD : - orang	Gol IV : 3 orang, Gol III : 7 orang Gol II : 7 orang Gol I : - orang	Eselon II : 1 orang Eselon III : 2 orang, Eselon IV : 3 orang	- orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi	Recana Tindak lanjut
A. Perencanaan 1. Data dasar penerima manfaat yang belum lengkap (by name by address)	Identifikasi dan inventarisasi data dasar penerima manfaat SPM di Kota Bogor	Kegiatan Pengadaan Tangki Septik Individu dan Optimalisasi IPAL Komunal.
B. Pendanaan 1. Untuk kegiatan air minum membutuhkan dana yang sangat besar/tinggi	Mencari sumber dana lainnya selain dari APBD	Pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan keuangan Propinsi maupun DAK.
C. Lain-lain 1. Ketersediaan air baku yang semakin menipis. 2. Pengembangan layanan pipa untuk jaringan air minum. 3. Ketersediaan lahan untuk tangki septik individu.	Mencari sumber air baku lainnya. Pengembangan jaringan pipa pelayanan air minum. Penyediaan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal.	Penambahan sumber air baku (mata air dan sungai). Penambahan kapasitas dan cakupan layanan air minum. Pengadaan lahan untuk pembangunan IPAL Komunal.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang

Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target Capaian (%)	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	3.443.265.000	Dinas Perumkim Kota Bogor
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100		Dinas Perumkim Kota Bogor

3. Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2019 (%)	Target Capaian Tahun 2020 (%)	Keterangan
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	Jumlah target 10 orang dan capaian 10 orang terdiri dari 3 KK
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	Jumlah target 4 orang dan capaian 4 orang terdiri dari 1 KK

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 3.443.265.000,00 (*tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

5. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1.	7 Orang	S2 : 2 Orang SMA : 5 Orang	Gol III : 2 Orang Gol II : 5 Orang	Eselon III : 1 orang Eselon IV : 1 orang	

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdapat permasalahan mengenai sulitnya data yang diperoleh dikarenakan belum adanya data yang valid mengenai jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sulitnya koordinasi antara pihak-pihak terkait sehingga data yang dibutuhkan tidak tersedia. Adapun data yang bisa kami sampaikan merupakan data yang tersedia dari UPTD Rumah Susun Sewa yang mengakomodir sebanyak 10 orang korban bencana dan 4 orang yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.

b. Solusi

Solusi yang tepat untuk permasalahan yang diperoleh adalah koordinasi antar pihak terkait baik Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota dan Perangkat Daerah yang mendata dan menangani warga korban bencana maupun yang terkena relokasi akibat program Pemerintah

Daerah, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta penanganan untuk para korban pun bisa efektif.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Pembiayaan APBD/APBN (Rp)	Rumusan/ Perhitungan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	60.675.000	10 ----- x 100% 10
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	200.000.000	23.245 ----- x 100% 23.245
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	140.000.000	10.858 ----- x 100% 10.858



4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	697.909.000	12.889 ----- x 100% 12.889
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	41.474.000	10 ---- x 100 % 10

3. Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Capaian Tahun 2019 (%)	Realisasi Capaian Tahun 2020 (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	Satpol PP Kota Bogor
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	BPBD Kota Bogor
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	Satpol PP Kota Bogor

4. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut:

- 1) APBD Kota Bogor sebesar Rp60.675.000,- (Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 2) APBN, tidak ada; dan
 - 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.
- b. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub Urusan Bencana oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :
- 1) APBD Kota Bogor sebesar Rp. 1.970.825.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) APBN, tidak ada; dan
 - 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.
- c. Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub Urusan Kebakaran oleh Pemerintah Kota Bogor, adalah sebagai berikut :
- 1) APBD Kota Bogor sebesar Rp41.474.000,- (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - 2) APBN, tidak ada; dan
 - 3) Sumber dana lain yang sah, tidak ada.

5. Dukungan Personil

- a. Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Sub Urusan ketenteraman, ketertiban umum adalah sebagai berikut :



No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	459 orang	S3 : 0 orang S2 : 8 orang S1 : 20 orang D4 : 3 orang D3 : 2 orang D1 : 0 orang SMA:231 orang SMP:14 orang SD : 15 orang	Gol IV : 5 orang, Gol III : 50 orang Gol II : 227 orang Gol I : 11 orang	Eselon II :1 orang Eselon III :5 orang, Eselon IV :15 orang	166 Orang

- b. Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	21 orang	S3 : - orang S2 : 3 orang S1 : 8 orang D3 : - orang D2 : - orang D1 : - orang SMA: 10 orang SMP : - orang SD :- orang	Gol IV : 1 orang, Gol III : 10 orang Gol II : 10 orang Gol I : - orang	Eselon II : orang Eselon III : 1 orang, Eselon IV : 4 orang	- orang

- c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	72 Orang	S3 : - orang S2 : 1 orang S1 : 7 orang D3 : orang D2 : orang D1 : orang SMA : 53 orang SMP : 9 orang SD : 2 orang	Gol IV : 1 orang, Gol III : 7 orang Gol II : 53 orang Gol I : 11 orang	Eselon II : orang Eselon III:1 orang, Eselon IV:3 orang	-

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat masalah yang nampak dari kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kota Bogor sebagai berikut:
 - a) Keberadaan PKL yang mengganggu ketertiban umum dengan menggunakan badan jalan dan trotoar serta jalur hijau;
 - b) Pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - c) Perilaku sebagian masyarakat tidak sesuai dengan norma sosial dan ketertiban umum;
 - d) Banyak Anjal dan Gepeng yang beberapa kali terkena razia, tipiring kembali beroperasi di jalan karena tindak lanjut dan kurang optimalnya pembinaan dari Dinsos;
 - e) Banyaknya anak putus sekolah yang terus berubah profesi menjadi anak jalanan;
 - f) Tidak adanya rumah/ Panti Rehabilitasi yang khusus di Kota Bogor untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
 - g) Makin bertambahnya angka pengangguran sehubungan kurangnya lapangan pekerjaan, dan anak/ remaja putus sekolah banyak yang turun ke jalan untuk melakukan kegiatan mengamen dan meminta – minta;
 - h) Banyak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatannya pada sore hingga malam hari di saat para Petugas sedang tidak ada;
 - i) Tidak adanya regenerasi anggota Linmas yang sudah usia lanjut;
 - j) Masih dipandang rendah oleh masyarakat sehingga generasi muda tidak mau untuk menjadi anggota Linmas;
 - k) Kurangnya sosialisasi kemasyarakatan tentang keberadaan Linmas di Kota Bogor;
 - l) Perlu perhatian terhadap anggota Linmas secara manusiawi.



Permasalahan tersebut di atas merupakan konsekuensi dari perkembangan, pertumbuhan suatu kota dan kebutuhan individu dan merupakan permasalahan Kota Bogor karena :

- Keterbatasan daya tampung tempat di Kota Bogor dengan adanya keberadaan PKL;
- Adanya penambahan pemukiman dan penambahan sarana transportasi pribadi;
- Masih rentannya perekonomian masyarakat, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat yang rendah dan adanya urbanisasi penduduk dari berbagai Daerah sehingga perilaku masyarakat menyimpang dari norma sosial.

- 2) Permasalahan pelayanan sub urusan bencana yang dihadapi oleh BPBD yaitu masih rendahnya antusias dan kepedulian warga ketika dilakukan sosialisasi dan mitigasi bencana. Mereka menganggap bahwa kejadian banjir ataupun longsor yang terjadi merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat tidak siap dan baru mencari informasi penanggulangan terhadap bencana yang terjadi, lokasi rawan bencana biasanya terjadi pada jalur Infeksi sungai yang merupakan fasilitas umum/fasum, sehingga tidak ada izin kepemilikan secara resmi. Hal ini menjadi masalah saat pemberian bantuan tempat tinggal sementara saat terjadinya bencana. Dalam hal terjadi bencana BPBD Kota Bogor hanya dapat membantu tahap awal penanganan bencana berupa logistik seperti makanan siap saji dan paket kebutuhan sekolah (tas, buku, seragam). Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut BPBD Kota Bogor memberikan alat bantu sementara berupa terpal, dan Kurangnya SDM dan Peralatan Rescue. Jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor sampai tahun 2020 hanya 21 Orang termasuk pejabat Struktural. Hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan penanganan kebencanaan. Selain itu BPBD Kota Bogor juga belum ditunjang dengan peralatan rescue yang lengkap.

b. Solusi

- 1) Solusi yang perlu diambil dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor adalah :
 - a) Disediakkannya relokasi terhadap para PKL pasca dilaksanakannya penertiban;
 - b) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;
 - c) Pemantauan kegiatan sosial masyarakat dan peningkatan kinerja penegakan Trantibum, Linmas dan Penegakan Peraturan Daerah
 - d) Harus ada Panti Rehabilitasi untuk pembinaan kepada anjal dan gepeng di kota bogor
 - e) Harus ada kerjasama antara instansi terkait untuk menangani anjal dan gepeng supaya penanganannya maksimal dan anak yang Putus sekolah harus di data dan kembalikan lagi supaya masuk sekolah lagi.
 - f) Perlu penataan ulang anggota Linmas yang masih produktif dan mau untuk menjadi anggota Linmas
 - g) Harus sering melakukan sosialisai kesetiap Kelurahan bahwa keberadaan Linmas Itu Penting
 - h) Perlu memberikan honorarium linmas sebagaimana honorarium RT dan RW
 - i) Perlu dilakukan Tipiring dan Sidang di tempat.
- 2) Solusi dari permasalahan pelayanan sub urusan bencana oleh BPBD dengan terus melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa penyuluhan, pelatihan dan simulasi secara langsung maupun tidak langsung (melalui web, twitter, instagram, dan WhatsApp), untuk korban yang tempat tinggalnya rusak permanen/tidak dapat ditinggali BPBD menyediakan tempat tinggal sementara (kontrakan rumah maksimal selama 3 bulan) dengan syarat ada dokumen kepemilikan yang sah terhadap rumah yang rusak parah, mengidentifikasi penilaian kerusakan (*assessment*) untuk penanganan bantuan fisik bangunan (perbaikan

bronjong, tembok penahan tanah dan bangunan rumah) dan membantu merekomendasikan dengan OPD teknis, rekrutmen relawan Non PNS dan menambah peralatan untuk penanggulangan bencana.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

a. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

b. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain;

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;

- 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.
3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
- 1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

Berdasarkan data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Tahun 2020, Jumlah sasaran garapan yang termasuk kedalam objek sasaran SPM adalah sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut :

Tabel 4.1
Data PMKS/PPKS Sasaran Garapan SPM Sosial
Tahun 2019 – 2024

No.	JENIS PMKS/PPKS	Eksisting 2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Disabilitas Terlantar	75 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Anak Terlantar	61 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Lansia Terlantar	46 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Gelandangan dan Pengemis	86 orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Data Bencana	1.040 jiwa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Berdasarkan tabel tersebut, data eksisting 2020 adalah merupakan populasi PPKS yang akan menjadi sasaran intervensi dengan target per tahun sebesar 100% sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah populasi paling sedikit adalah jumlah Lanjut Usia Terlantar sebanyak 46 orang. Sedangkan jumlah terbesar adalah Gelandangan Pengemis yaitu 86 orang dengan indikator : Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya), tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus dan tidak memiliki tempat tinggal tetap .

Adapun rumusannya adalah : Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

Untuk Tahun 2020 adalah merupakan tahun ke 2 didalam pencapaian target SPM berdasarkan indikator baru dengan target tahunan ditetapkan sebesar 100 (seratus) %. Di Tahun ini Dinas Sosial menentukan populasi dari jumlah populasi terdalam sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Didalam perhitungan anggaran, karena Program Kegiatan Tahun 2020 masih mengacu pada Program Kegiatan lama sehingga didalam alokasi anggaran tidak bersifat spesifik seperti disabilitas, gelandangan dan pengemis, melainkan disesuaikan dengan sasaran garapan yang termasuk kedalam kategori PMKS secara global, namun demikian materi dari SPM tetap menyatu didalam program dan kegiatan tersebut.

Selengkapnya mengenai target SPM Sosial Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel pada halaman berikut :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan SPM	Target (%)	Pembiayaan (Rp.)	Ket
1	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	100	36,930,800	APBD II
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	100	23,464,800	APBD II
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	100	26,182,400	APBD II
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	100	81,743,800	APBD II
5	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100	187,038,000	APBD II
	JUMLAH		355,359,800	APBD II

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa alokasi anggaran untuk SPM di Kota Bogor hanya berdasarkan anggaran dari APBD Kota Bogor saja , dan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APBD Kota Bogor masih sangat terbatas.

3. Realisasi

Tabel 4.3
Realisasi capaian SPM Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma , dengan kegiatan : a. Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		2. Penyediaan permakanan		Makan di Rumah Singgah
		3. Penyediaan sandang		Perlengkapan pakaian di Rumah Singgah
		4. Penyediaan Alat Bantu		Kursi roda
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual	Fasilitasi ke Balai			



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		dan sosial		rehabilitasi
		7. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluarga Penyandang disabilitas terlantar		-
		8. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		9. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		-
		12. Layanan rujukan		-
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan : a. Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Makan di Rumahb Singgah
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan Pakaian di Rumah Singgah
		5. Penyediaan Alat Bantu		-
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		-
		8. Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga Anak Terlantar		-
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama Sakti Peksos dan TKSK

No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		13. Lay.Rujukan		Fasilitasi bersama Sakti Peksos
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, dengan kegiatan : a. Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar	Permudahan data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Makan di Rumah Singgah , Home Care
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan Pakaian di Rumah Singgah
		5. Penyediaan Alat Bantu		Kursi roda
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Fasilitasi ke Faskes/layanan SKTM
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Pelayanan Home Care
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluargaPenyandang disabilitas terlantar		Pelayanan Home Care
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		--
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Pelayanan Home Care
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Pelayanan Home Care
		13. Layanan rujukan		Pelayanan Home Care
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan : a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Permudahan data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan		Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		-
		4. Penyediaan sandang		-
		5. Penyediaan Alat Bantu		-
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		-
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual		Assesment pendahuluan



No	Jenis Pelayanan SPM	Sub Kegiatan dalam SPM	Nama Program/Kegiatan	Jenis Bantuan Yang diterima
		dan sosial		
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluargaPenyandang disabilitas terlantar		-
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama sakti peksos
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama sakti peksos
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber
5.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	1. Layanan data dan pengaduan	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya dengan kegiatan :	Pemutakhiran data dan penerimaan layanan pengaduan
		2. Layanan kedaruratan	a. Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana	Fasilitasi ke sistim sumber/Balai Rehabilitasi
		3. Penyediaan permakanan		Natura
		4. Penyediaan sandang		Perlengkapan laki dan perempuan
		5. Penyediaan Alat Bantu		Perlengkapan kebencanaan
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan		Kerjasama dengan Puskesmas/RSU
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial		Refungsionalisasi pasca bencana
		8. Pemberian Bimbingan sosial sosial kepada keluarga yang terkena bencana		Refungsionalisasi fisik, mental dan sosial pasca bencana
		9. Fasilitasi pembuatan NIK, Akteu kelahiran, Surat Nikah dan KIA		-
		10. Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		-
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga dan/atau		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Fasilitasi bersama Sakti Peksos, Tagana dan TKSK
		13. Layanan rujukan		Fasilitasi ke sistim sumber

Capaian SPM Bidang Sosial pada Tahun 2020 adalah :

a. Rehabilitasi sosial dasar **Penyandang Disabilitas Terlantar** di luar panti ;

- 1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 75 orang ;
- 2) Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti sebanyak = 75 orang
- 3) Perhitungan :

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Penyandang Disabilitas di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

4) Nilai capaian : $75 / 75 \times 100\% = 100 \%$

b. Rehabilitasi sosial dasar **Anak Terlantar** di luar panti :

- 1) Jumlah Anak Terlantar pada tahun 2020 sebanyak 61 orang ;
 - a) Yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial keseluruhan adalah 61 orang
 - b) Perhitungan :

Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Anak Terlantar di daerah Kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

2) Nilai capaian : $61 / 61 \times 100\% = 100 \%$

c. Rehabilitasi sosial dasar **Lanjut Usia Terlantar** di luar panti ;

- 1) Jumlah Lanjut Usia Terlantar keseluruhan sebanyak 46 orang
- 2) Perhitungan :



Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Lansia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Lansia Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

3) Nilai capaian : $46 / 46 \times 100\% = 100 \%$

d. **Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis** di luar panti ;

- 1) Jumlah Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2020 sebanyak 86 orang ;
- 2) Yang telah dibina berupa assesment awal sebanyak 86 orang
- 3) Perhitungan :

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	=	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	x 100%
		Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	

4) Nilai capaian : $86 / 86 \times 100\% = 100 \%$

e. **Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota**

- 1). Jumlah korban bencana alam pada Tahun 2020 sebanyak 1.040 Jiwa ;
- 2). Perhitungan :

Rumusan Baru :

Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	=	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	X 100
		Populasi Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	

3). Nilai capaian : $1.040 / 1.040 \times 100\% = 100 \%$

Selengkapnya realisasi capaian SPM Sosial pada Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada tabel 2.4 halaman berikut :

Tabel 4.4
Evaluasi Penerapan SPM sesuai PP 2 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan SPM	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan di luar panti	100	100	TERCAPAI
2	Pelayanan Rehabilitasi sosial anak terlantar dan di luar panti	100	100	TERCAPAI
3	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	100	100	TERCAPAI
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	100	TERCAPAI
5	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	100	100	TERCAPAI

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa capaian SPM Dinas Sosial Kota Bogor tercapai semua meskipun pada indicator indicator penunjang masih ada beberapa yang tidak tercapai .

4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD Kota Bogor

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	36.930.800	36.930.800	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar	23.464.800	15.066.800	64,21%
3	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	187.038.000	186.786.000	99,87%
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	81.743.800	75.518.800	89,94%
5	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	26.182.400	25.382.400	96,94%
	JUMLAH		355.359.800	339.684.800	96%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa anggaran APBD II yang mendukung SPM Tahun 2020 sebesar sebesar Rp. 355.359.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 339.684.800,- atau 96 % realisasinya

5. Dukungan Personil

Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor pada Awal Tahun 2020 yang berstatus PNS sebanyak 43 orang .

Untuk Pegawai Non PNS sebagai Mitra Dinas Sosial terdiri dari :

- 1) Pendamping PKH di 6 kecamatan sebanyak 67 orang

- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 68 Orang;
- 3) Satuan Bakti Pekerja Sosial 1 orang;
- 4) Pendamping Disabilitas 1 orang;
- 5) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) BPNT 1 orang ;
- 6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 70 orang ;
- 7) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 2 orang;

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan interen yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang Pekerjaan Sosial yang berlatar belakang disiplin ilmu Pekerjaan Sosial dan secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah sosial. Jumlah tenaga pendamping lapangan baik PKH, Tagana, Sakti Peksos dan TKSK belum bisa berperan secara optimal mengingat sasaran garapannya belum sebanding dengan jumlah para pendamping yang ada.
- Diluncurkannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialihkan menjadi bantuan SEMBAKO yang realisasi capaiannya dilaporkan setiap bulan telah menambah tugas pokok TKSK dilapangan sehingga tugas pokok dan fungsi utama seringkali terabaikan.
- Secara eksternal terdiri dari permasalahan penanganan gelandangan psikotik yang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya :
 - 1) Belum adanya regulasi penanganan gelandangan psikotik secara khusus sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan;
 - 2) Saling kirim antar wilayah perbatasan tetap terjadi dan seolah-olah belum ada penyelesaian yang jelas;
 - 3) Belum adanya instalasi jiwa secara khusus pada RSUD Kota Bogor untuk penampungan sementara ODGJ;



4) Persediaan anggaran yang maksimal untuk penanganan gelandangan psikotik hingga ybs dikatakan sembuh belum teralokasikan;

- Untuk penanganan masalah sosial dengan sumber dana dari APBD II masih sangat terbatas karena perhatian pemerintah daerah saat ini lebih focus pada penanganan fakir miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dengan jumlah sasaran yang semakin meningkat.

Solusi untuk menangani hal-hal tersebut yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat terutama dalam hal pengadaan stok kebencanaan maupun program perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang bersifat rehabilitasi sosial, karena di Kota Bogor tidak terdapat Panti Rehabilitasi, maka upaya kita adalah memfasilitasi para PPKS untuk di rehabilitasi ke Panti-panti milik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. BIDANG URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan dilaksanakan pada Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

	PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (M1S2)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
2	Apresiasi PAUD
	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (M1S2)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana SD
2	Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3
3	Peningkatan Manajemen Kurikulum SD
	MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN (M2S1)
3	Peningkatan Manajemen PAUD

	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Peningkatan Kualifikasi PAUD
2	Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik PAUD
3	Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik SD
	PENDIDIKAN NON FORMAL (M2T1S1)
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB
2	Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Negeri (DAK 2020)
	PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (M2S1)
1	Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD untuk PAUD Negeri (DAK 2020)
	WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (M2S1)
1	Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
3	BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri
4	BOS Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri (APBN)

B. BIDANG URUSAN BIDANG KESEHATAN

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - Pelayanan Kesehatan Balita
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 3.1 Kegiatan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM);
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.



- 3.2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
4. Program Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 4.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 5.1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
 - 5.2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV
Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

C. BIDANG URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bogor dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2014-2019 dan dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 - 1.1. Pengadaan Tangki Septik Individu.
 - 1.2. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Domestik.
 - 1.3. Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik.
 - 1.4. Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegal Gundil.
 - 1.5. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang IPAL dan IPLT.

Capaian Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota

- a. Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

- 1) Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik berdasarkan Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 dilaksanakan melalui standar teknis SPM yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, dan mutu pelayanan dasar.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR
<p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. 	<p>Pasal 7 ayat 6</p> <p>"Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait."</p>	<p>Pasal 5 Ayat (1) Huruf b</p> <p>Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum pada Pemerintah Provinsi terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 5 Ayat (2) Huruf b</p> <p>Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah pada Kabupaten/Kota terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.</p>

- 2) Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

JENIS PELAYANAN DASAR AIR LIMBAH DOMESTIK

PASAL 5

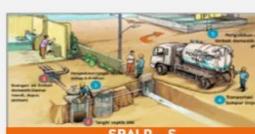
PELAYANAN DASAR PEMERINTAH PROVINSI

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota

PELAYANAN DASAR PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).



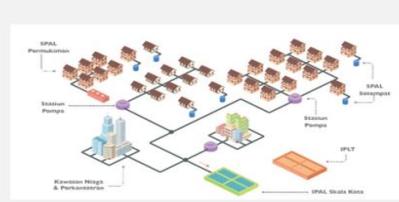

- 3) Mutu Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

MUTU PELAYANAN DASAR AIR LIMBAH DOMESTIK

PASAL 6

Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi **kuantitas** dan **kualitas** pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

- 1) **Kuantitas**
Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
- 2) **Kualitas Pelayanan Dasar**
 1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui **pelayanan akses dasar** bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk **pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha**; dan
 2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui **pelayanan akses aman** bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk **pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan**.



4) Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

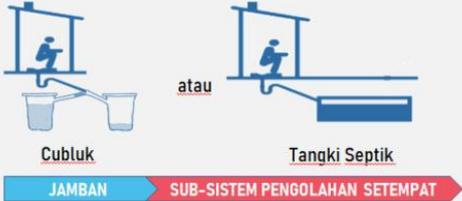
PENERIMA PELAYANAN DASAR AIR LIMBAH DOMESTIK

PASAL 7

- Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah provinsi, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama **diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.**
- Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama **diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.**



5) Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses **DASAR**



Outcome :
Pelayanan minimal akses **dasar** air limbah domestik bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha.

Komponen SPALD-S	Indikator	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
1) Sub-sistem Pengolahan Setempat	Rumah yang memiliki akses cubluk dan/atau tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk dan/atau tangki septik	Tersedianya cubluk dan/atau tangki septik bagi setiap rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan cubluk sesuai dengan Permen PU 04 tahun 2017 • Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI 2398-2017

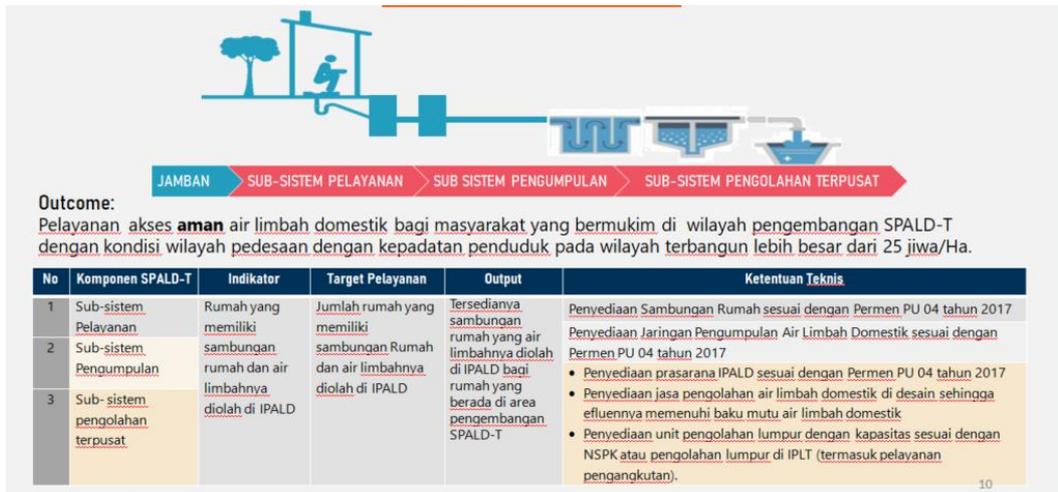
6) Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses **AMAN**



Outcome :
Pelayanan akses **aman** air limbah domestik bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Komponen SPALD-S	Indikator	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
1) Sub-sistem Pengolahan Setempat (tangki septik)	Rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	• Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI 2398-2017
2) Sub-sistem Pengangkutan	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sarana pengangkutan • Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan perencanaan • Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana pengangkutan sesuai dengan perencanaan • Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali
3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan Permen PU 04 tahun 2017 • Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

7) Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses AMAN

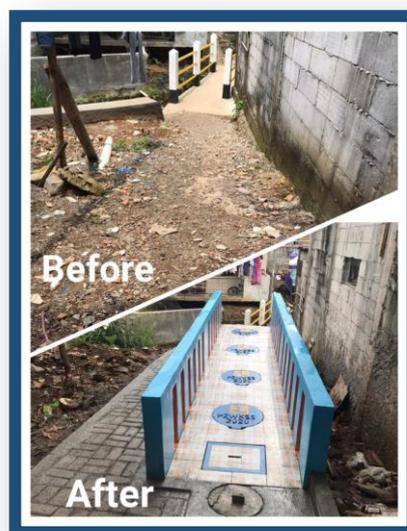


Tahun 2020 cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota Bogor adalah 70,90% angka akses layak dan 3,8 % angka akses aman.

Kenaikan capaian air limbah domestik ini merupakan upaya yang bersinergi antara dinas teknis terkait yang menangani air limbah domestik dan wilayah dalam hal ini adalah pihak Kelurahan dan Kecamatan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja adalah :

- 1) Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman di 1 lokasi yaitu di Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, yang bersumber dari APBD.



Gambar 1.
**Pembangunan SPALDT Skala Permukiman di Kelurahan Katulampa
Kecamatan Bogor Timur**

- 2) Penambahan sambungan rumah di 2 lokasi yaotu di Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur



- 3) Sosialisasi program oleh UPTD PAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, hal ini untuk mendukung pelayanan dasara air limbah domestic dengan kualitas akses aman.



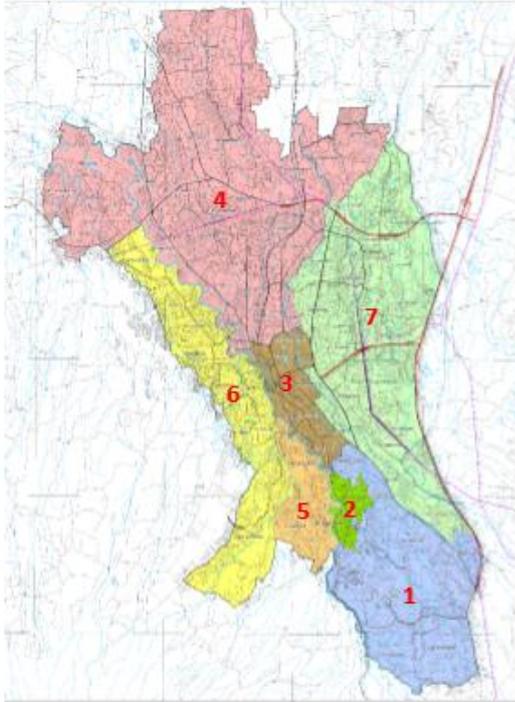
- 4) Identifikasi tanki septik individu, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah tangki septik yang telah memenuhi standr nasional, sehingga dapat menjadi data dasar untuk upaya mencapai akses aman.

Hal terpenting disini adalah adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Capaian kinerja pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sampai dengan tahun 2020 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Kota Bogor sebanyak 818.992 jiwa. Di samping itu terdapat jumlah penduduk Kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan dari PERUMDA Kabupaten Bogor sebanyak 96.665 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 16.038 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.063.920 jiwa atau sebesar 76,98% .

Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dan rencana dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi adalah sebagai berikut:

SPAM Eksisting



1

Mata Air Tangkil Kap. 120 L/dt dan IPA Cikereteg Kap. 40 L/dt dengan cakupan pelayanan ±74,96% (18.426 SL)

2

Mata Air Bantar Kambing Kap. 135 L/dt dengan cakupan pelayanan ±100% (4.416 SL)

3

IPA Cipaku Kap. 280 L/dt dengan cakupan pelayanan ±100% (46.925 SL)

4

IPA Dekeng 1 Kap. 1.000 L/dt dan IPA Dekeng 2 Kap. 500 L/dt dengan cakupan pelayanan ± 94,80 % (78.401 SL)

5

Mata Air Palasari Kap. 14 L/dt dan IPA Palasari Kap. 20 L/dt dengan cakupan pelayanan ±100% (4.145 SL)

6

Mata Air Kota Batu Kap. 71 L/dt dengan cakupan pelayanan ±71,75% (6.977 SL)

7

IPA Katulampa Kap. 2x300 L/dt

RENCANA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

TAHAP I

2019 – 2023

Program Optimalisasi & Jangka Pendek

TAHAP II

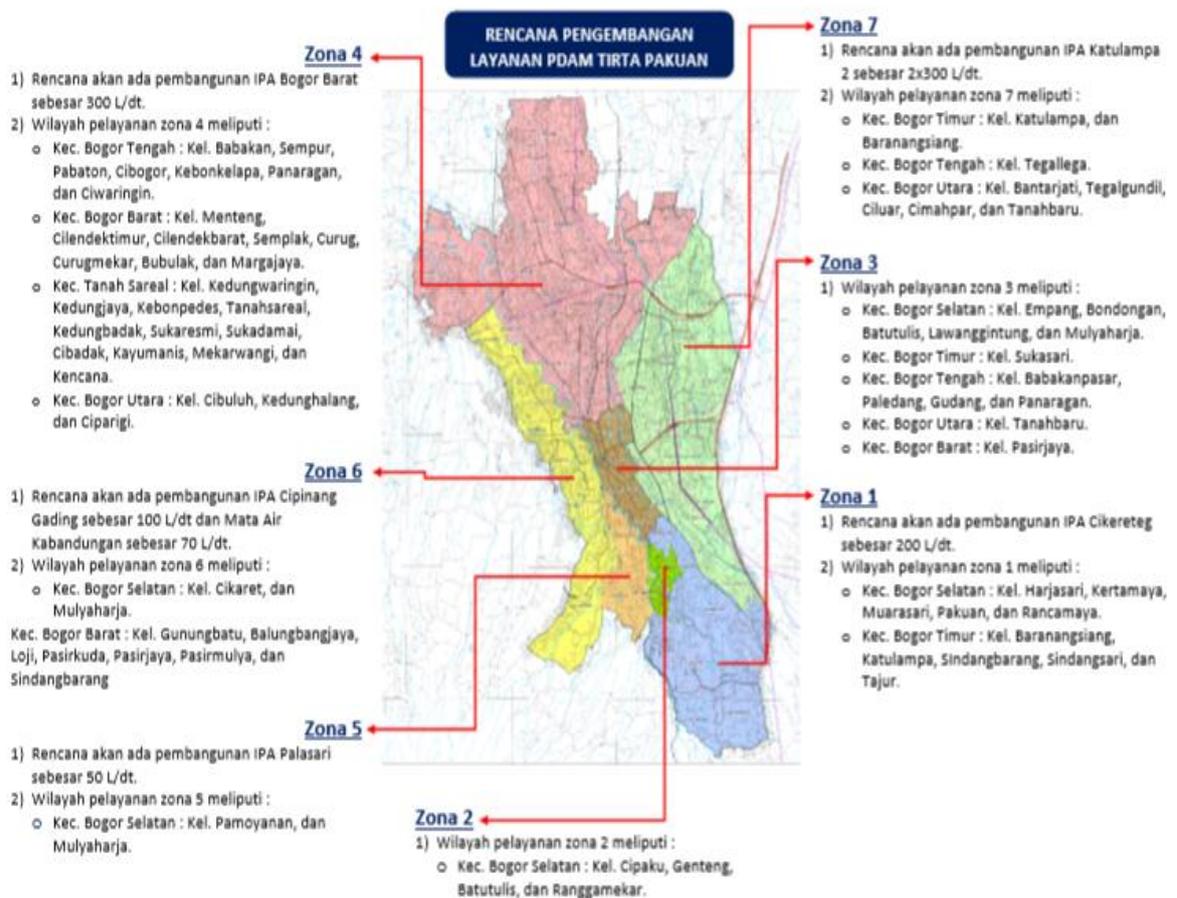
2024 – 2028

Program Jangka Menengah

TAHAP III

2029 – 2039

Program Jangka Panjang



D. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Program Lingkungan Sehat

a. Kegiatan Pengelolaan Rusunawa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 untuk kegiatan Pengelolaan Rusunawa sebesar Rp 1.443.472.000,00 (*Satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

b. Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada Tahun 2020 untuk kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa sebesar Rp 1.999.793.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah*).

E. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Bidang Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5.1 Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal

a. Kegiatan Penegakan Peraturan daerah dan sidang tipiring.

1) Pelaksanaan Penertiban Perizinan ke tempat-tempat Usaha sebanyak 67 kali, dengan hasil 197 tempat usaha, yang selanjutnya diarahkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) untuk mengurus perizinannya;

2) Melaksanakan operasi dan Sidang Tipiring terhadap PKL dan KTR, sebagai berikut :

a) Untuk kegiatan Tipiring KTR terlaksana sebanyak 5 kali, dengan hasil 66 pelanggar, serta hasil dalam Sidang Tipiring terhadap KTR sebanyak 62 putusan hakim dalam sidang dan 4 di limpahkan ke kejaksaan;

b) Untuk kegiatan Tipiring PKL terlaksana sebanyak 3 kali dengan hasil 52 pelanggar, serta hasil dalam Sidang Tipiring terhadap PKL sebanyak 31 putusan hakim dan 21 dilumpahkan ke kejaksaan dalam Sidang Tipiring;

c) Penyegehan bangunan yang melanggar Perda dengan hasil Penyegehan: 19 Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower;

b. Kegiatan pembongkaran bangunan.

Pembongkaran 5 Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower; yang melanggar Perda antara lain Bangunan Knalpot, Kios PKL, Kios Pasar Bogor, Lapak PKL Jl. Dwi Sartika, dan Kios Sorabi Jl. Sukasari.

6. Bidang Sub Urusan Bencana

6.1 Program Pelayanan informasi rawan bencana

a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Himbauan Kebencanaan;



- b. Pengembangan website dan pemeliharaan sistem informasi BPBD Kota Bogor.
- 6.2 Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi:
- a. Kegiatan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan simulasi penanggulangan bencana di sekolah;
 - b. Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana;
 - c. Peningkatan kapasitas Relawan Bencana Alam;
 - d. Simulasi Kebencanaan.
- 6.3 Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 1. Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bencana;
 - 2. Penyediaan Hunian Sementara bagi Korban Bencana;
 - 3. Pengadaan Logistik Sandang.
3. Bidang Sub Urusan Kebakaran
- 3.1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- a. Kegiatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, antara lain:
 - 2. Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran dan Hydrant;
 - 3. Sistem Keamanan kebakaran lingkungan;
 - 4. Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar;
 - 5. Penyuluhan Bahaya Kebakaran;
 - 6. Pelaksanaan HUT damkar.

F. BIDANG URUSAN BIDANG SOSIAL

Program dan kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum pada DPA Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020, mulai Januari – Desember 2020 tertuang pada program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Sumber Dana APBD Kota Bogor Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan SPM Bidang Sosial	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	36.930.800	36.930.800	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar	23.464.800	15.066.800	64,21%
3	Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	187.038.000	186.786.000	99,87%
4	Pelayanan Rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial	81.743.800	75.518.800	89,94%
5	Pelayanan Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	26.182.400	25.382.400	96,94%
	JUMLAH		355.359.800	339.684.800	96%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator SPM Sosial ada 5 (lima) kegiatan yang mendukung program SPM yang bersumber dari APBD Kota Bogor dengan total anggaran sebesar Rp. 355.359.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 339.684.800,- atau 96 % realisasinya .

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Alhamdulillah patut kita syukuri situasi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya sepanjang tahun 2020 di Kota Bogor berlangsung sangat kondusif dan sangat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bogor. Hampir dapat dikatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menghambat, merusak atau dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Dinamika kehidupan sosial politik dan ekonomi yang stabil terbukti merupakan modal utama untuk mendukung kelancaran proses pembangunan daerah. Dengan stabilitas itu pula seluruh sumberdaya pikiran dan semangat kerja dapat berkonsentrasi penuh dalam upaya membangkitkan energi besar yang sangat dibutuhkan dalam proses membangun daerah Kota Bogor.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 yang masuk tahun pertama artinya kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2020 merupakan tahapan pertama pelaksanaan dari RPJMD Kota Bogor untuk mengejar target pencapaian program dan kegiatan. Tentunya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 tidak terlepas pula pada pelaksanaan kegiatan penanganan enam bidang yang menjadi prioritas pembangunan Kota Bogor yang termaktub dalam strategi pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor.

Merupakan kewajiban semua OPD Kota Bogor, untuk secara konsekuen berusaha merealisasikan perencanaan kegiatan yang sudah disusun, di samping secara konsisten dapat melanjutkan setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta mengembangkan setiap capaian yang sudah diraih. Konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan kegiatan merupakan modal yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kota Bogor

Konsistensi dan kontinuitas tersebut setidaknya telah tergambarkan dengan berbagai raihan prestasi dan penghargaan yang telah diterima baik di tingkat Propinsi Jawa Barat dan tingkat nasional. Adapun berbagai prestasi dan penghargaan bagi Kota Bogor pada tahun 2020 antara lain :

A. Penghargaan Kota Bogor Tahun 2020

Tahun 2020 tercatat 23 penghargaan diterima Pemerintah Kota Bogor dalam kaitan kinerja dan kiprah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Salah satunya adalah keberhasilan Pemerintah Kota Bogor meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keempat kali untuk Laporan Keuangan Daerah tahun 2019 yang diserahkan di tahun 2020. Berikut daftar lengkap ke-98 penghargaan yang diterima pemerintah di tahun 2020:

1. Penghargaan SAKIP Tahun 2019 Predikat Nilai BB
2. Dinas Sosial Kota Bogor Raih Peringkat ke 3 DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / BDT= Basis Data Terpadu) di Jawa Barat
3. Penghargaan Kearsipan Nasional dengan predikat A (memuaskan) kategori Pengawasan Kearsipan dengan nilai 87,01. dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
4. Juara 1 Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jawa Barat dari Gubernur dalam Vicon Musrenbang Pemprov Jabar melalui Sekolah Ibu
5. Juara pertama pada sektor pasar tradisional (Pasar Sukasari) Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19 Kemendagri
6. Juara pertama sektor pasar modern (Lippo Plaza Ekalokasari) Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19 Kemendagri
7. Juara pertama sektor restoran (RM Bumi Aki dan Cafe Rumah 30) Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19 Kemendagri
8. Juara kedua pada sektor tempat wisata (Kebun Raya Bogor) Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid-19 Kemendagri
9. Pemkot Bogor Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut
10. Pemkot Bogor Raih Predikat Baik Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
11. Pemkot Bogor Raih Penghargaan Kinerja Debitur Terbaik 2019
12. Prokompim Pemkot Bogor Raih Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat
13. Kejari Kota Bogor Berikan Penghargaan Tiga OPD di Pemkot Bogor (Dinkes, BPBD dan RSUD)



14. Kota Bogor Borong 5 Penghargaan Sekaligus (Swasti Saba Wistara Nasional). Selain itu, ada empat sekolah yang berhasil menorehkan prestasi di Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, yakni TK Kesatuan meraih Juara 1, SD Kawungluwuk meraih Juara 2, SMPN 4 meraih Juara 2 dan SMAN 5 meraih Juara 3.
15. Bima Arya Raih Best Government Officer For Accelerated Growth Pada Ajang People Of The Year 2020
16. Bima Arya Raih Penghargaan Wali Kota Terpopuler Tahun 2020
17. JDIH Kota Bogor Raih Peringkat 3 Nasional
18. Kota Bogor Borong 4 Juara Lomba Kesatuan Gerak PKK Jawa Barat
19. Kota Bogor Sabet Penghargaan Terbaik I Anggota JDIH Jawa Barat
20. Pemkot Bogor Raih Peringkat I Penghargaan ETP dari Bank Indonesia
21. Pemerintah Kota Bogor meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020 di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (18/12/2020).
22. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhasil menyabet dua penghargaan di lomba tingkat Provinsi Jawa Barat. Sebut saja Juara I lomba P2WKSS dan Juara I lomba Ngabring Ka Sakola (Ngabaso) kategori Kota.
23. Pemerintah Kota Bogor meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik dalam penyelenggara pelayanan kepemudaan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat.

B. Inovasi Kota Bogor Tahun 2020

Selain penghargaan yang Kota Bogor dapatkan di tahun 2020, Kota Bogor juga menciptakan inovasi-inovasi dari beberapa bidang guna meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor, berikut tabel inovasi yang dilakukan selama tahun 2020

No	Inovasi	Aspek	Inovator	Implementasi
1.	New Normal Weeding Concept	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
2.	E-Invitation	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
3.	Reservasi Digital	Ekonomi	GP3I	Misi 2, Misi 3
4.	Tetap Produktif dengan AKB di Restorant Bumi Aki	Ekonomi	Restorant Bumi Aki	Misi 2, Misi 3
5.	Hangout New Normal Concept	Ekonomi	Rumah 30	Misi 2, Misi 3
6.	Aplikasi SMART	Perijinan	DPMPSTP	Misi 1, Misi 2, Misi 3
7.	Kujang Fresh	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
8.	Box Sanitizer UF-C	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
9.	QRIS Pembayaran Non Tunai Pasar Sukasari	Ekonomi	Perumda Pasar Pakuan Jaya	Misi 1, Misi 2, Misi 3
10.	Bogor Kota Dalam Taman	Pariwisata	LIPI-Kebun Raya Bogor	Misi 2, Misi 3
11.	AKB di Lippo Plaza Ekalokasari	Ekonomi	Lippa Plaza Ekalokasari	Misi 2, Misi 3
12.	Si Kancil Berlari	Kependudukan	Disdukcapil	Misi 1, Misi 2
13.	Si Mang Pangeran	Perhubungan	Dishub	Misi 1, Misi 2
14.	Jaga Asa	Sosial	Walikota/DPPMPA	Misi 1, Misi 2
15.	Salur	Sosial	Walikota/Diskominfo	Misi 1, Misi 2
16.	Salur Gugus Tugas	Sosial	Walikota/Gugus Tugas	Misi 1, Misi 2
17.	Jejak	Kesehatan	Walikota/Diskominfo	Misi 1, Misi 2
18.	Detektif Covid	Kesehatan	Walikota/Diskominfo/Dinkes/Kesra	Misi 1, Misi 2



No	Inovasi	Aspek	Inovator	Implementasi
19	Inovasi Dashboard Covid	Pelayanan Publik	Gugus Tugas	Misi 1, Misi 2
20.	Inovasi Pantau Masjid	Kesehatan	Walikota/Diskominfo/Bag. Hukum	Misi 1, Misi 2
21.	Inovasi Pantau Mudik	Kesehatan	Diskominfo	Misi 1, Misi 2
22.	Pendidikan Berlandaskan Kasih Sayang	Pendidikan	Rifki, Guru SD Kaumsari	Misi 1, Misi 2
23.	SIMOTIP	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
24.	PB Online	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
25.	Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan Langsung	Pelayanan Publik	Perumda Tirta Pakuan	Misi 1, Misi 2
26.	Grha Tiyasa	Pelayanan Publik	DPMPTSP	Misi 1, Misi 2, Misi 3
27.	Si Pinter	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Misi 1, Misi 2
28.	Regulasi Kota Bogor Hadapi Covid	Hukum	Bag. Hukum	Misi 1, Misi 2, Misi 3
29.	Pa Caseb	Kesehatan	RSUD	Misi 1

Semoga seluruh pekerjaan dan ikhtiar kita melaksanakan urusan, program dan kegiatan menjadi amal kebaikan dan penyemangat untuk melakukan yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Semoga pula Allah SWT senantiasa membimbing dan meridoi seluruh langkah dan niat baik kita membangun Kota Bogor yang mampu memanusiaikan masyarakatnya dalam kehidupan yang sejahtera dan nyaman.



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

**KOTA BOGOR
TAHUN 2020**